



TEORI EKONOMI

MIKRO DAN MAKRO



Penulis :

Puji Muniarty
Yuyun Anggraini
Luluk Fadliyanti
Fisy Amalia
Tri Widayati
Hesty Aisyah
Ida Ayu Nyoman
Yuliasuti
Tri Wahyu Rejekiningsih
Natalia Artha Malau
Teguh Pamuji Tri Nur
Hayati

ISBN 978-623-8004-21-8



9 786238 004218

TEORI EKONOMI MIKRO DAN MAKRO

**PUJI MUNIARTY
YUYUN ANGGRAINI
LULUK FADLIYANTI
FISY AMALIA
TRI WIDAYATI
HESTY AISYAH
IDA AYU NYOMAN YULIASTUTI
TRI WAHYU REJEKININGSIH
NATALIA ARTHA MALAU
TEGUH PAMUJI TRI NUR HAYATI**



GET PRESS INDONESIA

TEORI EKONOMI MIKRO DAN MAKRO

Penulis:

Puji Muniarty
Yuyun Anggraini
Luluk Fadliyanti
Fisy Amalia
Tri Widayati
Hesty Aisyah
Ida Ayu Nyoman Yulastuti
Tri Wahyu Rejekiningsih
Natalia Artha Malau
Teguh Pamuji Tri Nur Hayati

ISBN: 978-623-8004-21-8

Editor:

Ari Yanto, M.Pd.
Diana Purnama Sari, S.E.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum

Desain Sampul Dan Tata Letak: Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan Pertama, September 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Buku ini disusun secara lengkap sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami dan sebagai salah satu sumber referensi belajar. Kami menyadari, bahan Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Penyusun, September 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 RUANG LINGKUP ILMU EKONOMI.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Ekonomi Mikro	2
1.3 Ekonomi Makro.....	5
BAB 2 KONSEP ELASTISITAS.....	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Elastisitas Permintaan.....	12
2.2.1 Elastisitas Harga Permintaan.....	13
2.2.2 Elastisitas Pendapatan dari Permintaan	21
2.2.3 Elastisitas Harga Silang dari Permintaan.....	22
2.3 Elastisitas Harga Penawaran	23
BAB 3 TEORI PERILAKU KONSUMEN	26
3.1 Pendahuluan	26
3.2 Pendekatan Utilitas Marjinal/Kardinal	27
3.3 Pendekatan Utilitas Ordinal	32
3.4 Kurva Indiferen/ <i>Indifference Curve</i>	33
3.5 <i>Marginal Rate of Substitution</i>	37
3.6 Garis Anggaran/ <i>Budget Line</i>	38
3.7 Keseimbangan Konsumen	40
BAB 4 PASAR MONOPOLISTIK	43
4.1 Pendahuluan	43
4.2. Persaingan Monopolistik	44
4.3 Ciri-ciri Persaingan Monopolistik.....	45
4.4 Ekuilibrium jangka Pendek dan Jangka Panjang	46
4.5 Persaingan Monopolistik dan Efisiensi Ekonomi	48
BAB 5 PENDAPATAN NASIONAL	54
5.1 Pendahuluan	54

5.2 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional	58
5.3 Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional	60
BAB 6 TEORI KONSUMSI.....	65
6.1 Teori Konsumsi	65
6.2 Soal Latihan	74
BAB 7 TEORI INVESTASI.....	76
7.1 Pendahuluan	76
7.2 Pengertian Investasi	78
7.3 Berbagai Jenis Investasi	80
7.4 Elemen yang Mempengaruhi Investasi	82
7.5 Manfaat Investasi	85
BAB 8 INFLASI DAN PENGANGGURAN.....	87
8.1 Pendahuluan	87
8.2 Inflasi	88
8.2.1 Teori Kuantitas Uang.....	91
8.2.2 Penyebab Inflasi	93
8.2.3 Dampak Dan Manfaat Inflasi	95
8.3 Pengangguran	98
8.3.1 Mengukur Pengangguran.....	98
8.3.2 Kategori Pengangguran.....	101
8.3.3 Pengangguran Alami.....	106
8.3.4 Kebijakan Untuk Pengaruhi Pengangguran	110
BAB 9 KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER.....	119
9.1 Pendahuluan	119
9.2 Kebijakan Fiskal	119
9.2.1 Instrumen, Tujuan dan Fungsi Kebijakan fiskal.....	122
9.2.2 Komponen, Bentuk dan Jenis Kebijakan Fiskal	124
9.2.3 Contoh Kebijakan Fiskal	125
9.3 Kebijakan Moneter	127
9.3.1 Tujuan Kebijakan Moneter.....	128
9.3.2 Jenis-jenis Kebijakan Moneter.....	129
9.3.3 Instrumen Kebijakan Moneter	129
9.3.4 Contoh Kebijakan Moneter	131

BAB 10 PERBANDINGAN SISTEM-SISTEM EKONOMI	134
10.1 Pendahuluan.....	134
10.1.2 Pengertian Sistem Ekonomi	135
10.1.2 Karakteristik Sistem Ekonomi	135
10.2 Sistem Ekonomi Kapitalis.....	137
10.3 Sistem Ekonomi Sosialis.....	140
10.4 Sistem Ekonomi Campuran.....	143
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Grafik Total Utility</i>	28
Gambar 3.2 <i>Grafik Marginal Utility</i>	28
Gambar 3.3 Kurva Indiferen	34
Gambar 4.1 Kurva Pasar Monopolistik keseimbangan jangka pendek	47
Gambar 4.2 Kurva Pasar Monopolistik keseimbangan jangka Panjang	47
Gambar 4.3 Equilibrium Pasar Monopolistik	49
Gambar 4.4 Equilibrium Pasar Persaingan Sempurna	49
Gambar 6.1 Kurva Konsumsi	69
Gambar 6.2 Kurva Konsumsi dengan MPC Turun	70
Gambar 6.3 Kurva MPC dan APC	71
Gambar 8.1. <i>Demand Pull inflation</i>	94
Gambar 8.2. <i>Cost Push inflation</i>	94
Gambar 8.3 <i>Policy Induced inflation</i>	95
Gambar 8.4 Pasar Tenaga Kerja	111
Gambar 8.5 Pasar Tenaga Kerja dan Kebijakan Moneter	115

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 PDRB Jawa Tengah Atas dasar harga menurut lapangan usaha (juta rupiah), 2020-2021.....	56
Tabel 6.1 Hubungan Antara Pendapatan Disposibel dan Konsumsi	67
Tabel 6.2 Hubungan Pendapatan Disposibel, konsumsi, MPC, dan APC	71

BAB 1

RUANG LINGKUP ILMU EKONOMI

Oleh Puji Muniarty

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima

1.1 Pendahuluan

Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai suatu studi mengenai bagaimana seharusnya manusia/masyarakat menentukan pilihannya, baik dengan atau tanpa menggunakan uang dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya dan mempunyai alternatif penggunaan untuk menghasilkan barang serta kemudian mendistribusikannya baik untuk keperluan sekarang/masa yang akan datang diantara anggota-anggota masyarakat. Manfaat ilmu ekonomi bagi seorang individu, bagi bisnis maupun bagi Negara. Secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa pengetahuan akan ilmu ekonomi akan membantu orang bisnis, maupun pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan factorfaktor ekonomis yang mempengaruhinya serta untuk membuat ramalan (*forecasting*).

Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup mikro dan makro sehingga mudah untuk dipelajari. Keduanya memberikan batasan dan asumsi yang jelas. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua yaitu Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro. Kelahiran ekonomi makro dilatar belakangi depresi besar dunia yang melanda Negara-negara maju dan meluas keseluruhan dunia pada tahun 1930an. dalam ekonomi makro terdapat tiga permasalahan pokok yang dibahas yaitu inflasi, pertumbuhan output dan pengangguran. Ilmu ekonomimakro tidak memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi produk – produk tertentu dan

perilaku masing – masing industry, tapi pada penentu jumlah output nasional total. Atau dengan kata lain ilmu ekonomi makro merupakan studi tentang perekonomian secara menyeluruh dan lingkup masalahnya lebih kompleks serta lebih luas dari pada ilmu ekonomi mikro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari fungsi masing-masing unit pengambilan keputusan, khususnya perusahaan bisnis dan rumah tangga, dengan asumsi tertentu.

1.2 Ekonomi Mikro

Ekonomi Mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji perilaku penjual dan pembeli, termasuk interaksi keduanya dalam pasar faktor produksi dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli (konsumen) dan produsen secara individu dalam pasar. Sikap dan perilaku konsumen tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan sikap dan perilaku produsen tercermin dalam menawarkan barangnya. Jadi inti dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga (*price theory*). Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro yaitu (1) Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan (2) Mencapai kepuasan yang maksimum.

Beberapa kebijakan ekonomi mikro yaitu :

1. Penetapan Harga Minimum

Penetapan harga minimum merupakan intervensi kebijakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Penetapan harga juga bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Contohnya adalah banyak hasil pertanian yang dibeli dengan harga terlalu rendah untuk

dapat dijual kembali. Hal ini tentu sangat merugikan petani yang sudah menanam. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan harga minimum dengan cara membeli hasil pertanian melalui Badan Usaha Logistik (Bulog). Setelah itu, hasil pertanian akan didistribusikan lagi ke pasar yang lebih luas jangkauan konsumennya.

2. Penetapan Harga Maksimum (HET)

Penetapan harga maksimum atau biasa dikenal dengan harga eceran tertinggi (HET) dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan jika terdapat harga pasar yang dianggap terlalu tinggi dan di luar batas daya beli konsumen. Dengan begitu, penjual tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga di atas harga maksimum. Contohnya antara lain harga obat-obatan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan tarif transportasi umum.

- Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu :
 - a. Teori Harga, digunakan sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa yang ada dalam pasar serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Analisis dilakukan terhadap :
 1. Proses pembentukan harga.
 2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran.
 3. Hubungan antara harga permintaan dan penawaran.
 4. Bentuk-bentuk pasar.
 5. Konsep elastisitas permintaan dan penawaran.
 - b. Teori Produksi, digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Analisis dilakukan terhadap :

1. Semua yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa.
 2. Tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen.
 3. Kombinasi dari faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.
- c. Teori Distribusi bertujuan untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen.

Adapun peranan ekonomi mikro terhadap perusahaan. Beberapa peran ekonomi mikro dalam bisnis atau perusahaan diantaranya:

1. Merumuskan Kebijakan, Ekonomi mikro bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan perusahaan terkait dengan harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Dengan adanya teori ekonomi mikro bisa dijadikan sumber informasi untuk mempelajari interaksi di pasar dan bagaimana campur tangan pemerintah sehingga dapat membentuk kebijakan perusahaan yang strategis dan inovatif.
2. Menyusun Prediksi yakni sebagai sumber informasi interaksi di pasar. Sehingga dengan adanya ekonomi mikro maka perusahaan dapat menyusun strategi atau prediksi untuk kedepannya. Ekonomi mikro bisa membantu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar, misalnya dalam hal trend produk.
3. Memahami Perilaku Konsumen, maka secara tidak langsung perusahaan dapat memahami bagaimana kebutuhan konsumen. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap kemampuan produk atau jasa bisa bertahan di

- pasar.
4. Mengetahui Perputaran Barang, alat untuk mengetahui perputaran produk. Jika ingin bertahan di pasar, maka perusahaan harus mengawasi produk yang dijual tetap berada dijalnya tujuannya untuk menghindari kecurangan dari pesaing.
 5. Meningkatkan Produktivitas Perusahaan dapat tercapai dengan dorongan berbagai aspek seperti SDM yang berkualitas, produk yang terjamin kualitasnya dan lainnya. Sehingga dengan meningkatnya produktivitas bisa meningkatkan keuntungan perusahaan secara maksimal.

1.3 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan (*agregate*) berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen secara keseluruhan, demikian halnya jika konsumen maka yang dianalisis adalah seluruh konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang/jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Demikian juga dengan variabel permintaan, penawaran, perusahaan, harga dan sebagainya. Intinya ekonomi makro menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan, sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan (*income theory*). Tujuan dan sasaran utama dari ilmu ekonomi makro sebagai berikut :analisis ekonomi makro antara lain (1) Sisi permintaan agregate dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan (2) Pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan.

Adapun perhatian utama dari ilmu ekonomi makro yaitu :

1. Inflasi

Merupakan kenaikan harga secara keseluruhan. Pengurangan inflasi merupakan tujuan dari kebijakan pemerintah. Inflasi ada tiga macam antara lain *creeping inflation*, *galloping inflation*, dan *hyper inflation*. Kebanyakan orang tidak sadar tentang kehidupan dibawah inflasi yang sangat tinggi. Masyarakat sudah terbiasa dengan kenaikan harga setian hari, tiap jam bahkan tiap menit sekalipun. Jika harga terus mengalami kenaikan atau inflasi pada suatu Negara semakin tinggi maka perekonomian dan organisasi secara keseluruhan di Negara tersebut akan hancur.

2. Pertumbuhan *Output*

Perekonomian mengalami pertumbuhan tidaklah mendarat pada tingkat sepanjang waktu, melainkan akan mengalami kecendrungan bergelombang naik turun pada kinerja jangka pendek yang secara teknis disebut daur (*Siklus*) Bisnis. Kinerja perekonomian memiliki ukuran utama yaitu *output agregat*, *jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama satu periode tertentu*. Bila output agregat mengalami penurunan, maka barang dan jasa akan berkurang sehingga standar hidup rata-rata menurun yang disebut *Resesi*. Dinyatakan Resesi apabila terjadi penurunan output agregat selama dua truwulan berturut – turut.

3. Dan Pengangguran

Merupakan masalah yang sering didengar dalam beberapa kesempatan. Dalam ilmu ekonomi mikro maka tanggarapan atas berlebihnya penawaran tenaga kerja adalah dengan menurunkan upah sehingga keseimbangan akan tercapai lagi. Sedangkan adanya pengangguran tampaknya mengimplikasikan bahwa

pasar tenaga kerja agregat tidak berada dalam keseimbangan.

Seorang pembuat kebijakan pemerintah pasti menginginkan inflasi rendah, pertumbuhan output tinggi dan pengangguran rendah. Tapi dalam perekenomian makro tidak semua dapat berjalan baik. Bila kita memperbaiki satu sisi maka kita akan memperburuk sisi yang lain. Sehingga dalam perekenomian makro penuh dengan saling meniadakan (*Trade-off*)

Adapun kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi perekonomian makro. Kebijakan tersebut ada tiga jenis yaitu:

1. Kebijakan Fisikal

Salah satu cara pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pada tahun 1930an Keynes mengeluarkan suatu gagasan bahwa kebijakan fisikal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan peluang kerja. Pemerintah dapat menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.

2. Kebijakan Moneter

Adanya kendali pemerintah pada jumlah uang yang beredar di perekonomian sehingga pemerintah membutuhkan suatu lembaga yang disebut bank sentral yang dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dindonesia bank sentral bernama bank Indonesia (BI) dan Amerika Serikat Bernama Federal reserve (FED). Jumlah uang beredar yang ditawarkan bank sentral akan mempengaruhi tingkat harga keseluruhan, tingkat suku

bunga dan tingkat kurs mata uang asing, tingkat pengangguran dan tingkat output.

3. Kebijakan Pertumbuhan

Kekhawatiran para ahli ekonomi makro adalah kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih tinggi atau defisit dari pengumpulan pajak, sebenarnya menguras seluruh simpanan yang sebenarnya mengalir ke dunia bisnis untuk digunakan sebagai investasi modal. Sedangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan adalah dengan menurunkan tarif pajak, sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi.

Tujuan dari penerapan kebijakan Ekonomi Makro untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Membuat Produksi dalam Negeri yang Tinggi, serta Menciptakan Kondisi Ekonomi yang Stabil dimana, Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Membuat Neraca Pembayaran Seimbang dan Meratanya pembagian pendapatan penduduk yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud.

Ilmu ekonomi makro membahas baik tren jangka panjang maupun fluktuasi jangka pendek yang merupakan bagian dari siklus bisnis. Dan kebanyakan variabel ekonomi makro mengalami gelombang naik dan turun sepanjang waktu dan perekonomian secara keseluruhan mengalami periode kemakmuran dan periode resesi. Depresi yang ditandai dengan pengangguran tenaga kerja dan permintaan konsumen rendah jika dihubungkan dengan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang – barang dan jasa – jasa untuk konsumsi. Ekspansi suatu keadaan dimana

penyehatan perekonomian telah terjadi dari kondisi sebelumnya yaitu resesi atau bahkan depresi. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan pengeluaran konsumsi masyarakat. Serta pengurangan pengangguran tenaga kerja.

Ilmu ekonomi memerlukan alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama, pada tingkat yang lebih mendalam matematika memegang peranan yang sangat penting. Selain itu, statistika juga diperlukan untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, T. 2016. *Esensi Ekonomi Makro* (1st ed.). Zifatama Publisher.
<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/570-ekonomi-mikro-pengertian-tujuan-dan-ruang-lingkupnya>
<https://www.gramedia.com/literasi/ekonomi-makro/>
SP, I. (n.d.). *Teori Ekonomi Mikro.pdf* (1st ed.). Gunadarma.
- Sugiyanto, & Anggun, R. R. 2020. *Pengantar Ilmu Ekonomi* (1st ed.). Banten: Indonesia Maju YPSIM.

BAB 2

KONSEP ELASTISITAS

Oleh Yuyun Anggraini

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

2.1 Pendahuluan

Dalam ilmu ekonomi secara sederhana kita sering menemukan bagaimana salah satu variabel berubah akibat perubahan variabel yang lainnya. Secara matematis, *slope* atau kemiringan pada kurva permintaan dan penawaran berhubungan dengan perubahan harga dan jumlah kuantitas barang yang diminta serta kuantitas barang yang ditawarkan.

Pada konsep permintaan kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang bukan hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut, namun juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yaitu tingkat pendapatan konsumen serta harga barang substitusi dari barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Begitupula pada konsep penawaran bergantung pada harga dan variabel-variabel yang dapat berdampak pada biaya produksi.

Sebagai contoh ketika harga beras turun maka permintaan beras akan meningkat serta penawaran akan beras akan meningkat. Sehingga berdasarkan teori tersebut kita perlu mengetahui seberapa besar kenaikan atau penurunan beras yang diminta serta ditawarkan. Selain itu kita juga perlu mengetahui seberapa sensitif permintaan dan penawaran akan beras terhadap harganya. Misalnya, jika harga beras mengalami kenaikan sebanyak 10% berapakah perubahan permintaan akan beras? Serta berapa perubahannya jika terjadi kenaikan atas pendapatan konsumen?

Beberapa pertanyaan ini akan kita jawab dengan menggunakan konsep elastisitas.

Menurut (Pindyck and Rubinfeld, 2013) bahwa "*an elasticity measures the sensitivity of one variable to another*" yang artinya adalah elastisitas dihitung untuk mengukur seberapa sensitif suatu variabel terhadap variabel lainnya, atau dengan kata lain elastisitas merupakan indikator untuk mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan pada salah satu faktor penentu permintaan dan penawarannya. (Mankiw, Quah and Wilson, 2014)

$$\text{Elastisitas A terhadap B} = \frac{\% \Delta A}{\% \Delta B}$$

Sumber: (Case and Fair, 2007)

Jika variabel A berubah sebagai respon atas perubahan variabel lain yaitu variabel B, maka elastisitas variabel A terhadap variabel B sama dengan persentasi perubahan variabel A dibagi dengan persentase perubahan variabel. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh (Nicholson and Snyder, 2012) bahwa elastisitas digunakan para ekonom untuk mengukur dampak perubahan satu variabel akibat perubahan variabel lainnya secara proporsional.

2.2 Elastisitas Permintaan

Kita ketahui bahwa banyaknya permintaan akan barang bukan hanya dipengaruhi oleh harga barang itu saja namun juga dipengaruhi oleh besaran pendapatan serta harga barang lainnya. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa ketika harga barang turun maka konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang, hal tersebut juga terjadi ketika pendapatan konsumen tinggi dan ketika harga barang subsitusinya juga tinggi. Untuk menghitung

seberapa besar respon konsumen terhadap perubahan pada variabel-variabel tersebut, para ekonom menggunakan konsep elastisitas. Kita akan memulai membahas mengenai elastisitas harga terhadap permintaan.

2.2.1 Elastisitas Harga Permintaan

Sesuai dengan konteks hukum permintaan bahwa ketika harga suatu kuantitas barang naik, maka permintaan atas barang tersebut akan menurun. (Nicholson, 2002) mendefinisikan elastisitas harga permintaan sebagai perubahan persentase jumlah kuantitas barang yang diminta akibat perubahan harga barang tersebut sebesar 1 persen. Dengan kata lain bahwa elastisitas harga permintaan merupakan sebuah rasio perubahan persentase kuantitas yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Secara matematis dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas Harga Permintaan} = \frac{\text{Perubahan persentase jumlah permintaan}}{\text{Perubahan persentase harga}}$$

Sumber: (Mankiw, Quah and Wilson, 2014)

2.2.1.1 Angka Elastisitas Harga

Menurut (Rahardja and Manurung, 2010) ada lima jenis angka elastisitas harga yaitu diantaranya:

1. Inelastis

Permintaan termasuk dalam kategori inelastis ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta nilainya lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga atau dapat ditulis secara matematis sebagai berikut $\Delta Q < \Delta P$.

Permintaan termasuk dalam kategori inelastis ketika nilai elastisitas lebih kecil dari 1 ($E_p < 1$). Salah satu contoh permintaan barang yang termasuk dalam kategori inelastis adalah beras, karena beras termasuk dalam kebutuhan pokok.

2. Elastis

Permintaan termasuk dalam kategori elastis ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta nilainya lebih besar dibandingkan persentase perubahan harga atau dapat ditulis secara matematis sebagai berikut $\Delta Q > \Delta P$. Permintaan termasuk dalam kategori inelastis ketika nilai elastisitas lebih besar dari 1 ($E_p > 1$). Salah satu contoh permintaan barang yang termasuk dalam kategori elastis adalah barang mewah.

3. Elastis Unitari

Permintaan termasuk dalam kategori elastis unitari ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga atau dapat ditulis secara matematis sebagai berikut $\Delta Q = \Delta P$. Permintaan termasuk dalam kategori elastis unitari ketika nilai elastisitas sama dengan 1 ($E_p = 1$).

4. Inelastis Sempurna

Permintaan termasuk dalam kategori inelastis sempurna ketika perubahan harga tidak memberikan dampak pada perubahan permintaan terhadap suatu barang atau bisa disederhanakan bahwa berapapun harga barang tersebut, konsumen akan tetap membelinya. Permintaan termasuk dalam kategori inelastis sempurna ketika nilai elastisitasnya sama dengan 0 ($E_p = 0$). Contohnya adalah permintaan garam.

5. Elastis Sempurna

Permintaan termasuk dalam kategori elastis sempurna ketika perubahan harga akan memberikan dampak yang tak terhingga pada perubahan permintaan terhadap suatu barang. Permintaan termasuk dalam kategori elastis sempurna ketika nilai elastisitasnya sama dengan nilai yang tak terhingga ($E_p = \infty$). Contohnya adalah permintaan bensin.

2.2.1.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Elastisitas Harga Permintaan

Menurut (Curtis and Irvine, 2016) ada beberapa faktor yang dapat menentukan mengapa elastisitas harga pada beberapa barang dan jasa tinggi atau bahkan rendah. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan:

1. Selera

Jika suatu barang dan jasa merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan seseorang, maka variasi harga memiliki dampak yang minimal terhadap kuantitas yang diminta, sehingga barang yang termasuk kebutuhan pokok memiliki permintaan yang tidak elastis.

2. Kemudahan barang untuk disubstitusikan

Ketika produsen menaikkan harga barang yang ditawarkan, maka dia akan kehilangan konsumennya ketika barang yang dijual memiliki barang substitusi yang dapat menggantikan barang yang dijual.

3. Jangka waktu

Barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis untuk jangka waktu yang lebih panjang.

2.2.1.3 Menghitung Elastisitas Harga Permintaan

Sebelum menghitung elastisitas harga pada permintaan, terlebih dahulu kita harus menghitung perubahan persentase jumlah barang yang diminta serta perubahan persentase pada harga. Untuk menghitung perubahan persentase, tahap pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai dasar permintaan dan dasar harga. Pada umumnya jumlah permintaan dan harga awal digunakan sebagai nilai dasar pada perhitungan perubahan. Berikut tabel contoh jumlah permintaan dan harga beras pada dua periode.

PERIODE	Harga Beras (P)	Jumlah Permintaan Beras (Q)
Bulan 1	Rp. 10.000/kg	100 kg
Bulan 2	Rp. 14.000/kg	80 kg

Setelah menentukan nilai dasar maka dapat dihitung perubahan persentase perubahannya dengan menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ perubahan jumlah permintaan} = \frac{\text{Perubahan jumlah permintaan}}{Q_1} \times 100\%$$

Sumber: (Case and Fair, 2007) $= \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \times 100\%$

Sebagai contoh pada tabel diketahui jumlah permintaan beras di bulan pertama sebanyak 100 kg ($Q_1=100$), kemudian permintaan di bulan kedua mengalami penurunan sebanyak 80 kg ($Q_2 = 80$) maka perubahan jumlah permintaan beras dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ perubahan jumlah permintaan beras} &= \frac{80 - 100}{100} \times 100\% \\ &= -20\% \end{aligned}$$

Setelah menghitung persentase perubahan permintaan, selanjutnya kita akan menghitung persentase perubahan harga dengan menggunakan harga awal menjadi harga dasar pada perhitungan perubahan harga. Berikut rumus menghitung persentase perubahan harga:

$$\begin{aligned}\% \text{ perubahan harga} &= \frac{\text{Perubahan Harga}}{P_1} \times 100\% \\ &= \frac{P_2 - P_1}{P_1} \times 100\%\end{aligned}$$

Sebagai contoh jika diketahui harga beras di bulan pertama seharga Rp. 10.000/kg ($P_1=10.000$), dan harga pada bulan kedua mengalami kenaikan seharga Rp. 12.000/kg ($P_2=14.000$), maka persentase perubahan harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{ perubahan harga beras} &= \frac{14.000 - 10.000}{10.000} \times 100\% \\ &= 40\%\end{aligned}$$

Setelah menghitung persentase perubahan jumlah permintaan dan persentase perubahan harga maka langkah selanjutnya adalah kita dapat menghitung elastisitas harga permintaan. Diketahui terjadi kenaikan harga beras sebesar 40% yang kemudian memberikan dampak penurunan jumlah permintaan beras sebanyak -20% maka elastisitas harga permintaan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas Harga Permintaan beras} = \frac{-20\%}{40\%} = -0,5$$

Hubungan antara harga dan permintaan barang pada hukum permintaan memiliki hubungan yang berlawanan, dimana perubahan jumlah permintaan bersifat positif (menggambarkan kenaikan) sedangkan perubahan harga bersifat negatif (menggambarkan penurunan). Sehingga dari contoh perhitungan diatas dapat dilihat bahwa elastisitas harga

permintaan beras adalah sebesar -0,5 yang artinya bahwa elastisitas beras bersifat inelastis, dikarenakan hasil perhitungan elastisitasnya <1 atau $\Delta Q < \Delta P$. Hal ini disebabkan karena beras merupakan komoditi pokok.

Rumus Titik Tengah (*Mid Point*)

Menghitung elastisitas menggunakan rumus titik tengah atau *mid point* adalah cara yang lebih baik digunakan untuk menghitung perubahan persentase dan juga elastisitas. Hal ini disebabkan karena menghitung perubahan persentase dengan menggunakan titik awal atau nilai awal sebagai nilai dasar akan menimbulkan perbedaan hasil elastisitas jika dihitung berbalik arah.

Sebagai contoh berdasarkan pada tabel diatas bahwa terjadi kenaikan harga beras pada bulan kedua sehingga mengakibatkan penurunan jumlah beras yang diminta yang awalnya pada bulan 1 harga beras Rp.10.000,-/kg jumlah permintaan beras sebanyak 100 kg menurun menjadi 80 kg di bulan kedua yang disebabkan oleh kenaikan harga beras sebesar Rp.14.000,-/kg. Sehingga dapat disederhanakan sebagai berikut:

Titik I	P1 = 10.000/kg	Q1 = 100 kg
Titik II	P2 = 14.000/kg	Q2 = 80 kg

Pada titik pertama ke titik kedua harga beras naik sebesar 40% yang mengakibatkan penurunan permintaan beras sebesar 20% sehingga elastisitas harga permintaan sebesar 0,5. Namun sebaliknya jika dihitung elastisitas dari titik kedua ke titik pertama maka harga turun sebesar 29% yang mengakibatkan kenaikan jumlah beras yang diminta sebesar 25% sehingga elastisitas harga permintaan sebesar 0,9. Dari hasil perhitungan sebelumnya terdapat perbedaan hasil

elastisitas jika dihitung berbalik arah, maka perhitungan persentase dengan menggunakan rumus tersebut tidak direkomendasikan karena ketika kita mengubah "arah" perhitungan seharusnya tidak mengubah nilai elastisitasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut maka kita dapat menghitung elastisitas harga permintaan menggunakan rumus titik tengah yang mana diawali dengan perhitungan persentase perubahan permintaan beras serta persentase perubahan harga beras. Berikut adalah rumus perhitungan persentase perubahan permintaan beras menggunakan Rumus Titik Tengah (*Mid Point*):

$$\begin{aligned} \% \text{ perubahan jumlah permintaan} &= \frac{\text{Perubahan jumlah permintaan}}{(Q_1 + Q_2)/2} \times 100\% \\ &= \frac{Q_2 - Q_1}{(Q_1 + Q_2)/2} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber: (Case and Fair, 2007)

$$\begin{aligned} \% \text{ perubahan jumlah permintaan beras} &= \frac{80 - 100}{(100 + 80)/2} \times 100\% \\ &= -22\% \end{aligned}$$

Setelah menghitung persentase perubahan jumlah permintaan beras menggunakan rumus titik tengah, selanjutnya kita akan menghitung persentase perubahan harga beras.

$$\begin{aligned}\% \text{ perubahan harga} &= \frac{\text{Perubahan Harga}}{(P_1 + P_2)/2} \times 100\% \\ &= \frac{P_2 - P_1}{(P_1 + P_2)/2} \times 100\%\end{aligned}$$

Sumber: (Case and Fair, 2007)

$$\begin{aligned}\% \text{ perubahan harga beras} &= \frac{14.000 - 10.000}{(10.000 + 14.000)/2} \times 100\% \\ &= 57\%\end{aligned}$$

Sehingga elastisitas harga permintaan beras dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Elastisitas Harga Permintaan} &= \frac{\% \text{ perubahan permintaan beras}}{\% \text{ perubahan harga}} \\ &= \frac{-22\%}{57\%} = -0,38\end{aligned}$$

Terdapat perbedaan hasil perhitungan elastisitas harga permintaan menggunakan rumus titik tengah (*mid point*) dengan menggunakan rumus nilai awal sebagai nilai dasar. Pada perhitungan sebelumnya nilai elastisitas harga permintaan beras sebesar -0,50% sedangkan jika kita hitung menggunakan rumus titik tengah (*mid point*) maka hasil perhitungannya sebesar -0,38. Hasil dari perhitungan

menggunakan rumus titik tengah (*mid point*) lebih kecil namun berdasarkan hasil perhitungan elastisitas harga permintan beras tetap termasuk dalam kategori inelastis dikarenakan hasil perhitungannya kurang dari 1.

2.2.2 Elastisitas Pendapatan dari Permintaan

Definisi elastisitas pendapatan dari permintaan menurut (Goolsbee, Levitt and Syverson, 2013) adalah rasio persentase perubahan jumlah permintaan barang terhadap persentase perubahan jumlah pendapatan konsumen. Elastisitas pendapatan dari permintaan dihitung untuk menghitung perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan jumlah pendapatan konsumen. Secara matematis dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Elastisitas pendapatan dari Permintaan} = \frac{\% \text{ perubahan jumlah permintaan}}{\% \text{ perubahan pendapatan}}$$

Sumber: (Paul Krugman and Robin Wells, 2009)

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam elastisitas pendapatan ada perbedaan elastisitas antara barang normal dan barang inferior. Pada barang normal elastisitas bersifat positif karena ketika pendapatan naik maka permintaan akan barang juga akan naik begitupula sebaliknya jika pendapatan menurun maka permintaan akan barang tersebut juga akan menurun sebagai contoh permintaan atas barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, sabun, gula dan lain sebagainya. Namun, elastisitas pada barang inferior bersifat negatif karena ketika pendapatan naik maka permintaan akan barang akan menurun, begitupula sebaliknya jika pendapatan

menurun maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Barang-barang inferior identik dengan barang yang dikonsumsi oleh konsumen berpendapatan rendah. Sebagai contoh ubi kayu atau jagung yang dikonsumsi sebagai makanan pokok, ketika pendapatan konsumen meningkat maka konsumen cenderung untuk beralih mengkonsumsi beras dibanding ubi kayu atau jagung, namun jika pendapatannya menurun maka konsumen cenderung untuk mengganti beras dengan ubi atau jagung sebagai substitusi atas beras sebagai makanan pokok.

2.2.3 Elastisitas Harga Silang dari Permintaan

Menurut (Sudarmanto *et al.*, 2021) bahwa elastisitas harga silang dari permintaan adalah persentase perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga barang lain sebesar 1 persen. Elastisitas ini digunakan untuk mengukur besarnya perubahan jumlah permintaan ketika terjadi perubahan dari harga barang lain. Berikut rumus elastisitas harga silang dari permintaan:

$$\text{Elastisitas Harga Silang dari Permintaan} = \frac{\% \text{ perubahan jumlah permintaan}}{\% \text{ perubahan harga barang lain}}$$

Sumber: (Sudarmanto *et al.*, 2021)

Elastisitas harga silang dari permintan dapat bernilai positif maupun negatif. Pada barang substitusi, elastisitas harga silang dari permintaan bernilai positif karena seperti yang kita ketahui bahwa barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan satu sama lain. Sebagai contoh beras dan jagung, ketika harga beras naik maka konsumen beralih mengkonsumsi jagung. Secara sederhana dapat disimpulkan

bahwa ketika harga barang A naik maka mengakibatkan kenaikan permintaan pada barang B sehingga elastisitas harga silang dari permintaan barang substitusi bernilai positif.

Namun berbeda pada barang komplementer, barang komplementer adalah barang yang digunakan secara bersamaan dengan barang lain atau digunakan sebagai pelengkap atas barang lain. Elastisitas harga silang dari permintaan pada barang komplementer adalah bernilai negatif. Sebagai contoh kompor dan juga bahan bakar minyak, jika harga kompor naik maka akan mengakibatkan penurunan permintaan atas bahan bakar minyak dikarenakan bahan bakar minyak adalah barang pelengkap atas kompor. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ketika barang A naik maka mengakibatkan penurunan permintaan pada barang B sehingga elastisitas harga silang dari permintaan barang komplementer bernilai negatif.

2.3 Elastisitas Harga Penawaran

Menurut (N. Gregory Mankiw, 2017) bahwa elastisitas harga penawaran adalah indikator untuk mengukur besaran perubahan jumlah penawaran akan barang akibat perubahan harga. Jika perubahan penawaran akan barang cukup besar akibat perubahan harga maka penawaran barang tersebut elastis, namun jika perubahan penawaran akan barang tidak begitu besar akibat perubahan harga maka penawaran akan barang tersebut inelastis. Berikut adalah rumus elastisitas harga penawaran:

$$\text{Elastisitas Harga Penawaran} = \frac{\% \text{ perubahan jumlah penawaran}}{\% \text{ perubahan harga}}$$

Sumber: (Sudarmanto *et al.*, 2021)

Pada umumnya elastisitas penawaran bernilai positif pada pasar output karena ketika harga mengalami kenaikan maka penawaran akan kuantitas barang akan meningkat. Begitupun sebaliknya ketika harga suatu barang mengalami penurunan maka penawaran akan barang akan menurun dengan asumsi *ceteris paribus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Case, K.E. and Fair, R.C. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. 8th edn. Jakarta: Erlangga.
- Curtis, D. and Irvine, I. 2016. Principles of Microeconomics'. Lyryx Advancing Learning. Available at: www.lyryx.com.
- Goolsbee, A., Levitt, S.D. and Syverson, C. 2013. *Microeconomics*. New York, NY: Worth Publishers.
- Mankiw, N.G., Quah, E. and Wilson, P. 2014. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- N. Gregory Mankiw. 2017. *Principles of Microeconomics*. Boston: Cengage Learning.
- Nicholson, W. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Nicholson, W. and Snyder, C. 2012. *Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions*. United States of Amerika: Cengage Learning.
- Paul Krugman and Robin Wells. 2009. *Microeconomics*. United States of Amerika: Worth Publishers.
- Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. 2013. *Microeconomics*. 8th ed. Boston: Pearson (The Pearson series in economics).
- Rahardja, P. and Manurung, M. 2010. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarmanto, E. *et al*. 2021. *Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis.

BAB 3

TEORI PERILAKU KONSUMEN

Oleh Luluk Fadliyanti

Universitas Mataram

3.1 Pendahuluan

Secara teoritis perilaku konsumen merupakan suatu studi mengenai tingkah laku konsumen yang terdapat pada hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang mengalami kenaikan maka jumlah permintaan terhadap suatu barang akan mengalami penurunan dan sebaliknya apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah permintaan terhadap suatu barang dapat mengalami kenaikan, *ceteris paribus*. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan di dalam teori perilaku konsumen, yaitu: (1) Pendekatan Utilitas Marginal/Kardinal; (2) Pendekatan Utilitas Ordinal.

1. Pendekatan Utilitas Marginal/kardinal merupakan pendekatan yang menyatakan jika besarnya nilai guna/utilitas yang didapatkan oleh seseorang atau konsumen atau tindakan menggunakan produk bisa terukur secara kuantitatif dengan anggapan bahwa jika kepuasan setiap konsumen bisa terukur menggunakan uang ataupun satuan lainnya yang memiliki sifat kardinal.
2. Pendekatan Utilitas Ordinal merupakan suatu pendekatan yang menyatakan bahwa jika tingkat kepuasan yang dimiliki oleh konsumen tidak dapat diukur dalam bentuk satuan tertentu.

3.2 Pendekatan Utilitas Marjinal/Kardinal

Untuk mengetahui bagaimana tingkah laku konsumen di dalam memenuhi kepuasannya, maka digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Utilitas diukur dengan uang atau satuan lainnya.
- b. Hukum Gossen I berlaku "*Law of Diminishing Marginal Utility*", yaitu semakin banyak barang dikonsumsi atau digunakan maka semakin menurun tingkat kepuasannya.
- c. Konsumen senantiasa berupaya agar tercapainya tingkat kepuasan yang maksimal.
- d. Kepuasan secara total bersifat aditif yakni jumlah kepuasan yang didapatkan melalui tiap-tiap produk yang digunakan

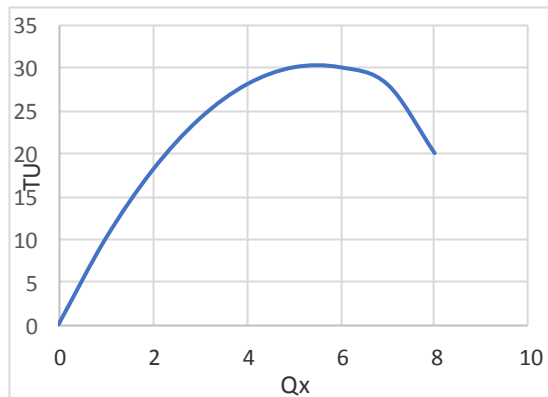
Berdasarkan asumsi di atas, maka didapatkan beberapa perbedaan antara utilitas total dan utilitas marjinal. Dimana utilitas total merupakan banyaknya tingkat kepuasan yang didapatkan oleh masing-masing suatu barang yang telah dikonsumsi oleh konsumen. Sementara utilitas marjinal merupakan penambahan ataupun pengurangan dari kepuasan yang didapat akibat dari penambahan maupun pengurangan suatu barang yang dikonsumsi.

a. Utilitas Total dan Utilitas Marjinal Diukur Secara Kardinal

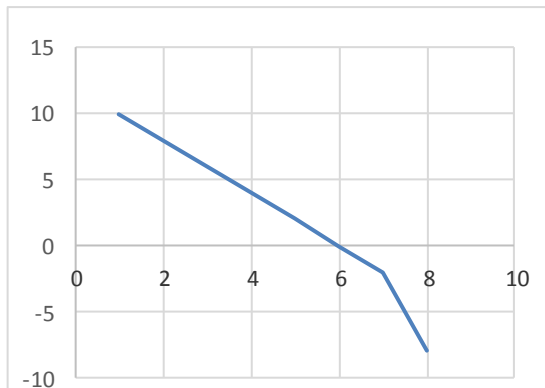
Tingkat kepuasan dapat terjadi ketika konsumen mengkonsumsi suatu barang dengan total *utility* dapat mencapai titik maksimum serta utilitas marjinal nya sama dengan nol. Sehingga ketika konsumen ingin menambah konsumsi suatu barang maka nilai pertambahannya akan menjadi *negative* dan mengakibatkan total *utility* menurun. Hubungan antara marginal *utility* dan total *utility* dapat dilihat sebagai berikut:

Q_x	:	0	1	2	3	4	5	6	7	8
TU_x	:	0	10	18	24	28	30	30	28	20
										
MU_x	:		10	8	6	4	2	0	-2	-8

Keterangan: TU = *Total Utility* dan MU = *Marginal Utility*



Gambar 3.1 Grafik *Total Utility*



Gambar 3.2 Grafik *Marginal Utility*

Berdasarkan pada gambar yang disajikan pada grafik Utilitas Total/*Total Utility* (TU) pada awalnya kurva berada pada titik 0 yang artinya pada waktu tersebut tidak dalam mengonsumsi/menggunakan suatu barang, lalu kurva semakin naik saat mengonsumsi/menggunakan suatu barang dimana nilai *total utility* juga akan bertambah, namun kurva mulai menurun saat konsumsi / penggunaan barang ada di titik 6. Selanjutnya dari Gambar 2.2 pada grafik Utilitas Marjinal/*Marginal Utility* dapat dilihat bahwa setiap pertambahan konsumsi suatu barang mengakibatkan penurunan dari nilai *Total Utility* (TU), hal tersebut menunjukkan adanya hukum *marginal utility* yang disebut “*Law of Diminishing Marginal Utility*” yaitu semakin banyak barang dikonsumsi atau digunakan maka semakin menurun tingkat kepuasannya.

b. Pemaksimalan Nilai Guna (*Utility*)

Di dalam mengonsumsi suatu barang tidaklah sulit dalam penentuan tingkat konsumsi nilai guna maksimum yang dapat tercapai yakni terdapat ketika *total utility* mencapai nilai yang maksimal. Namun pada kondisi yang sebenarnya beragam harga dari bermacam-macam produk ialah berlainan maka ada pula persyaratan yang seharusnya dipenuhi yaitu setiap rupiah yang digunakan bagi pembelian unit tambahan dari beragam macam produk dapat memberi nilai guna marginal dengan jumlah yang sama. Semisal si A telah membeli serta mengonsumsi sebanyak dua macam produk yakni makanan serta pakaian yang memiliki harga Rp 5.000,- dan Rp 50.000,-. Contohnya jika penambahan 1 unit makanan yang mempunyai nilai guna marginal sebesar 5 serta penambahan untuk 1 unit pakaian mempunyai nilai guna marginal sebesar 50. Dan jika si A memiliki uang sebanyak Rp 50.000,- maka si A dapat melakukan pembelian terhadap 10 unit

tambahan makanan dan nilai marjinal yang akan didapat yaitu 10 dikalikan 5 yaitu 50.

Namun jika uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian terhadap pakaian maka orang tersebut hanya memperoleh satu unit dan nilai marjinal yang diperoleh hanya 50. Dapat diketahui jika seseorang ini tidak harus mengalami kesulitan dalam penentuan produk mana yang ditambahkan ke dalam konsumsi. Apapun yang dipilihnya dapat memberi nilai guna marjinal dengan jumlah yang sama, maka berdasarkan contoh yang sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a. Seseorang dapat memaksimalkan nilai guna/utilitas yang dimiliki tiap-tiap barang konsumsi jika perbandingan dari nilai guna marginal beragam barang serupa terhadap perbandingan harga barang itu sendiri. Keadaan semacam hal tersebut adalah perwujudan dari contoh sebelumnya yang telah dipaparkan. Perbandingan antara harga dari makanan serta pakaian yaitu Rp5.000,- banding Rp50.000,- ataupun 1 banding 10, yang mana dalam perbandingan nilai marjinal antara makanan serta pakaian yakni 5 banding 50 ataupun 1 banding 10.
- b. Seseorang dapat memaksimalkan nilai guna yang dimiliki oleh tiap-tiap barang konsumsi jika nilai guna marginal terhadap tiap rupiah yaitu serupa pada tiap barang yang dikonsumsi. Sebagai contoh yang telah dipaparkan di atas, bahwa nilai guna marginal tiap rupiah oleh pertambahan makanan yaitu nilai guna marjinal per harga yaitu 5/5.000 diperoleh 1 per 1000. Serta nilai guna marjinal dari tiap rupiah pertambahan pakaian yaitu nilai guna marjinal per harga yakni 50/50.000 diperoleh 1 per 1000 juga.

Dua hipotesis di atas sebenarnya memiliki makna yang serupa. Persyaratan pemaksimalan nilai guna yang disebutkan pada contoh di atas biasanya dapat dinyatakan dalam bentuk rumus aljabar seperti di bawah ini:

$$P_c$$

Pada persamaan di atas MU merupakan nilai guna/utilitas marjinal dari P_a , P_b serta P_c yang merupakan harga dari barang A, B, C. Persamaan tersebut dinyatakan menjadi ekuilibrium konsumen ataupun persyaratan keseimbangan yang mana persyaratan tersebut dapat tercapai disertai anggapan jika konsumen memiliki uang ataupun pendapatan yang mencukupi terhadap perbelanjaan tiap-tiap produk hingga utilitas marjinal tiap produk serupa pada harga dari tiap-tiap produk tersebut.

Kombinasi konsumsi barang untuk kepuasan maksimum. Contoh apabila barang yang dikonsumsi lebih dari satu barang. Misalkan barang X dan barang Y merupakan dua macam jenis barang yang ada, harga barang X yaitu Rp 2,- dan barang Y yaitu Rp 1,-. Penghasilan yang dimiliki oleh B dalam satu hari yaitu Rp 12,-. Dibantu oleh MU barang X serta MU barang Y oleh A maka cari kombinasi dari total barang X serta barang Y yang dibeli agar B mencapai kepuasan maksimumnya.

Barang X (Q_x)	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Marginal Utility (MU_x)</i>	16	14	12	10	8	6	4	2
<i>Marginal Utility (MU_y)</i>	11	10	9	8	7	6	5	4

Jawaban:

Berbagai alternatif barang yang dapat dibeli.

<u>Barang</u> <u>Harga</u>	X Y	<u>Jumlah</u>	Marginal utility	X Y	<u>Jumlah</u>	MU
Rp.2 I	X Y	1 2	16 $11+10=21$	Y	2	21
Rp.2 II	X Y	1 2	16 $9+8=17$	Y	2	17
Rp.2 III	X Y	1 2	16 $7+6=13$	X	1	16
Rp 2 IV	X Y	1 2	14 13	X	1	14
Rp 2 V	X Y	1 2	12 13	Y	2	13
Rp 2 VI	X Y	1 2	12 $5+4=9$	X	1	12

Keterangan

- Harga barang Rp 2,-, barang X dapat diperoleh sebesar 1 unit dengan MU = 16, jika membeli barang Y diperoleh sebesar 2 unit
- MU sebanyak 21 (11+10) dari kedua barang tersebut, maka barang yang dipilih adalah barang Y disebabkan MU barang Y lebih besar dari MU barang X
- Kombinasi barang yang dapat dibeli yaitu 3 unit barang X dan 6 unit barang Y.

3.3 Pendekatan Utilitas Ordinal

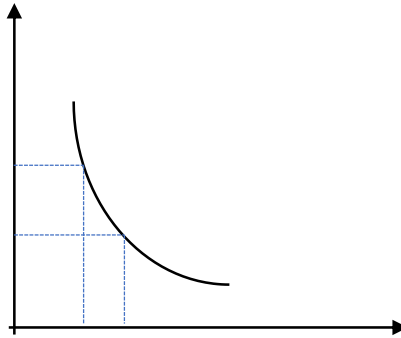
Munculnya pendekatan ordinal disebabkan karena terdapatnya kekurangan yang terdapat pada pendekatan utilitas kardinal. Disebutkan bahwa untuk menunjukkan suatu tingkat kepuasan dalam bentuk angka merupakan sesuatu yang tidak tepat. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kepuasan merupakan suatu hal yang cenderung tidak dapat diukur. Oleh sebab itu maka dikembangkan suatu pendekatan terbaru agar terwujudnya prinsip pemaksimalan tingkat kepuasan pada konsumen yang memiliki penghasilan dengan

batasannya. Ada beberapa asumsi-asumsi yang digunakan dalam pendekatan ordinal tersebut antara lain:

1. Asumsi rasionalitas yaitu konsumen diasumsikan rasional yang berarti dapat memaksimumkan utilitas menggunakan penghasilan terhadap harga pasar serta konsumen dinyatakan berpengetahuan baik mengenai informasi yang ada di pasar.
2. Asumsi kepuasan dengan sifat ordinal di mana berarti walaupun kepuasan tidak bisa terukur dengan angka namun dapat terukur dengan cara ordinal yakni bisa dilakukan perbandingan
3. Hukum *Diminishing marginal Rate of Substitution* berarti apabila konsumen meningkatkan suatu produk yang dikonsumsi dapat mengakibatkan produk lainnya akan menurun untuk dikonsumsi serta bisa tergambar menggunakan kurva indifferen.
4. Fungsi kepuasan mempunyai bentuk: $TU = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$
5. Asumsi konsistensi dan transitivitas
6. Konsistensi: bila $A > B$ maka harus $B < A$
7. Transitivitas: bila $A > B > C$, maka $A > C$
8. Utilitas total yang didapat oleh konsumen tergantung dari jumlah produk yang dikonsumsi

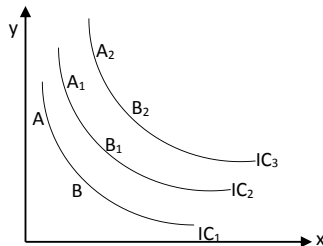
3.4 Kurva Indiferen/*Indifference Curve*

Kurva indifferen merupakan kurva yang menjadi penghubung titik beragam kombinasi dari dua produk yang berkemampuan memberi kepuasan serupa untuk seseorang konsumen.



Gambar 3.3 Kurva Indiferen

Kurva indiferen (*Indifference Curve = IC*) memiliki beberapa sifat diantaranya:



Contoh: IC_3 mempunyai jarak terhadap titik $(0,0)$ yaitu 3 kali IC_1 , bukan berarti tingkat kepuasan yang diberikan IC_3 adalah 3 kali lipat IC_1 , dapat dikatakan bahwa IC_3 memberikan tingkat kepuasan lebih besar daripada IC_1 , pada kurva disamping dapat dilihat:

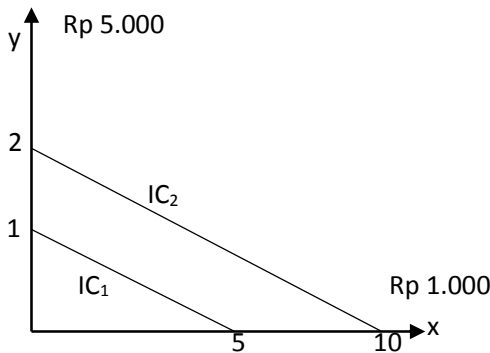
$A = B$

$A_2 > A_1 > A$

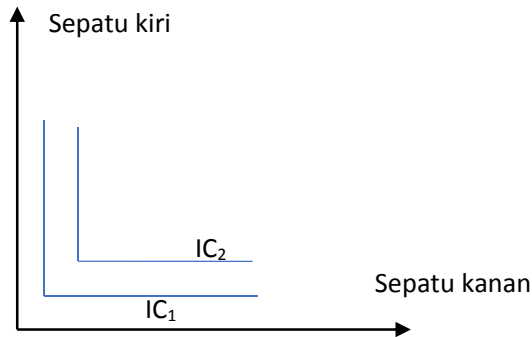
$B_2 > B_1 > B$

IC mempunyai slope negatif; yang artinya bahwa apabila konsumsi terhadap produk X yang dikonsumsi meningkat dengan demikian produk Y yang dikonsumsi akan berkurang, perihal tersebut agar tingkat kepuasan konsumen tetap sama. Makin jauhnya kurva indiferen dari titik origin maka makin tingginya pula tingkat kepuasan yang diperoleh.

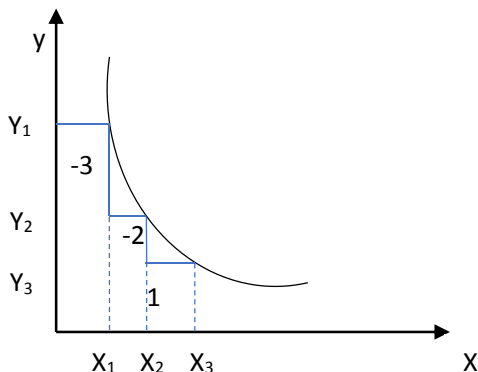
Pada umumnya arah garis kurva indifferen adalah negatif yang artinya bahwa ada substitusi diantara keduanya. Apabila derajat substitusi antar kedua barang tersebut sempurna, maka kurva indifferen adalah garis lurus. Misal antar uang pecahan Rp 5.000,- an dan pecahan Rp 1.000,- an. Dalam hal ini konsumen merasa sama saja antara memiliki uang Rp 5.000,- an sebanyak satu lembar dengan uang Rp 1.000,- an sebanyak 5 lembar.



Akan tetapi jika di antara kedua barang tersebut tidak mempunyai substitusi sama sekali atau komplementer sempurna maka kurva indifferen menjadi siku-siku, contohnya sepatu kiri dan sepatu kanan, dimana hal ini berarti konsumen akan merasa puas bila memakai sepatu ini secara berpasangan. Terdapat kombinasi tetap yang dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang sama dengan penambahan sepatu kiri tetapi sepatu kanan tidak akan mengubah kepuasan yang diperoleh.



1. *Indifference curve* cembung ke titik origin (*convex ke titik origin*). Bahwa setiap penambahan barang X (ΔX) harus dikorbankan sejumlah barang Y (ΔY) dimana setiap penambahan barang X memerlukan pengorbanan barang Y yang semakin kecil jumlahnya atau $\Delta X / \Delta Y$ semakin menurun.



2. Dimana terdapat 2 (dua) buah kurva indifferen yang tidak saling berpotongan, dikarenakan setiap titik pada 1 (satu) kurva indifferen menunjukkan suatu tingkat kepuasan tertentu sedangkan kurva indeferen lainnya, baik terletak di atas atau dibawah kurva tersebut

menunjukkan tingkat preferensi yang berbeda. Seandainya ada 1 (satu) titik potong antara kurva indifferen akan sulit ditentukan mempunyai tingkat kepuasan yang mana sama lebih kecil atau lebih besar. Sehingga tidak dimungkinkan antara kurva indifferen saling berpotongan.

3.5 *Marginal Rate of Substitution*

Apabila konsumen bisa melakukan pertukaran antara kombinasi barang X dan barang Y terhadap satu buah utilitas yang sama. Maka dapat diartikan bahwa konsumen tersebut melakukan pertukaran tingkat kepuasan dari barang X dan barang Y. Penambahan ataupun pengurangan dari konsumsi barang X artinya menjadi bentuk penambahan ataupun pengurangan bagi total kepuasan dari barang X itu sendiri yang mana akan memberikan dampak terhadap berubahnya *Marginal Utility*. Maka dari itu perubahan antara barang X serta Y serupa terhadap perubahan dari *Marginal Utility*. Berikut merupakan rumus untuk menghitung tingkat kemiringan kurva indifferen sebagai berikut:

$$\frac{\partial Y}{\partial X} = \frac{\partial TU}{\partial X} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\frac{\partial TU}{\partial x}}{\frac{\partial TU}{\partial y}} = \frac{MU_x}{MU_y} = MRS$$

Model persamaan di atas disebut *Marginal Rate of Substitution* (MRS), persamaan tersebut menunjukkan tingkat kemiringan kurva indifferen. Dimana MRS selalu bernilai negatif dan dapat mengukur suatu pertukaran (*tradeoff*) di antara dua barang yang kondisi utilitas konsumennya tidak berubah. Pada prinsipnya, kurva indifferen cenderung cembung ke arah titik origin (*convex to origin*). Oleh sebab itu, MRS menunjukkan jumlah suatu

barang Y yang bersedia dikurangi oleh konsumen untuk dapat menambah jumlah barang X.

3.6 Garis Anggaran/*Budget Line*

Kurva indifferen pada umumnya mewakili keinginan konsumen untuk memperoleh suatu barang dan mendapatkan kepuasan dari mengonsumsi barang tersebut. Pada kenyataannya konsumen memiliki pendapatan yang terbatas sehingga tidak mampu untuk mendapatkan semua barang yang ingin dikonsumsi. Hal ini menimbulkan permasalahan yang dihadapi setiap konsumen seperti *"bagaimana konsumen harus membelanjakan pendapatan yang dimiliki sehingga pengeluaran tersebut akan memberi kepuasan sebesar mungkin?"*. Analisis yang dibuat perlu menggambarkan garis anggaran pengeluaran (*budget line*) yang menunjukkan berbagai gabungan produk yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu.

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam membangun konsep preferensi adalah konsep pilihan konsumen. Suatu daerah yang *feasible* ditentukan oleh pendapatan konsumen dan harga barang yang dikonsumsi. Untuk dapat mengetahui barang ataupun jasa yang dikonsumsi, secara teoritis ada beberapa konsep yang dapat dilihat dari beberapa faktor utama sebagai berikut:

P_x = Harga barang X

Q_x = Jumlah barang X

P_y = Harga barang Y

Q_y = Jumlah barang Y

M = Pendapatan konsumen

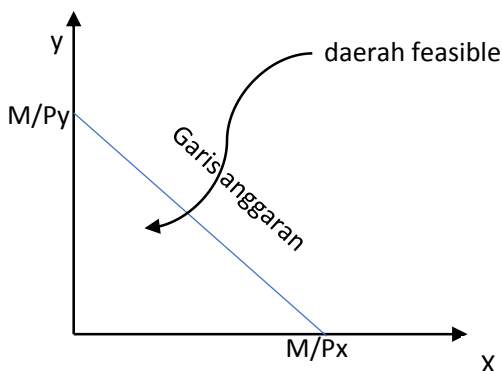
Nilai konsumsi harus lebih kecil atau sama dengan jumlah total pendapatan yang dimiliki konsumen. Pendapatan konsumen terletak pada batasan (*constrain*) dari kesanggupan konsumen dalam satuan mata uang (M).

$$P_x (Q_x) + P_y (Q_y) \leq M$$

Ketika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang dimiliki maka:

$$P_x (Q_x) + P_y Q_y = M$$

Daerah *feasible* bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang adalah sebagai berikut:



Garis anggaran di atas mempunyai kemiringan (*slope*) yang sama dengan rasio harga.

$$Dy/dx = -P_x/P_y$$

Kecuali jika posisi *budget line*/garis anggaran berubah, konsumen tidak akan lagi mencapai titik (kombinasi produk) di sisi kanan garis anggaran, ketika pendapatan konsumen meningkat maka garis anggaran akan bergeser ke kanan, sejajar dengan garis anggaran semula (dengan asumsi bahwa barang X dan Y tidak berubah). Pendapatan konsumen yang menurun juga dapat menggeser garis anggaran ke kiri. Garis anggaran yang bergeser ke kanan, dari I_1 menuju I_2 intersep terhadap sumbu Y adalah I_2/P_y , dan intersep terhadap sumbu X adalah I_2/P_x disebabkan kedua harga ini konstan maka tingkat kemiringan (*slope*) dari garis anggaran tidak akan berubah.

Jika harga dari suatu barang mengalami perubahan dengan demikian garis anggaran dapat melakukan rotasi dan *slope* mengalami perubahan. Semisal harga dari barang X terjadi penurunan sementara harga dari barang Y tetap maka garis anggaran dapat mengalami rotasi berlawanan dari arah jarum jam. Kebalikannya jika harga barang X mengalami kenaikan, sementara harga barang Y tetap maka dapat mengalami rotasi searah arah jarum jam.

Jika harga dari barang X mengalami perubahan sementara harga barang Y tetap, maka garis anggaran dapat mengalami rotasi sepanjang sumbu X. Namun jika harga dari barang Y mengalami perubahan, sementara harga dari barang X tetap, dengan demikian garis anggaran dapat mengalami rotasi sepanjang sumbu Y.

Contoh:

Diketahui masing-masing variabel:

$P_x = \text{Rp } 250 \text{ per unit}$

$P_y = \text{Rp } 125 \text{ per unit}$

$M = \text{Rp } 5.000,-$

Berapa jumlah x dan y dapat dibeli? Dan berapakah kemiringan garis anggarannya?

Titik A = $M/P_x = 5.000/125 = 40 \text{ unit}$

Titik B = $M/P_y = 5.000/250 = 20 \text{ unit}$

Slope garis anggaran = $-125/250 = -0,5$

3.7 Keseimbangan Konsumen

Dalam pendekatan Utilitas Ordinal, untuk mencapai tingkat keseimbangan konsumen yaitu ketika *Indifference Curve (IC)* bersinggungan dengan *Budget Line (BL)* pada suatu titik. Dengan begitu, keseimbangan konsumen merupakan tingkat kepuasan maksimum dari konsumen yang telah mengonsumsi dua barang dengan menggunakan pendapatan tertentu.

Untuk menjelaskan *budget line*/garis anggaran pengeluaran dimisalkan jenis barang yang dikonsumsi merupakan kombinasi dari makanan dan pakaian di mana harga masing-masing barang tersebut sejumlah Rp 5.000,- dan Rp 6.000,- dan konsumen tersebut menggunakan pendapatannya sebanyak Rp 300.000,-. Maka garis anggaran (*budget line*) pengeluaran yang akan digunakan untuk permisalan ini adalah dengan memotong kurva indifferen U_1 di titik A dan titik D; memotong kurva U_2 di titik B dan titik C, dan menyinggung kurva kepuasan U_3 di titik E, serta kurva U_4 tidak disinggung sama sekali.

Kondisi apakah yang dapat mewakili konsumen untuk mencapai kepuasan maksimal? Dapat dilihat bahwa kurva U_4 lebih memiliki tingkat kepuasan dibandingkan dengan kurva yang lainnya, tetapi kurva tersebut tidak memotong garis anggaran pengeluaran. Artinya bahwa kurva U_4 dapat disebut mewakili tingkat kepuasan yang belum bisa diperoleh oleh konsumen.

Jika konsumen ingin mengkonsumsi suatu barang kombinasi pada titik A, B, C, ataupun D maka tingkat kepuasan yang akan diperoleh belum maksimum. Tetapi ketika konsumen melihat disepanjang garis anggaran (*budget line*) pengeluaran, terdapat titik lain pada kurva, dimana titik yang dimaksud merupakan titik E yang terletak pada kurva U_3 . Titik E menunjukkan bahwa kombinasi barang yang dapat memberikan kepuasan maksimum adalah 30 unit makanan dan 25 unit pakaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, D. L., Ariyanto, A. & Andi, D., 2021. *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Mikro*. pertama red. Sumatra Barat: INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- Sukirno, S., 2010. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dr. Catur Sugiyanto, M. 2014. Teori Kepuasan dan Perilaku Konsumen 1', in *Teori Ekonomi Mikro Lanjutan*. Tangerang Selatan.
- Iswardono. 1994. *Teori Ekonomi Mikro.pdf*. Gunadarma.
- Kennedy, P.S.J. 2016. Modul Ekonomi Mikro Teori Perilaku Konsumen Dengan Pendekatan Ordinal. *Universitas Kristen Indonesia Institutional Repository*. Available at: <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/1399>.
- Herispon, H. 2021. *Teori Ekonomi Mikro, researchgate*. Pekanbaru. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/356106331%0D>
- Hidayati, S. 2019. Teori Ekonomi Mikro, Beaya Produksi.

BAB 4

PASAR MONOPOLISTIK

Oleh Fisy Amalia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha Jakarta

4.1 Pendahuluan

Bagi Perusahaan, hal yang paling menarik adalah jika bisa mengendalikan harga, karena berarti bisa memaksimalkan laba dengan cara menentukan harga di atas biaya marjinal. Di mana dijelaskan pada pasar sebelumnya bahwa kekuatan monopoli dapat meningkatkan laba dengan cara memilih harga dan tingkat output tertentu. Tetapi Perusahaan tidak harus menjadi monopoli murni.

Bab ini akan mempelajari mengenai struktur pasar selain monopoli murni tetapi memiliki keutamaan seperti kekuatan monopoli. Salah satu bentuk pasar yang dimaksud adalah pasar monopolistik (*monopolistik competition*). Pasar monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna dalam hal terdapat banyak perusahaan dan masuknya perusahaan baru tidak dibatasi. Yang membedakan antara pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna karena adanya produk yang terdiferensiasi (*differentiated*). Perbedaan dalam hal kualitas, penampilan maupun reputasi atau citra produk, menyebabkan Perusahaan tersebut menjadi pemilik tunggal mereknya sendiri. Kekuatan monopoli dari perusahaan tergantung kepada kesuksesan perusahaan itu mendiferensiasi produknya dibandingkan dengan produk sejenis. Contoh produk yang banyak melakukan diferensiasi produk seperti pasta gigi ataupun sabun cuci piring misalnya sabun cuci piring biasa dan sabun cuci piring yang juga dapat berfungsi mencuci

buah dan sayuran, contoh lainnya adalah kopi saset, yang mendiferensiasi produknya dengan menambah formula gula jenis lain, seperti gula aren ataupun susu.

4.2. Persaingan Monopolistik

Keuntungan monopoli dikatakan jika perusahaan dapat menjual produknya dengan harga melebihi biaya marjinalnya. Konsumen memandang merek perusahaan yang terdiferensiasi sebagai sesuatu merek yang berbeda dengan merek lainnya. Industri pasta gigi adalah salah satu contoh yang melakukan pasar monopoli, seperti contohnya pasta gigi pepsodent dengan pasta gigi formula. Perbedaan tersebut terletak pada baunya, manfaatnya, konsistensinya dan reputasinya atau citra konsumen tentang kemanjuran relatif dari pasta gigi masing-masing. Sehingga berani untuk membayar harga lebih tinggi untuk pasta gigi pepsodent.

Pasta gigi Pepsodent yang diproduksi secara tunggal oleh Unilever, maka perusahaan itu memiliki kekuatan monopoli. Tetapi kekuatan monopolinya terbatas. Konsumen akan mengganti pilihan pasta giginya jika Pepsodent menaikkan harga, meskipun konsumen yang menyukai Pepsodent bersedia membayar dengan harga yang lebih mahal, tetapi lebih banyak konsumen yang hanya bersedia membayar tidak lebih dari harga lama. Dikarenakan bagi kebanyakan konsumen, pasta gigi hanyalah pasta gigi yang memiliki perbedaan kecil di antara merek-merek yang ada di pasaran. Karena itu, pasar pasta gigi Pepsodent ini akan tetap elastis di mana kurva permintaannya menurun. Oleh sebab itu, Unilever akan menaikkan harga Pepsodent tidak jauh dari biaya marjinalnya, dikarenakan keterbatasan kekuatan monopolinya.

4.3 Ciri-ciri Persaingan Monopolistik

Karakteristik suatu pasar monopolistik adalah

1. Memiliki jumlah penjual atau produsen yang banyak. Persaingan di antara perusahaan yang menjual produk terdiferensiasi amat mungkin digantikan oleh produk sejenis dengan merek yang berbeda, tetapi tidak berlaku sebagai pengganti yang sempurna. Elastisitas permintaan harga (*Cross-price elasticity*) besar, tetapi bukan tidak terbatas.
2. Relatif mudah dan bebas bagi perusahaan untuk masuk ke dalam pasar dan dan keluar jika produknya sudah tidak menguntungkan lagi.
3. Perusahaan yang menjual di pasar persaingan monopolistik, tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Dan setiap produsen harus aktif mencari target marketnya sendiri.
4. Persaingan produsen bukan berdasar pada harga.
5. Persaingan monopolistik akan menyebabkan perkembangan teknologi dan inovasi pada suatu produk. Keuntungan yang meningkat dari produsen yang inovatif dan keuntungan yang diakibatkan inovasi tersebut akan menarik produsen yang baru dan akan menggerus laba dari produsen lama. Maka hanya produsen yang inovatif dengan teknologi yang berkembang dan produknya disukai pasar yang akan tetap bertahan.

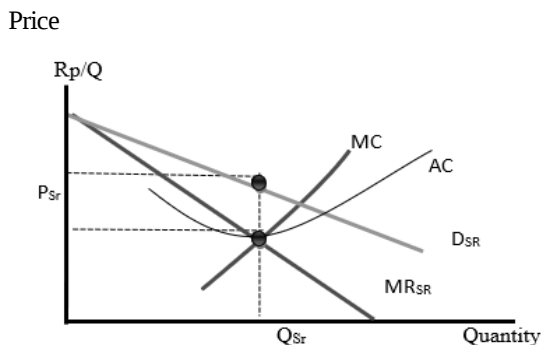
Kita akan lihat mengapa kebebasan untuk masuk ini merupakan persyaratan penting, kita bandingkan pasar untuk pasta gigi dengan pasar sepeda motor. Pasar pasta gigi akan bersaing secara monopolistik dikarenakan banyaknya merek yang ada di pasar. Sementara pasar sepeda motor lebih tepat dicirikan sebagai oligopoli.

Dengan usaha yang relatif mudah, perusahaan dengan merek pasta gigi yang baru dapat diperkenalkan kepada konsumen, sehingga akan membatasi profitabilitas dalam memproduksi pasta gigi Pepsodent maupun merek Formula yang sudah lebih dulu ada di pasar. Jika laba merek lama tersebut besar, perusahaan lainnya akan mengeluarkan uang (untuk pengembangan, produksi, iklan maupun promosi) untuk memperkenalkan merek baru tersebut yang dengan sendirinya akan mengurangi pangsa pasar dan profitabilitas pasta gigi Pepsodent dan Formula.

4.4 Ekuilibrium jangka Pendek dan Jangka Panjang

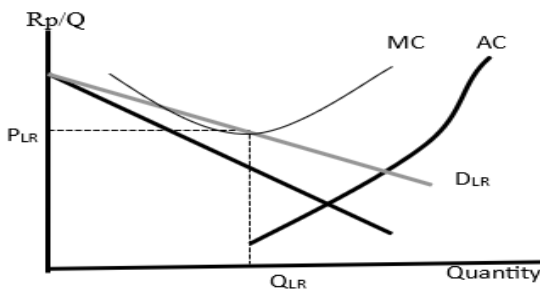
Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang perusahaan hanya menikmati laba normal. Kurva permintaan monopoli berslope menurun, begitu juga dengan perusahaan yang ada di persaingan monopolistik. Oleh karena itu mereka memiliki kekuatan monopoli. Tetapi tidak berarti perusahaan persaingan monopolistik menghasilkan laba yang besar, karena persaingan monopolistik sama dengan persaingan sempurna, mudah untuk masuk, tetapi jika potensi menghasilkan laba besar, maka akan menarik perusahaan yang mampu bersaing untuk masuk ke pasar, sehingga mendorong laba ekonomi turun menjadi besar.

Dengan menggunakan gambar, kita dapat mempelajari harga dan level output equilibrium bagi perusahaan yang berada dalam persaingan monopolistik dalam jangka pendek dan jangka panjang.



Gambar 4.1 Kurva Pasar Monopolistik keseimbangan jangka pendek

Gambar 4.1 menunjukkan ekuilibrium jangka pendek (short-run equilibrium) untuk perusahaan yang melakukan diferensiasi produk, bukan kurva permintaan pasar. Kurva D menurun, karena produk berbeda dari pesaing-pesaingnya. Karena produk perusahaan berbeda dari produk-produk pesaingnya, Jumlah Q_{sr} yang memaksimalkan laba (profit - maximizing quantity) ditemukan pada titik potong antara kurva penerimaan marjinal (marginal revenue- MR_{sr}) dan biaya marjinal (marginal cost- MC). Karena harga P yang bersangkutan melebihi biaya rata-ratanya, Perusahaan memperoleh laba, sebagaimana ditunjukkan oleh segi empat yang diarsir dalam gambar tersebut.



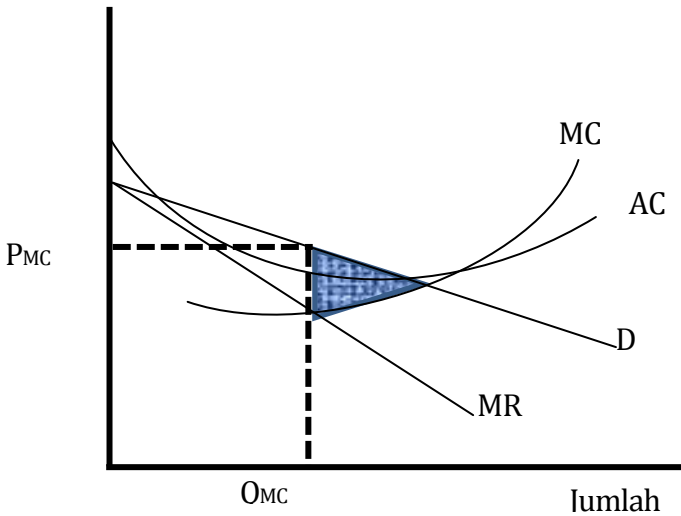
Gambar 4.2 Kurva Pasar Monopolistik keseimbangan jangka Panjang

Dalam jangka panjang, banyak perusahaan pesaing akan tertarik untuk memasuki pasar jika mendapatkan informasi mengenai pendapatan laba yang besar. Sehingga akan menggerus laba dari perusahaan kita dan akan kehilangan pangsa pasar dan penjualan. Kurva permintaannya akan bergeser ke bawah sebagaimana dalam Gambar 3.2 (dalam jangka panjang, kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marjinalnya mungkin juga akan bergeser). Dengan asumsi biaya-biaya tidak berubah. Kurva permintaan jangka panjangnya DLR hanya akan bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata perusahaan tersebut. Di sini, pemaksimalan laba menyiratkan jumlah QLR dan PLR. Hal ini juga menyiratkan laba nol karena harganya sama dengan biaya rata-ratanya. Kurva jangka panjang menurun, walaupun merek tertentu masih unik, dan Perusahaan masih memiliki kekuatan monopoli, tetapi laba menjadi nol dikarenakan masuknya perusahaan baru.

Beberapa perusahaan yang memiliki merek yang unik, juga menetapkan harga dan biaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan masih memiliki laba yang kecil.

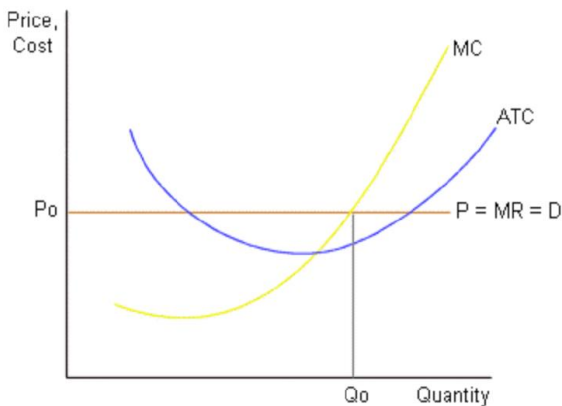
4.5 Persaingan Monopolistik dan Efisiensi Ekonomi

Pasar persaingan sempurna disukai, karena efisien secara ekonomis. Jika tidak ada intervensi dari eksternal dan tidak ada yang menghambat pasar, total surplus konsumen dan produsen akan terjadi sebesar mungkin. Dalam beberapa hal, persaingan monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna tetapi apakah persaingan monopolistik struktur pasarnya juga efisien?mari kita bandingkan ekuilibrium jangka panjang dari industri yang bersaing yang berada di antara dua pasar tersebut.



Gambar 4.3 Equilibrium Pasar Monopolistik

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa ada dua sumber ketidak efisienan dalam industri yang bersaing secara monopolistik. Di bandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang (*dead weight loss*). Namun tetap kurang efisien dibanding pasar persaingan sempurna



Gambar 4.4 Equilibrium Pasar Persaingan Sempurna

Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna:

1. Harga jual masih lebih besar dari biaya marginal ($P > MC$)
2. Kapasitas berlebihan (*excess capacity*)

Perusahaan tidak memproduksi pada tingkat yang paling efisien sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Perusahaan harus menambah output agar dapat memproduksi pada tingkat AC yang paling rendah.

1. Dalam persaingan monopolistik, harga equilibrium di atas biaya marginal, hal tersebut berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Berarti nilai konsumen dari unit tambahan output melebihi biaya untuk memproduksi unit-unit tersebut. Total surplus dapat ditingkatkan dengan jumlah seperti bagian arsiran dalam Gambar 4.3 dapat terjadi bila output diperluas ke titik di mana kurva permintaannya berpotongan dengan kurva biaya marginal. Kekuatan monopoli yang terdapat dalam pasar persaingan monopolistik menciptakan suatu kerugian bobot mati (*deadweight loss*).
2. Pada Gambar 4.4 dapat diperhatikan bahwa perusahaan yang bersaing secara monopolistik beroperasi dengan kapasitas berlebihan: di mana outputnya berada di bawah jumlah yang meminimalkan biaya rata-rata. Perusahaan baru yang masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik maupun pasar persaingan sempurna akan mendorong laba menjadi nol. Dalam pasar yang bersaing sempurna, masing-masing perusahaan menghadapi suatu kurva permintaan horisontal, sehingga titik laba nol terjadi pada biaya rata-rata minimum, sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.4. Namun, dalam pasar yang bersaing secara monopolistik, kurva permintaannya menurun, sehingga titik laba nolnya

berada di sebelah kiri biaya rata-rata minimum (arsir biru). Kelebihan kapasitas ini tidak akan efisien dengan makin sedikitnya perusahaan, karena biaya rata-rata akan menjadi lebih rendah.

Konsumen akan dirugikan akibat ketidak efisienan ini dan apakah struktur pasar monopolistik tidak disukai secara sosial? Berikut adalah jawaban mengapa pasar monopolistik tetap disukai:

1. Kekuatan pasar dalam pasar monopolistik adalah kecil. Karena banyak perusahaan saling bersaing. Merek-merek yang ada di dalam pasar tersebut akan saling menggantikan sehingga tidak satupun perusahaan memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Oleh karena itu setiap kerugian dalam bobot mati akibat kekuatan pasar akan menjadi kecil, kurva permintaan akan cukup elastis dan kelebihan kapasitas akan menjadi kecil juga.
2. Manfaat yang diberikan oleh pasar monopolistik dapat menyeimbangkan setiap ketidak efisienan yang terjadi pada pasar tersebut. Yaitu dalam hal keanekaragaman produk (product diversity), kebanyakan konsumen menyukai berbagai alternatif pilihan produk yang berbeda dalam berbagai hal yang ada di pasar. Besarnya manfaat dan keragaman produk itu akan dapat mudah mengalahkan biaya ketidakefisienan yang terjadi akibat kurva permintaan yang menurun tersebut.

Faktor Monopoli

Ada beberapa faktor terjadinya Pasar Monopoli, yaitu:

1. kepemilikan sumberdaya dapat memonopoli pasar karena keunikannya tidak dimiliki oleh pesaing.
2. Skala Ekonomis terjadi bila tingkat produksi cukup besar hingga menyebabkan biaya produksi paling

- minimum. Jumlah produksi hampir sama dengan permintaan total yang ada di pasar
3. Pasar Monopoli terjadi bila tingkat produksi tinggi sehingga harga bisa menjadi rendah, sehingga menyebabkan pesaing tidak dapat masuk ke pasar.
 4. Pendapatan hak Monopoli dari Pemerintah seperti hak cipta dan hak paten.
 5. Hak Cipta dan Paten adalah jaminan hukum untuk menghindari penjiplakan. Perusahaan yang memproduksi dan berusaha dari hasil pengembangan teknologi yang dapat menciptakan produk baru, dan adanya sanksi hukum untuk plagiat atau penjiplakan

DAFTAR PUSTAKA

- Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D. L. 2005. *Microeconomic, sixth edition*. 6th edn. Upper Saddle river, New Jersey: Prentice Hall.
- Sukirno, S. 2015. Mikroekonomi, teori pengantar in *Mikroekonomi, teori pengantar*. 3rd edn. Jakarta: RajaGrafindo Persada, pp. 296–306. (Bibliography)

BAB 5

PENDAPATAN NASIONAL

Oleh Tri Widayati

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

5.1 Pendahuluan

Ekonomi makro terutama sangat berkaitan dengan kepentingan terhadap seluruh output ekonomi, tingkat harga, kesempatan kerja, suku bunga dan berbagai variable yang lain. Langkah yang diperlukan dalam memahami bagaimana variable itu ditentukan disebut perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan Pendapatan Nasional akan memberikan kepada kita perkiraan *Gross National Product* secara teratur, yaitu pengukuran dasar dari kinerja perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.

Pendapatan Nasional adalah pemasukan yang diperoleh masyarakat yang disebabkan oleh penjualan faktor produksi yang mereka miliki dalam proses produksi. Pendapatan Nasional suatu Negara berasal dari seluruh sektor produksi bidang ekonomi suatu Negara dalam kurun waktu satu tahun

Beberapa Istilah Pendapatan Nasional(Prawoto, 2019)

1. Produk Nasional Brutto (GNP)

Produk Nasional Brutto atau GNP adalah jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor – faktor produksi dalam negeri dalam suatu periode waktu tertentu. Yang dihitung mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warganegara yang bersangkutan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

GNP = GDP – Pendapatan Netto terhadap Luar Negeri

2. Produk Domestik Bruto.

Total dari seluruh produk, baik barang ataupun jasa yang telah diproduksi dalam wilayah suatu Negara dalam waktu satu tahun, baik diproduksi oleh penduduk Indonesia maupun Warga Negara Asing yang ataupun perusahaan asing yang melakukan produksi di wilayah Indonesia. Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto ini, tidak mencakup barang ataupun jasa yang diproduksi penduduk Indonesia di luar negeri.

Dalam perhitungan Produk Domeestik Bruto dibedakan menjadi dua, yaitu PDB menurut harga berlaku dan PDB menurut harga konstan. PDB atas dasar berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat PDB dilakukan, sedangkan PDB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga tahun tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Produk Domestik Regional Brutto

Jumlah dari total produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah pada kurun waktu satu tahun disebut Produk Domestik Regional Bruto. Contoh Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 PDRB Jawa Tengah Atas dasar harga menurut lapangan usaha (juta rupiah), 2020-2021

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	192.610.188,66	196.876.472,80
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	33.082.144,60	36.660.134,33
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	464.609.134,06	487.445.099,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1.309.172,93	1.377.812,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	855.449,71	915.059,04
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	142.205.668,28	158.056.335,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	181.860.778,05	195.399.044,07
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	30.262.623,73	32.092.974,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	40.359.706,44	43.513.465,56
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	57.428.844,02	60.910.558,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	40.267.890,92	42.959.767,03
L	Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	23.010.530,15	23.741.782,59
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5.417.728,47	5.650.008,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	36.457.408,33	35.853.139,81
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	63.862.379,41	64.584.456,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	13.658.156,92	13.800.243,91
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	20.664.884,35	20.963.554,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS		1.347.922.689,03	1.420.799.908,38

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4. *Net National Product (Produk Nasional Neto)*

Total dari produksi kotor suatu Negara atau GNP dikurangi nilai penyusutan modal yang terjadi disebut Net National Product. . Makna dari Net National Product adalah Pendapatan Nasional.

NNP = GNP – Penyusutan Barang-barang

5. Net National Income/Pendapatan Nasional Netto (NNI)

Pendapatan Nasional Bersih ialah Total nilai dari produksi bersih yang dihasilkan oleh suatu Negara kemudian dikurangi dengan nilai pajak tidak langsung.

$NNI = NNP - \text{Pajak Tidak Langsung}$

Contoh Pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, pajak peredaran, pajak import, dan sebagainya. Pada pokoknya termasuk pajak tidak langsung adalah semua beban pajak yang dapat di geserkan pembayarannya kepada pihak lain.

6. Personal (Individual) Income

Pendapatan Perseorangan merupakan sejumlah nilai yang berhak diterima seseorang akibat dari keterlibatannya didalam proses produksi atau menjual faktor produksi yang dimiliki kepada produsen sebagai pelaku bisnis ((Sukirno, 2017). Tetapi *personal income* ini tidak sama dengan *net national income*.

Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :Tidak semua pendapatan yang merupakan balas jasa atas faktor produksi masyarakat itu diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang bersangkutan, misalnya bagi para pemegang saham suatu perseroan. Para pemegang saham itu, sebenarnya mempunyai hak atas laba atau pendapatan yang diperoleh oleh perseroan tersebut. Dengan adanya kewajiban membayar pajak perseroan, maka pajak perseroan ini harus dibayar terlebih dahulu, kepada negara, sebelum pendapatan itu dibagikan kepada para pemegang saham. Pajak perseroan ini dibayarkan kepada pemerintah adalah untuk dan atas nama para pemegang saham, meskipun para pemegang saham itu sendiri kemudian masih juga dikenakan pajak atas deviden mereka, yaitu pajak deviden.

7. *Disposable Income*

Disposable income ini adalah jenis pendapatan yang siap untuk segera dibelanjakan atau dikonsumsi. Besarnya *disposable income* ini = *personal income* minus pajak langsung (pajak perseorangan) seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan dan sebagainya.

$$\text{Disposable Income} = \text{PI} - \text{Pajak Langsung}$$

5.2 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Umumnya dikenal adanya tiga cara untuk menghitung pendapatan, yaitu metode produksi (*production approach*), metode pendapatan (*income approach*) dan metode pengeluaran (*expenditure approach*).

1. Metode Produksi

Perhitungan Pendapatan Nasional dengan Metode Produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah (*value added*) yang diwujudkan dengan berbagai jenis sektor yang ada dalam perekonomian. Sektor-sektor tersebut adalah :

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan penggalan
- c. Industri Pengolahan
- d. Pengadaan Listrik dan Gas
- e. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan dan asuransi
- l. *Real Estate*

- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan
- o. Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa Lainnya

2. Metode Pendapatan

Metode pendapatan ini adalah suatu metode perhitungan pendapatan nasional dengan cara menghitung jumlah pendapatan dari seluruh warga masyarakat, yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi.

Diatas sudah diterangkan bahwa untuk dapat berlangsungnya proses produksi dalam masyarakat itu diperlukan berbagai faktor produksi, seperti tanah, modal, tenaga dan pengusaha (*entrepreneur*). Faktor-faktor produksi itu yang telah dipergunakan dalam proses produksi, diberikan balas jasa, yang masing-masingnya bernama : sewa , bunga, upah dan gaji dan keuntungan. kesemuanya balas jasa-balas jasa ini jadinya kembali ke masyarakat sebagai pendapatan. Perhitungan balas jasa atas faktor-faktor produksi inilah yang dimaksud sebagai metode pendapatan dalam perhitungan pendapatan nasional.

Di negara maju, dalam mana administrasi perpajakannya sudah sedemikian maju dan tertibnya, kesadaran tentang pentingnya arti perpajakan pun sudah demikian tingginya, maka jumlah dari pendapatannya ini dapat diketahui melalui pajak pendapatan (*income tax*) bagi pendapatan perseorangan. Untuk perusahaan, angka pendapatan itu diperoleh dari laporan pendapatan (*income statement*) dan pajak perusahaan: sedangkan untuk pemerintah, dapat diketahui dari realisasi anggaran belanja dan pendapatan negara itu sendiri.

3. Metode Pengeluaran

Menurut metode pengeluaran ini, maka pendapatan nasional suatu masyarakat itu, dapat juga diperhitungkan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut. Adapun pengeluaran masyarakat dapat dibedakan menjadi:

- a. pengeluaran konsumsi (perseorangan dan perusahaan) ;
- b. pengeluaran konsumsi negara, (pusat maupun daerah);
- c. Investasi domestik bruto, seperti persediaan barang-barang alat-alat produksi tahan lama.
- d. Minus investasi asing bila ada
- e. *Export minus import.*

5.3 Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Apakah sebenarnya manfaat atau kegunaan menghitung dan kemudian mempelajari Pendapatan Nasional? Orang menganggap bahwa manfaat atau kegunaan Pendapatan Nasional adalah untuk : (Partadiredja, 1983).

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian

Dari Perhitungan Pendapatan Nasional kita dapat mengetahui apakah suatu negara itu negara industri, pertanian atau jasa, berapakah besarnya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Dari Perhitungan Pendapatan Nasional kita ketahui bahwa Indonesia adalah suatu negara pertanian atau sering juga disebut negara agraris, sedangkan Amerika Serikat, Eropa Barat, Uni Soviet dan Jepang adalah negara industri.

2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu

Oleh karena Pendapatan Nasional dicatat setiap tahun, maka kita akan mempunyai catatan angka dari tahun ketahun.

Dengan demikian kita dapat membandingkan Pendapatan Nasional ini dari tahun ketahun. Perbandingan tersebut diharapkan dapat memberi keterangan apakah ada kenaikan atau penurunan, apakah ada perubahan struktur atau tidak, apakah ada pertambahan atau pengurangan kemakmuran materiil, dan dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah ada kenaikan atau penurunan pendapatan per kapita. Dalam mencatat Pendapatan Nasional dari tahun ketahun terdapat unsur baru yang masuk, yaitu harga. Kita tidak dapat menjumlahkan sekian ribu ekor sapi dengan sekian juta radio dengan sekian kilometer perjalanannya. Semuanya harus dijabarkan ke dalam unit perhitungan atau penyebut yang sama yaitu harga barang-barang dan jasa-jasa. Kita ketahui bahwa harga barang-barang dan jasa-jasa tidak selalu tetap. Oleh karena itu produksi barang-barang dan jasa-jasa dapat dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku (*current prices*).

3. *Membandingkan perekonomian antar daerah*

Perhitungan Pendapatan Nasional dapat juga digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu daerah dengan daerah lain, apakah itu antar propinsi atautkah antar negara. Kita dapat membandingkan pendapatan per kapita antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, antara negara-negara Asia Tenggara, antara Jawa tengah dengan Sumatera Utara dan lain-lain. Perbandingan ini sering berguna untuk menilai kit sendiri, sampai seberapa jauh kita tertinggal atau terdahulu dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju atau terbelakang daripada kita.

4. *Merumuskan kebijaksanaan pemerintah*

Perhitungan Pendapatan Nasional berguna pula untuk membantu dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah. Seandainya kita menginginkan pertumbuhan GNP setinggi 8%,

maka Perhitungan Pendapatan inilah yang kita lihat. Dengan mengetahui proporsi masing-masing sektor, kenaikan 8% itu dialokasikan kepada Pertanian misalnya 5%, kepada Perindustrian 15%, Pertambangan 12% dan seterusnya

Khusus untuk negara kita ada beberapa kesulitan tambahan dalam memanfaatkan hasil Perhitungan dan Pendapatan Nasional.

Pertama, berhubungan dengan anggapan kesatuan dan keseragaman perekonomian yang dipakai dalam Analisa Pendapatan Nasional. Perekonomian Indonesia belum merupakan satu kesatuan; baik dalam arti kesatuan pasar, yang di dalamnya harga barang-barang, jasa-jasa, dan faktor-faktor produksi itu seragam karena dapat bergerak bebas ke segala penjuru; maupun dalam arti kemanjuran kebijaksanaan ekonomi pemerintah pusat di seluruh penjuru tanah air. Ekonomi Indonesia masih terdiri dari banyak wilayah, yang antara wilayah-wilayah itu hanya sedikit sekali hasil produksi yang diperniagakan dan hanya sedikit pula perpindahan tenaga kerja dan modal, dan karena itu pula terdapat variasi harga barang-barang dan faktor-faktor produksi antara wilayah yang satu dengan yang lain. Makin jauh dari ibu kota makin sedikit pengaruh kebijaksanaan pemerintah pusat atas orang-orangnya, apalagi rakyat kecilnya.

Kedua, adanya peranan pertanian yang amat besar. Penawaran hasil pertanian kurang elastis dibandingkan dengan penawaran hasil industri. Petani-petani sukar untuk menyesuaikan hasil produksinya ke atas dan ke bawah terhadap naik turunnya permintaan. Apa yang dapat dikerjakannya adalah menerima kenaikan dan penurunan harga. Penurunan permintaan efektif lebih berakibat pada penurunan pendapatan daripada penurunan pengerjaan (*employment*). Tidak seperti di negara-negara yang sudah maju,

pengangguran di Indonesia disebabkan karena kekurangan modal dan usaha yang dapat menyerap tenaga.

Ketiga, sebagian besar produksi, terutama produksi pertanian tidak ditujukan untuk pasar, melainkan dikonsumsi sendiri, sehingga karenanya tidak menyangkut uang. Volume dan keanekaragaman barang-barang industri dan jasa, yang di negara-negara maju merupakan proporsi yang sangat besar, di Indonesia hanya merupakan proporsi yang kecil dibandingkan dengan Produksi Nasional. Dengan begitu, aspek moneter dari Ilmu Ekonomi Makro hanya mengenai sebagian kecil hasil Produksi Nasional saja.

Keempat, pendapatan per kapita yang rendah mengakibatkan tabungan yang rendah, yang karenanya penumpukan modal menjadi rendah pula. Karena modal relatif lebih sedikit daripada tenaga, maka modal relatif lebih mahal daripada tenaga. Tambahan pula adanya kekurangan keterampilan yang berbagai jenis, keterampilan teknis, administratif, kepengurusan, dan petindak mengakibatkan kurang berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan bersangkutan erat dengan perekonomian keseluruhan seperti bank-bank, asuransi, sistem pajak, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Partadiredja, A. 1983. *Perhitungan Pendapatan Nasional*. Jakarta: LP3ES.
- Prawoto, N. 2019. *Pengantar Ekonomi Makro*. Kesatu. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, S. 2017. *Makro Ekonomi*. ketiga. Depok: Rajawali Pers.

BAB 6

TEORI KONSUMSI

Oleh Hesty Aisyah

STMIK Indonesia Padang

6.1 Teori Konsumsi

Analisis dalam ilmu ekonomi juga perlu membahas tentang teori konsumsi baik secara jangka panjang dan jangka pendek. Teori konsumsi sendiri erat kaitannya dengan akumulasi dari pemasukan dan pengeluaran belanja rumah tangga yang disebut dengan konsumsi agregat (Harso, 2013). Adapun alasan konsumsi merupakan salah satu komponen penting dalam ilmu ekonomi, diantaranya adalah:

- a) Dalam keseluruhan pengeluaran agregat, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan bagian terbesar. Hal ini lah yang menjadikan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pengaruh yang besar dalam stabilitas perekonomian di Indonesia.
- b) Konsumsi rumah tangga memiliki kaitan erat dengan variabel-variabel perekonomian lain yang saling mempengaruhi satu sama lain, sifat ini disebut sebagai Endogenous. Melalui sifatnya ini, para ahli ekonomi dapat menyusun teori dan model ekonomi yang menghasilkan pemahaman tentang kaitan tingkat konsumsi dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya.
- c) Berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat yang meningkat setiap zaman juga mempengaruhi perilaku konsumsi. Hal inilah juga mendasari alasan studi tentang teori konsumsi tetap dibahas sampai kapanpun.

Seperti yang disampaikan di narasi sebelumnya, faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, dimana hubungan antar keduanya harus bernilai positif (+), yaitu semakin tinggi nilai pendapatan (Y), maka nilai konsumsi (C) juga akan semakin tinggi (Rahardjo, 2011). Berikut adalah notasi persamaan matematisnya:

$$C = f(Y) \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

C = Konsumsi

Y = Pendapatan

f = Konstanta/ Koefisien

Dalam ilmu ekonomi makro, ada beberapa para ahli yang memberikan teori mengenai konsumsi ini, diantaranya adalah:

1. Teori Keynes (*Keynes Consumption Model*)

Dalam teori keynes yang ditemukan oleh John Maynard Keynes, ditemukan bahwasanya konsumsi itu memiliki hubungan dengan beberapa variabel (Partadireja, 1996), seperti berikut:

a) Hubungan Pendapatan Disposabel dan Konsumsi

Keynes berpendapat bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang sudah siap dibelanjakan rumah tangga, atau yang biasa disebut dengan Pendapatan Disposabel. Tapi, besarnya konsumsi tetap dibatasi dengan besarnya jumlah pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan bernilai kosong (nol). Kemudian, jika pendapatan disposibel meningkat maka akan mempengaruhi peningkatan jumlah konsumsi, dengan catatan peningkatan konsumsi tidak bisa setara dengan peningkatan konsumsi disposibel. Kondisi inilah yang disebut dengan Konsumsi Otonomus (*Autonomous Consumption*).

$$C = C_o + b Y_d \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

C : Konsumsi

C_o : Konsumsi Otonomus

B : Marginal propoensity to consume

Y_d : Pendapatan disposibel

Berikut ini adalah hubungan antara pendapatan disposabel dan konsumsi yang disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 6.1 Hubungan Antara Pendapatan Disposibel dan Konsumsi

Pendapatan Disposibel	Konsumsi	Δ Pendapatan Disposibel	Δ Konsumsi
0	200	-	-
1000	1000	1000	800
2000	1800	1000	800
3000	2600	1000	800
4000	3400	1000	800
5000	4200	1000	800

Pada saat tingkat pendapatan disposibel sama dengan nol, maka tingkat konsumsi adalah sebesar 200, artinya nilai konsumsi minimal (*autonomous consumption*) adalah 200. Ketika pendapatan disposibel meningkat menjadi 1000, 2000, dan seterusnya. Begitu juga konsumsi juga bernilai 1000, 1800, dan seterusnya. Adapun kenaikan konsumsi tersebut disesumsibabkan setiap 1000 unit kenaikan pendapatan disposibel, sebanyak 800 digunakan untuk tambahan konsumsi. Dalam tabel bisa kita lihat bahwa besarnya tambahan konsumsi tidak sama dengan tambahan

pendapatan disposibel. Tingkat pendapatan 1000 merupakan tingkat pendapatan minimal agar satu rumah tangga mampu mengeluarkan biaya-biaya konsumsinya.

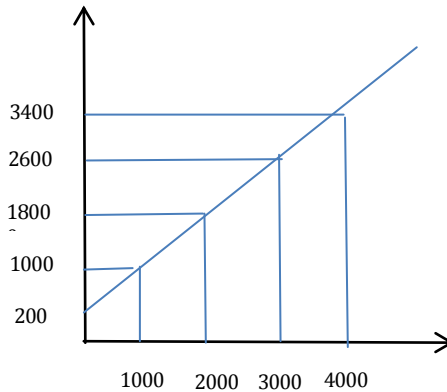
b) Hubungan Pendapatan Disposabel dengan Pertambahan Jumlah Konsumsi

Terdapat sebuah konsep yang merupakan gambaran tentang besaran pertambahan konsumsi yang berpengaruh terhadap pertambahan pendapatan disposibel (Parsaulian, Aimon and Anis, 2013). Berikut adalah perhitungan matematisnya:

$$MPC = \frac{\partial C}{\partial Y_d} \dots\dots\dots (3)$$

Seperti pada uraian Tabel 6.1, dimana jumlah nilai konsumsi yang bertambah tidak akan lebih besar dibandingkan nilai pendapatan disposibel yang bertambah. Jika pendapatan disposibel terus bertambah, maka nilai MPC tidak mungkin menjadi negatif karena penurunan tingkat konsumsi sampai ke titik Nol (0), yang artinya tidak ada konsumsi sekali, sehingga bisa dituliskan menjadi $0 < MPC < 1$. Dalam perhitungan 3, MPC adalah koefisien parameter yang memperlihatkan kemiringan kurva konsumsi.

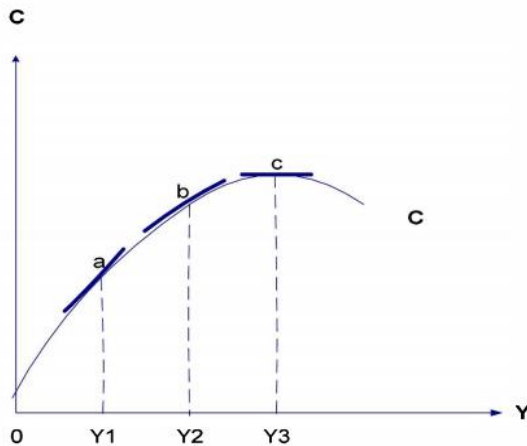
Berikut adalah sebuah diagram konsumsi:



Gambar 6.1 Kurva Konsumsi

Gambar diatas merupakan kurva konsumsi yang dibuat berdasarkan pada Tabel 5.1 yang menunjukkan bahwa grafik konsumsi bebrbentuk garis lurus. Garis yang membentuk sudut kemiringan lebih kecil dari sudut sebesar 45 derajat memperlihatkan bahwa MPC tidak mungkin lebih besar dari satu. Hal itu dibuktikan bahwa ketika terjadi kenaikan pendapatan disposibel sebesar 100 unit, nilai konsumsi hanya meningkat sebesar 80 unit, sehingga angka MPC bernilai 0,8.

Jika pendapatan disposibel meningkat, maka nilai APC akan semakin kecil dan terjadi penurunan konsumsi. Pada Gambar 6.2 disajikan pada kondisi konsumsi tersebut dengan menampilkan kurva konsumsi yang semakin mendatar pada saat ada peningkatan konsumsi.



Gambar 6.2 Kurva Konsumsi dengan MPC Turun

c) Hubungan Rasio Pendapatan Disposabel dengan Total Konsumsi

Rasio pendapatan disposibel dengan total konsumsi disebut juga dengan kecendrungan konsumsi rata-rata (Average Propensity to Consume). Dimana persamaannya adalah sebagai berikut:

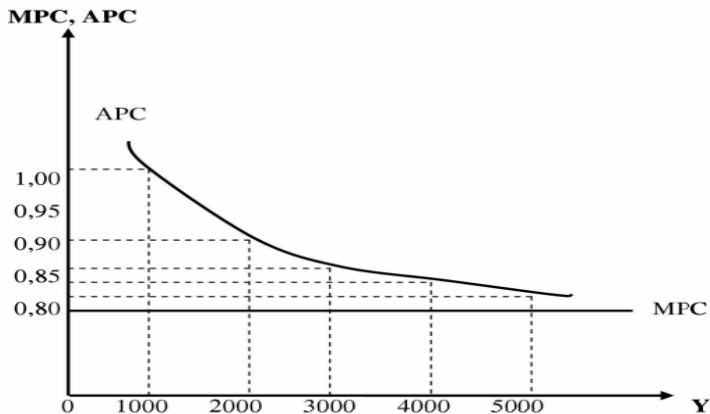
$$APC = C / Y_d \dots\dots\dots (4)$$

Konsep APC ini bisa kita contohkan seperti contoh MPC diatas pada Tabel 6.1, darisana nanti akan tampak bahwa nilai APC lama kelamaan akan semakin menurun dan lebih rendah dari nilai MPC seperti yang terlihat pada Gambar 6.3.

Tabel 6.2 Hubungan Pendapatan Disposibel, konsumsi, MPC, dan APC

Pendapatan disposabel	Konsumsi	Δ Pendapatan Disposabel	Δ Konsumsi	MPC	APC
0	200	-	-	-	-
1.000	1.000	1.000	800	0,80	1,00
2.000	1.800	1.000	800	0,80	0,90
3.000	2.600	1.000	800	0,80	0,87
4.000	3.400	1.000	800	0,80	0,85
5.000	4.200	1.000	800	0,80	0,84

Keterangan: $MPC = \Delta \text{ Konsumsi} / \Delta \text{ Pendapatan Disposibel}$
 $APC = \text{Konsumsi} / \text{Pendapatan Disposibel}$



Gambar 6.3 Kurva MPC dan APC

d) Hubungan Konsumsi dan Tabungan

Dalam ilmu ekonomi, rumah tangga menggunakan pendapatan disposibel sebagian besar untuk konsumsi, sebagiannya digunakan lagi untuk tabungan (Nainggolan

et al., 2021). Dengan demikian, hubungan antara ketiganya bisa dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y_d = C + S \dots\dots\dots (5)$$

Dimana:

S = tabungan (*saving*)

C= konsumsi (*consumption*)

Penambahan konsumsi dan tabungan bisa bersumber dari setiap tambahan penghasilan disposibel. Besarnya setiap tambahan dari tabungan yang berasal dari tambahan pendapatan disposibel disebut kecendrungan menabung marjinal (*Marginal Propensity to Save*) atau disingkat dengan MPS. Sedangkan rasio atau perbandingan antara pendapatan disposibel dengan tingkat tabungan disebut dengan kecendrungan menabung rata-rata (*Average Propensity to Save/ APS*) (Azizah and Rasti, no date).

Jika setiap tambahan konsumsi dan tabungan berasal dari alokasi setiap tambahan pendapatan disposibel, maka:

$$\partial Y_d = \partial C + \partial S \dots\dots\dots (6)$$

Jika kedua sisi persamaan kita bagi dengan ∂Y_d , maka:

$$\frac{\partial Y_d}{\partial Y_d} = \frac{\partial C}{\partial Y_d} + \frac{\partial S}{\partial Y_d}.$$

$$1 = MPC + MPS \dots\dots$$

$$\text{Atau } MPS = 1 - MPC$$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai total MPC ditambah MPS sama dengan satu. Pada saat pendapatan disposibel masih rendah, konsumsi

selalu bersumber dari alokasi setiap unit tambahan pendapatan disposibel (Nurfadhilah and Sari, 2021).

Hubungan antara MPC dengan MPS maupun APC dengan APS secara numerik dapat dilihat jika Tabel 10.2 lebih dilengkapi lagu dengan memasukkan konsep MPS dan APS, seperti tampak dalam Tabel 6.3.

Tabel 5.3 Hubungan Antara MPC dan MPS, APC dan APS

Yd	C	S	ΔYd	ΔC	ΔS	MPC	MPS	APC	APS
0	200	-200	-	-	-		-	-	-
1.000	1.000	0	1.000	800	-	0,8	-	1,00	0
2.000	1.800	200	1.000	800	200	0,8	0,2	0,90	0,10
3.000	2.600	400	1.000	800	200	0,8	0,2	0,87	0,13
4.000	3.400	600	1.000	800	200	0,8	0,2	0,85	0,15
5.000	4.200	800	1.000	800	200	0,8	0,2	0,84	0,16

Catatan :

MPS = $\Delta \text{Tabungan} / \Delta \text{Pendapatan Disposabel}$

APS = $\text{Tabungan} / \text{Pendapatan Disposabel}$

Dari Tabel 6.3 bisa kita lihat bahwa dalam kondisi Yd berada pada 1000, nilai MPC berjumlah 0,8, nilai APC berjumlah 1,00, sementara nilai APS berjumlah 0. Pada nilai tertinggi Yd yaitu berada pada nilai 5000, nilai APC masih berjumlah 0,8 tapi nilai APC menurun yaitu berjumlah 0,84. lain halnya dengan APS yang meningkat berjumlah 0,16. Semua nilai ini bisa didapat dari persamaan 6.

6.2 Soal Latihan

- 1) Jelaskan kembali mengapa dalam ilmu ekonomi perlu adanya pembahasan tentang konsumsi?
- 2) Jelaskan kembali 2 Teori Konsumsi yang dibahas dalam bab ini?
- 3) Perekonomian pada suatu Negara tertentu memiliki data seperti dibawah ini (dalam miliar satuan mata uang):
Konsumsi: $150 + 0,5Y_d$; Investasi: 50; Pengeluaran pemerintah: 60; Pajak: 0,5Y; Ekspor: 20; Impor: 0,1Y. Dari data Ttersebut, maka tentukanlah besar Konsumsi (C)?

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, F. and Rasti, A. (no date) 'Teori Konsumsi'.
- Harso, C. 2013. Aplikasi Teori Konsumsi Keynes Terhadap Pola Konsumsi Makanan Masyarakat Indonesia ". Universitas Brawijaya.
- Nainggolan, L. E. *et al.* 2021. *Ekonomi Manajerial: Teori dan Pendekatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Nurfadhilah, D. S. and Sari, N. P. (2021) *Teori Konsumsi*. Center for Open Science.
- Parsaulian, B., Aimon, H. and Anis, A. 2013. Analisis konsumsi masyarakat di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2).
- Partadireja, A. 1996. Menguji landasan dasar asumsi teori konsumsi', *Economic Journal of Emerging Markets*, pp. 67–70.
- Rahardjo, M. 2011. Teori ekonomi makro: sebuah pengantar'.

BAB 7

TEORI INVESTASI

Oleh Ida Ayu Nyoman Yuliasuti

Universitas Mahasaraswati Denpasar

7.1 Pendahuluan

Memahami pentingnya investasi yang dimaksud merupakan prasyarat untuk memahami teori investasi. Salah satu makna berinvestasi sempat dibahas oleh sejumlah akademisi, termasuk Martono. Menurut Martono, investasi adalah komitmen finansial yang dibuat oleh suatu bisnis sebagai aset dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Mulyana juga menegaskan bahwa berinvestasi adalah komitmen atas berbagai keuangan yang saat ini dimiliki dan digunakan dengan harapan menghasilkan berbagai imbalan di kemudian hari.

Halim juga berbagi pemikirannya tentang definisi berinvestasi, yang ia definisikan sebagai penempatan banyak dolar sekarang dengan tujuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari (Pujoalwanto, 2014). Fitzgerald mendefinisikan investasi sebagai tindakan atau kegiatan yang erat kaitannya dengan upaya penarikan sumber dana yang digunakan untuk memperoleh barang modal di masa sekarang, dengan tujuan menggunakan barang modal tersebut untuk menciptakan aliran produk baru di masa depan (Sukirno, 2015).

Menurut pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh sejumlah ahli, investasi diartikan sebagai suatu alat untuk menyediakan barang-barang modal untuk digunakan pada masa sekarang dengan maksud memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Para pakar ekonomi juga telah menyatakan bahwa

tingkat investasi memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila tingkat investasi tinggi maka secara langsung juga dapat meningkatkan kapasitas produksi, sehingga akan berujung pada terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Dengan adanya hal tersebut maka tingkat pengangguran dapat direduksi, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat. Melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan, maka investasi menjadi suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan antar individu, antar industri, dan antar daerah semuanya dapat dicapai melalui investasi. Investasi berbasis ekuitas tidak dapat diizinkan untuk beroperasi sesuai dengan kekuatan pasar; sebaliknya, mereka membutuhkan pengawasan dan regulasi pemerintah.

Jadi, karena telah didukung oleh sumber daya alam dan manusia yang memadai, pesatnya investasi yang terjadi baik lokal maupun internasional di suatu negara dapat dijadikan sebagai indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang kokoh. Selain itu, jaminan keamanan dan stabilitas sosial politik yang berkelanjutan. Investor dapat memilih untuk memasukkan uang mereka ke dalam situasi ini. Semakin banyaknya investasi yang dilakukan di suatu negara, akan memberikan banyak manfaat yang positif bagi suatu negara. Hal ini akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja, transfer ilmu antar negara, pertumbuhan pendapatan daerah atau pusat, dan percepatan kemajuan daerah melalui pembangunan infrastruktur publik. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi bangsa dapat berdampak positif dengan semakin banyaknya investor dan semakin besarnya investasi yang dilakukan (Pujoalwanto, 2014).

7.2 Pengertian Investasi

Prinsip-prinsip teoritis yang berkaitan dengan investasi dipandang salah oleh para ahli di industri. Menurut pendapat Harrod-domar, investasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan persediaan barang modal, yang akan memungkinkan hasil yang lebih tinggi. Bagian dari output (pendapatan nasional) yang ditabung merupakan sumber dana dalam negeri yang akan digunakan untuk tujuan investasi (Manurung, 2011). Jika suatu periode eksklusif melihat peningkatan dalam jumlah tertentu dari pembentukan modal, persediaan modal akan meningkat pada periode berikutnya.

Keynes berpendapat bahwa jumlah tabungan yang digunakan oleh masyarakat tidak tergantung pada tingkat suku bunga, baik yang tinggi maupun yang rendah. Namun, ukuran rumah tangga dan tingkat ekonominya merupakan faktor kunci. Jumlah tabungan yang akan digunakan rumah tangga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga tersebut. Pergeseran besar dalam tingkat bunga, bagaimanapun, tidak akan berdampak besar pada jumlah tabungan yang akan digunakan rumah tangga jika jumlah pendapatan rumah tangga tetap sama (Sukirno, 2015).

Untuk memperluas potensi produksi suatu perekonomian, investasi berperan sebagai semacam belanja (Sukirno, 2015). Menurut Samuelson dan Nordhaus (2010), investasi juga didefinisikan sebagai peningkatan stok produk atau modal di suatu negara, seperti peralatan produksi, bangunan, dan barang inventaris selama setahun. Investasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai langkah untuk melepaskan pengeluaran saat ini demi konsumsi masa depan. Namun, dalam konteks ekonomi makro, investasi disebut sebagai ide aliran karena dihitung selama periode tertentu dan berdampak pada jumlah modal yang dapat diakses pada saat itu.

Menurut statistik, pembelian barang modal dan peralatan produksi terdiri dari empat jenis pengeluaran: investasi pemerintah, biaya pembangunan rumah, investasi sektor swasta, dan pengeluaran barang modal. Seorang pengusaha mengembangkan metode produksi ini untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan manufaktur yang dia lakukan di masa depan. Ini menyiratkan bahwa investasi saat ini terkait dengan kemungkinan keuntungan finansial di masa depan. Seorang wirausahawan akan memasukkan lebih banyak uang ke dalam sesuatu sekarang jika peluang menghasilkan uang di masa depan baik (Rahardja dan Manurung, 2018). Kegiatan yang berhubungan dengan investasi yang memungkinkan penduduk secara konsisten meningkatkan tingkat kesejahteraan di lingkungan mereka, dimana terjadi peningkatan pengendalian penduduk setiap tahunnya di Indonesia. Ketimpangan kegiatan ekonomi, terutama jumlah kesempatan kerja yang tersedia, semakin meluas dengan jumlah penduduk, yang mengarah pada masalah utama, yaitu pengangguran.

Bahkan jika investasi perusahaan lebih kecil dari pengeluaran konsumsi rumah tangga ketika diukur dari segi nilai dan bagian dari pendapatan nasional, itu memainkan peran yang jauh lebih signifikan daripada menggunakan konsumsi pribadi. Investasi perusahaan cukup "bergejolak" di banyak negara, terutama di negara-negara industri di mana ekonominya sangat maju. Ini adalah kondisi di mana selalu ada pertumbuhan dan penurunan yang sangat substansial, dan merupakan penyebab utama variasi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan investasi juga berperan dalam memungkinkan warga negara untuk terus memperluas kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang pada gilirannya membantu meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran rakyat.

Menurut Nizar dkk. (2008), kegiatan investasi suatu perekonomian berasal dari tiga kegiatan utama, yaitu: a) Investasi merupakan salah satu sumber pengeluaran agregat, oleh karena itu peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.

Sebagai hasil dari investasi, akan terjadi peningkatan barang modal, yang akan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan dan memacu pertumbuhan lapangan kerja di tingkat nasional.

Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini bisa memberikan sumbangan krusial terhadap peningkatan produktivitas serta pendapatan per kapita rakyat. Kemajuan teknologi selalu datang setelah investasi. Produktivitas dan pendapatan per kapita penduduk dapat meningkat secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan ini.

7.3 Berbagai Jenis Investasi

Investasi dalam aset riil dan aset keuangan pada awalnya dikatakan sebagai dua kategori investasi yang terpisah. Selain itu, investasi aset keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. **Investasi secara langsung**

Membeli aset keuangan yang diperdagangkan di pasar uang, pasar modal, atau pasar derivatif merupakan investasi langsung. Dimungkinkan juga untuk berinvestasi secara langsung dengan membeli aset yang tidak dapat diperdagangkan, yang seringkali tersedia dari bank komersial. Tabungan dan sertifikat deposito adalah dua contoh aset ini.

2. **Investasi yang dilakukan secara tidak langsung**

Dengan membeli aset dari organisasi investasi, seperti reksa dana, seseorang dapat berinvestasi secara tidak langsung. Investasi datang dalam berbagai bentuk, menurut Todaro dan Smith (2013), antara lain:

a) Investasi tergantung pada asetnya

Klasifikasi investasi dari perspektif modal atau kekayaan didasarkan pada aset mereka. Aset riil dan aset keuangan adalah dua kategori di mana investasi berdasarkan aset dapat dibagi. Sedangkan aset keuangan adalah dokumen (surat) yang secara tidak langsung diklaim oleh pemegangnya terhadap kegiatan nyata dari entitas yang mengeluarkan surat berharga, aset nyata, atau lebih tepatnya investasi berwujud, meliputi hal-hal seperti bangunan, kendaraan, dan investasi berwujud lainnya.

b) Investasi yang dilakukan berdasarkan pengaruhnya.

Investasi ini adalah salah satu yang didasarkan pada unsur-unsur yang mungkin atau tidak mungkin dipengaruhi oleh pelaksanaan operasi investasi.

c) Investasi tergantung pada sumber pembiayaan (UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; UU No. 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri).

Dengan mempertimbangkan sumber pembiayaan yang digunakan untuk melakukan investasi, seseorang dapat menentukan jenis investasi itu.

d) Investasi berdasarkan bentuknya.

Investasi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip investasi yang sehat. Investasi langsung dan investasi portofolio adalah dua kategori investasi berdasarkan bentuknya. Investasi yang dilakukan di pasar modal dengan menggunakan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi, dikenal sebagai investasi portofolio. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan melalui konstruksi, pembelian modal, atau akuisisi bisnis.

Karena fakta bahwa investasi merangsang kegiatan ekonomi, mereka semua secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi akan menggunakan dana pengangguran yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sehingga dapat diarahkan kepada usaha yang lebih produktif. Kegiatan produksi, industri, dan jasa perdagangan lainnya akan dikembangkan dengan menggunakan dana pemilik melalui kegiatan investasi.

Secara khusus, nilai mereka dalam menyerap tenaga kerja di daerah tempat proyek investasi dilakukan sangat terasa, kegiatan investasi akan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Investasi tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak negara bagian dan federal serta jenis pendapatan negara lainnya. Perekonomian nasional sangat didukung oleh semua faktor tersebut. Dengan kata lain, investasi yang bersangkutan akan meningkatkan PDB, dan jika pertumbuhan investasi melambat, pada akhirnya akan mengarah pada tingkat pertumbuhan PDB secara umum.

7.4 Elemen yang Mempengaruhi Investasi

Beberapa elemen yang diklaim mempengaruhi tingkat investasi antara lain jumlah keuntungan yang akan diperoleh di masa depan, tingkat bunga di masa depan, proyeksi kondisi masa depan, dan kemajuan teknis. Penjelasan dari masing-masing faktor tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

Tingkat keuntungan yang akan diperoleh

Prospek investasi yang baik dan menguntungkan tentunya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Apabila investasi yang dipilih oleh investor tersebut sudah tidak menguntungkan lagi, maka investor akan berpindah pada jenis investasi lainnya yang akan memberikan keuntungan yang lebih banyak. Seorang investor akan selalu mengamati kinerja

perusahaan yang mana merupakan tempat investor tersebut menanamkan modalnya. Naik turunnya nilai saham, akan menjadi indikator kuat yang digunakan investor untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.

1. Tingkat bunga

Tingkat bunga mempengaruhi investasi. Hubungan antara investasi dan suku bunga adalah kebalikannya, atau berkorelasi negatif. Tingkat investasi akan menurun pada tingkat bunga yang tinggi. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, investasi akan terus meningkat.

2. Prediksi keadaan masa depan

Jika diprediksi kondisi ekonomi ke depan akan menarik dan memiliki masa depan yang menjanjikan, pertumbuhan investasi akan lebih cepat lagi. Dua faktor kunci yang menentukan tingkat investasi adalah pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang stabil. Derajat keuntungan yang diperoleh pemilik usaha akan dapat meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.

3. Kemajuan teknologi

Pertumbuhan ekonomi akan terdorong dengan adanya teknologi tinggi yang tepat guna dan mampu meningkatkan produktivitas. Adanya produktivitas yang tinggi akan mampu menaikkan pendapatan perusahaan, sehingga pada akhirnya pekerja dapat menikmati hasilnya. Pendapatan yang meningkat tentunya akan mendorong peningkatan jumlah konsumsi, sehingga hal ini juga akan ikut mendorong laju investasi. Bila kondisi ini dapat tercipta secara terus menerus maka hal ini dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rahardja dan Manurung (2018), investasi sebagai sebuah keputusan yang rasional, sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu:

1. Tingkat pengembalian yang diantisipasi

Kondisi internal dan eksternal perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitasnya untuk mengidentifikasi jumlah investasi yang diharapkan. Kondisi internal adalah elemen-elemen yang dapat dipengaruhi oleh bisnis, seperti produktivitas, kualitas sumber daya manusianya, dan teknologi yang digunakannya. Tingkat pengembalian yang diprediksi berkorelasi positif dengan ketiga faktor tersebut. Ini menyiratkan bahwa tingkat pengembalian yang diproyeksikan meningkat dengan meningkatnya tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi. Tingkat pengembalian yang diproyeksikan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis selain tiga karakteristik teknis yang disebutkan di atas, terutama yang sering muncul di negara-negara berkembang. Perkiraan tingkat output dan perluasan ekonomi domestik dan global adalah kondisi eksternal utama yang harus diperhitungkan ketika membuat keputusan investasi. Jika prediksi untuk masa depan ekonomi nasional dan global optimis, tingkat investasi biasanya meningkat karena tingkat pengembalian investasi dapat meningkat.

2. Biaya investasi

Tingkat bunga pinjaman merupakan faktor terpenting dalam menentukan biaya investasi; semakin besar tingkat bunga, semakin mahal biaya investasinya. Akibatnya minat investasi turun. Tetapi sering terjadi bahwa minat untuk berinvestasi tetap rendah meskipun suku bunga pinjaman rendah. Hal ini disebabkan tingginya biaya investasi yang terus berlangsung. Keprihatinan institusional adalah elemen penentu utama. Misalnya, ketika memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi, prosedur izin investasi yang rumit dan berlarut-larut

(> 3 tahun) menghasilkan biaya ekonomi yang lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk stabilitas politik, tingkat kejelasan hukum, dan keberadaan dan efektivitas lembaga keuangan.

7.5 Manfaat Investasi

Dalam melakukan suatu investasi, tentunya akan diperoleh beberapa manfaat yaitu:

Kesulitan modal yang kerap dihadapi dalam pembangunan nasional dapat dipecahkan dengan salah satu alternatif yaitu dengan melakukan investasi.

1. Uang yang dikeluarkan untuk membangun sebuah industri pasti akan membantu meningkatkan sarana dan prasarana lokal, yang akan membantu industri tetangga yang terlibat tumbuh.
2. Investasi akan memungkinkan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Pekerjaan untuk individu yang terampil dan tidak terampil dapat diciptakan dengan investasi.
3. Melalui investasi maka teknologi baru dapat lebih mudah diperkenalkan dan pengetahuan baru yang bermanfaat lebih mudah didapat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi.

Dengan adanya investasi maka hasil produksi yang sebagian besar ditujukan untuk ekspor akan dapat memperbesar perolehan devisa yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur. 2008. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1, No. 2, Mei 2013.
- Manurung, D. A. H. 2011. Metode Penelitian: Keuangan, Investasi, dan Akuntansi Empiris.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung. 2018. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Samuelson, P ; Nordhaus, William D. 2010. Economics, Mc Graw Hill, USA
- Sukirno, Sadono. 2015. Makroekonomi Teori Pengantar, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2013. Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi 11. Penerbit Erlangga.

BAB 8

INFLASI DAN PENGANGGURAN

Oleh Tri Wahyu Rejekiningsih

Universitas Diponegoro

8.1 Pendahuluan

Perkembangan ekonomi makro di beberapa negara di dunia adalah berbeda, sehingga ada negara dengan kategori pertumbuhan ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Kondisi tersebut karena setiap negara menghadapi masalah ekonomi makro yang beragam. Masalah utama ekonomi makro jangka pendek berbeda dengan masalah utama ekonomi makro jangka panjang. Dalam jangka pendek, analisis makroekonomi berfokus pada siklus bisnis, yaitu yang ditandai dengan terjadi periode ekspansi ekonomi, dan resesi ekonomi yang dialami suatu negara. Siklus bisnis tidak seragam di setiap negara, bahwa setiap periode ekspansi tidak sama panjangnya, juga tidak untuk setiap periode resesi.

Untuk jangka panjang, fokus ekonomi makro pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu sebagai proses di mana peningkatan produktivitas akan meningkatkan standar hidup rata-rata. Ekonomi yang sukses akan mampu meningkatkan produksi barang dan jasa lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk (Hubbard dkk, 2012). Apabila suatu negara mampu meningkatkan produksi lebih cepat dari pertumbuhan penduduk sehingga akan diperoleh standar hidup rata-rata masyarakat yang meningkat. Untuk mencapai hasil ini hanya mungkin melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil adalah ukuran terbaik kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga siklus bisnis biasa diilustrasikan menggunakan pergerakan dalam PDB riil. Fluktuasi PDB riil per kapita ini mencerminkan fluktuasi mendasar dalam PDB riil yang disebabkan oleh siklus bisnis. Kebanyakan negara mengalami siklus bisnis di pasar kerja.

Perbedaan tingkat pengangguran di beberapa negara karena alasan yang tidak terkait dengan siklus bisnis. Perbedaan tingkat pengangguran dijelaskan karena ada perbedaan dalam kebijakan pasar tenaga kerja yang ditempuh pemerintah. Sebagaimana pengangguran yang bervariasi, begitu juga inflasi berfluktuasi dan bervariasi antar negara. Dengan mengeksplorasi alasan perbedaan tingkat inflasi antar negara, sehingga akan diperoleh wawasan yang lebih baik tentang apa yang membuat harga meningkat.

Ukuran stabilitas ekonomi adalah seberapa besar PDB riil berfluktuasi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Semakin PDB berfluktuasi, semakin tidak menentu penjualan perusahaan yang berdampak pada inflasi, dan semakin besar kemungkinan perekonomian akan mengalami kenaikan pengangguran. Untuk menstabilkan perekonomian diperlukan kebijakan makroekonomi, yaitu kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.

8.2 Inflasi

Definisi inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya secara cepat dalam suatu waktu tertentu, dan terus menerus.

Inflasi dikatakan sebagai perubahan harga atas waktu, $\pi = \frac{dP}{dt}$.

Harga beberapa barang dan jasa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada harga dalam perekonomian secara keseluruhan, diperlukan ukuran tingkat harga, yang merupakan rata-rata harga barang dan jasa dalam perekonomian. Salah satu tujuan kebijakan ekonomi makro

adalah stabilitas harga. Para ekonom mengukur tingkat harga dengan indeks harga, yang merupakan ukuran rata-rata harga barang dan jasa dalam satu tahun relatif terhadap tahun dasar. Indeks harga dapat diukur dengan menggunakan nilai PDB nominal dan PDB riil yang disebut PDB deflator, juga disebut PDB deflator harga implisit. PDB deflator dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$PDB_{Deflator} = \frac{PDB_{Nominal}}{PDB_{Riil}} \times 100\% \dots\dots\dots (8.1)$$

Karena PDB nominal sama dengan PDB riil pada tahun dasar, PDB deflator sama dengan 100 pada tahun dasar.

Penjelasan mengapa PDB deflator sebagai ukuran tingkat harga. Coba pikirkan apa yang akan terjadi jika harga barang dan jasa naik sementara produksi tidak berubah. Yang terjadi, PDB nominal akan meningkat, tetapi PDB riil akan tetap, sehingga PDB deflator akan meningkat. Kenyataan di sebagian besar tahun, baik harga maupun produksi meningkat, tetapi semakin banyak harga meningkat relatif terhadap peningkatan produksi, semakin banyak PDB nominal meningkat relatif terhadap PDB riil, dan semakin besar nilai PDB deflator. Para ekonom mengukur tingkat inflasi sebagai persentase kenaikan tingkat harga dari tahun ke tahun. Dengan menghitung PDB deflator selama dua tahun berturut-turut, akan diperoleh ukuran tingkat inflasi pada tahun kedua. Secara simbolis, jika P_{t-1} adalah tingkat harga di tahun pertama, P_t adalah tingkat harga di tahun kedua, dan π_t adalah tingkat inflasi selama tahun kedua, maka:

$$Tingkat\ Inflasi = \pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100 \dots\dots\dots (8.2)$$

Dimana, π = tingkat inflasi

P_t dan P_{t-1} adalah indeks harga, yang dapat berasal dari: IHK, IHPB, dan Indeks Produksi (IP).

Jadi tingkat inflasi diukur dengan suatu angka yang dihitung dari kenaikan angka indeks harga barang dan jasa umum, seperti: Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*), Indeks Produksi (IP), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan Produk Domestik Bruto (PDB) Deflator. Contoh: menghitung tingkat inflasi dengan menggunakan PDB deflator, jika diketahui data sebagai berikut:

	2019	2020
PDB Nominal	14,119 milyar	14,660 milyar
PDB Riil	12,880 milyar	13,248 milyar

Jawab:

$$\text{PDB deflator 2019} = \frac{14.119}{12.880} \times 100 = 109,6$$

$$\text{PDB deflator 2020} = \frac{14.660}{13.248} \times 100 = 110,7$$

$$\text{Tingkat Inflasi 2020} = \frac{110,7 - 109,6}{109,6} \times 100 = 1,0\%$$

Dengan hasil perhitungan ini artinya bahwa rata-rata harga dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di negara tersebut naik 1% antara 2019 dan 2020.

Besaran tingkat inflasi yang terjadi dalam perekonomian diberbagai negara bisa diklasifikasikan menjadi:

- Inflasi rendah (..... < 20%)
- Inflasi sedang (20% - 30%)
- Inflasi tinggi (..... > 30%)
- Hyper Inflation (.... > 100%)

Karena kondisi perekonomian negara-negara di dunia berbeda-beda, sehingga tidak ada patokan yang bersifat ***general*** tentang besaran tingkat inflasi. Misal: tingkat inflasi 10% bisa dikatakan inflasi sedang di negara yang miskin, tetapi bagi negara yang kaya bisa dikatakan tingkat inflasi rendah, dsb.

8.2.1 Teori Kuantitas Uang

Hubungan antara kenaikan jumlah uang beredar dengan kenaikan tingkat harga telah didiskusikan oleh para ekonom klasik pada abad keempat SM. Selama abad keenam belas, penaklukan Spanyol atas Meksiko dan Peru menghasilkan sejumlah besar emas dan perak yang diekspor ke Eropa, yang kemudian dicetak menjadi koin. Waktu itu tercatat bahwa peningkatan tajam dalam jumlah uang beredar telah mengakibatkan peningkatan inflasi. Pada awal abad kedua puluh, ekonom Yale Irving Fisher memformalkan hubungan antara uang dan harga dengan menggunakan persamaan kuantitas. Persamaan kuantitas (juga disebut persamaan pertukaran) adalah identitas yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar, M , dikalikan dengan perputaran uang, V , sama dengan tingkat harga, P , dikalikan dengan PDB riil, Y :

$$M \cdot V = P \cdot Y \dots\dots\dots (8.3)$$

Irving Fisher mengubah persamaan kuantitas menjadi teori kuantitas uang dengan mengasumsikan bahwa kecepatan adalah konstan. Fisher berpendapat bahwa rata-rata berapa kali satu dolar dihabiskan tergantung pada faktor-faktor yang tidak sering berubah, seperti seberapa sering orang dibayar, seberapa sering orang berbelanja bahan makanan, dan seberapa sering bisnis mengirimkan tagihan. Karena pernyataan bahwa kecepatan adalah konstan dapat benar atau salah, maka teori kuantitas uang adalah sebuah teori.

Dalam aturan matematika, apabila persamaan ada perkalian antar variabel kira-kira sama dengan persamaan di mana tingkat pertumbuhan variabel dijumlahkan. Dengan menggunakan aturan ini, dan mengingat bahwa laju pertumbuhan suatu variabel sama dengan persentase perubahan dari variabel, sehingga persamaan (8.3) dapat ditulis ulang menjadi (Hubbard dkk, 2012):

$$\% \text{ Change in } M + \% \text{ Change in } V = \% \text{ Change in } P + \% \text{ Change in } Y \dots\dots\dots (8.4)$$

Teori kuantitas mengasumsikan bahwa kecepatan adalah konstan, sehingga % Perubahan $V=0$. Persentase perubahan tingkat harga adalah tingkat inflasi, π . Oleh karena itu persamaan (8.4) dapat ditulis ulang menjadi:

$$\% \text{ Change in } M = \pi + \% \text{ Change in } Y \dots\dots\dots (8.5)$$

Persamaan (8.5) memberitahukan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar sama dengan tingkat inflasi ditambah tingkat pertumbuhan PDB riil. Ditulis ulang menjadi:

$$\pi = \% \text{ Change in } M - \% \text{ Change in } Y \dots\dots\dots (8.6)$$

Persamaan (8.6) memberitahukan bahwa hasil inflasi dari jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dari PDB riil. Misalnya, jika jumlah uang beredar tumbuh sebesar 5%, sedangkan PDB riil tumbuh sebesar 3%, tingkat inflasi akan menjadi 2%. Jika Bank Sentral menggandakan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dari 5% menjadi 10%, teori kuantitas memprediksi bahwa tingkat inflasi akan meningkat dari 2% menjadi 7%. Dengan kata lain, teori kuantitas memprediksi bahwa kenaikan satu poin persentase dalam tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar akan menyebabkan peningkatan satu poin persentase dalam tingkat inflasi.

Selama kecepatan tumbuh pada tingkat yang konstan, akan ada hubungan erat antara peningkatan jumlah uang beredar dengan peningkatan tingkat inflasi. Namun, ketika tingkat kecepatan pertumbuhan berubah, sulit bagi bank sentral untuk memprediksi bagaimana perubahan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya, peningkatan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar mungkin diimbangi oleh penurunan kecepatan, sehingga tingkat inflasi tidak terpengaruh. Karena kecepatan kadang-kadang bergerak tidak menentu selama periode yang singkat, sehingga persamaan kuantitas tidak akan memberikan prakiraan inflasi yang baik dalam

jangka pendek. Namun dalam jangka panjang dan lintas negara, terdapat bukti hubungan yang kuat antara tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dengan tingkat inflasi.

Tentang dua ukuran yang berbeda dari jumlah uang beredar, yaitu: M1 dan M2. Untuk M1 adalah ukuran yang lebih sempit dari jumlah uang beredar yaitu meliputi: Jumlah mata uang yang beredar, deposito rekening giro, dan kepemilikan cek perjalanan. Sedangkan untuk M2 adalah ukuran yang lebih luas dari jumlah uang beredar yaitu meliputi: semua aset yang termasuk dalam M1, serta deposito berjangka dengan nilai kurang dari \$100.000, rekening tabungan, pasar uang rekening deposito di bank, dan saham reksa dana di pasar uang noninstitusional. Pasar uang noninstitusional berarti saham reksa dana dimiliki oleh investor individu dan bukan investor institusional, seperti dana pensiun.

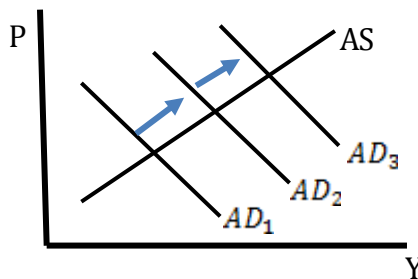
Ada pola yang jelas dari hubungan antara jumlah uang beredar dengan tingkat inflasi. Bahwa periode dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jumlah uang beredar juga merupakan periode dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, sebagian besar variasi tingkat inflasi selama beberapa periode dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Dapat disimpulkan bahwa prediksi dasar dari teori kuantitas tersebut adalah salah satu hubungan yang paling dapat diandalkan dalam ekonomi makro. Jika bank sentral meningkatkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar, maka dalam jangka panjang, peningkatan ini akan menyebabkan tingkat inflasi yang lebih tinggi.

8.2.2 Penyebab Inflasi

Inflasi yang terjadi dalam perekonomian dapat bersumber dari: a) *demand side inflation*, b) *supply side inflation*, dan c) *demand supply side*. Berdasarkan sumber penyebab inflasi, sehingga jenis inflasi meliputi (Mishkin, 2011):

1. Demand Pull Inflation

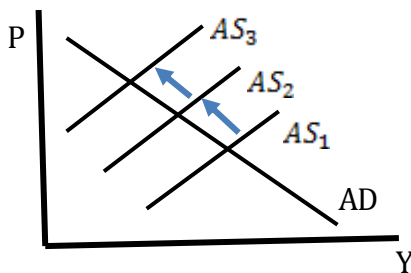
- Inflasi yang disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan sehingga mendorong kenaikan tingkat harga umum
- Pendorong kenaikan permintaan agregat dapat berasal dari guncangan internal maupun eksternal
- Bisa juga berasal dari kebijakan ekspansi moneter dan fiskal yang berlebihan
- Tekanan permintaan yang menyebabkan kuantitas output perekonomian bertambah tetapi disertai inflasi.



Gambar 8.1. Demand Pull inflation

2. Cost Push inflation

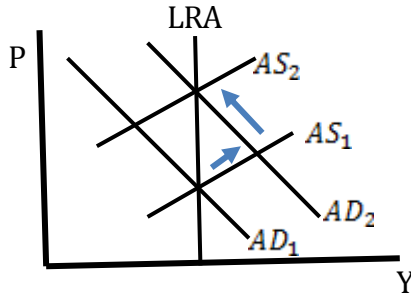
- Inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi
- Contoh: kenaikan UMR, harga BBM meningkat, depresiasi nilai tukar, bencana alam, dan distribusi yang terganggu.



Gambar 8.2. Cost Push inflation

3. Policy Induced Inflation

- a. Inflasi yang disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter, bisa juga merefleksikan cara pembiayaan defisit anggaran yang berlebihan.
- b. Contoh: hiperinflasi di Jerman tahun 1920



Gambar 8.3 *Policy Induced inflation*

8.2.3 Dampak Dan Manfaat Inflasi

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli (Mishkin, 2011) bahwa inflasi memiliki pengaruh yang kecil pada nilai jangka panjang dari sebagian besar variabel ekonomi makro riil, seperti output, konsumsi, dan tingkat bunga riil. Namun ada satu variabel riil yaitu, keseimbangan uang riil, M/P , yang bergantung secara negatif pada tingkat inflasi dengan mengambil nilai yang berbeda dengan tingkat inflasi yang. Hal ini menunjukkan bahwa ada efek terhadap kesejahteraan dari inflasi. Khususnya, ketika tingkat inflasi meningkat dan permintaan keseimbangan uang riil menurun (karena ada kenaikan tingkat bunga nominal), sehingga akan lebih banyak waktu dan energi harus dicurahkan untuk berbelanja, untuk setiap tingkat pengeluaran tertentu. Kondisi demikian akan mengurangi jumlah waktu luang yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan menyebabkan tingkat utilitas yang lebih rendah.

Dampak inflasi terhadap perekonomian makro, dan masyarakat adalah:

1. Terhadap Perekonomian

- a. Stabilitas ekonomi terganggu
Inflasi menumbuhkan perkiraan bahwa harga akan terus naik sehingga mendorong pembelian barang dan jasa yang lebih banyak dari yang dibutuhkan.
- b. Mendorong penanaman modal spekulatif
Jika terjadi inflasi, pemilik modal akan cenderung untuk melakukan investasi yang spekulatif, seperti membeli tanah, rumah serta penyimpanan barang berharga, karena akan lebih menguntungkan dari pada investasi yang produktif.
- c. Suku bunga meningkat
Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman akan mengurangi investasi dan pengembangan usaha produktif.
- d. Menimbulkan masalah neraca pembayaran
Inflasi menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah dan impor barang meningkat sebaliknya ekspor berkurang. Selain itu arus modal akan banyak berpindah ke luar negeri dibanding arus modal yang masuk ke dalam negeri.

2. Terhadap Masyarakat

- a. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum menurun.
 - Bagi pekerja, yang berpendapatan tetap, inflasi akan merugikan karena harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang sama. Sedangkan bagi pekerja yang berpendapatan tidak tetap, inflasi tidak akan mempengaruhi daya beli tetapi justru kadang akan menguntungkan.
 - Bagi penabung, inflasi akan merugikan penabung, karena nilai uang yang semakin turun. Apalagi jika

tingkat bunga yang diperoleh dari menabung lebih rendah dari tingkat inflasi. Akibatnya masyarakat enggan menabung di bank.

- Bagi debitur, inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran hutang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dari saat meminjam. Sebaliknya bagi kreditur inflasi sangat merugikan
- Bagi Produsen, inflasi akan menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. Jika terjadi sebaliknya, maka produsen tidak akan meningkatkan produksi atau bahkan mengurangi produksi.

b. Memperbesar kesenjangan

Saat terjadi inflasi nilai tanah, rumah dan bangunan akan mengalami kenaikan harga dan pendapatan riil masyarakat berpenghasilan rendah semakin merosot. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya semakin melebar.

Namun, beberapa ekonom percaya bahwa ada manfaat dari inflasi terhadap perekonomian. Ketika tingkat inflasi rendah dapat memungkinkan terjadi penyesuaian harga relatif dalam situasi di mana harga nominal kaku. Contoh: upah riil (=upah nominal dibagi dengan tingkat harga) yang menentukan berapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan oleh perusahaan. Dalam situasi di mana upah riil perlu diturunkan untuk memulihkan keseimbangan di pasar tenaga kerja, hal ini dapat terjadi baik dengan memotong upah nominal atau dengan cara menjaga upah nominal tetap konstan sementara inflasi menyebabkan upah riil turun. Pekerja seringkali lebih enggan melihat upah nominalnya dipotong daripada melihat upah riil turun akibat inflasi, meskipun pada akhirnya hasilnya bisa setara. Kondisi dengan upah riil turun sehingga perusahaan/sector kerja harus lebih bersedia

mempekerjakan pekerja tambahan supaya pasar tenaga kerja dapat beroperasi lebih efisien.

8.3 Pengangguran

Ketika terjadi resesi ekonomi akan muncul permasalahan dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan. Faktanya, tingkat pengangguran dapat memiliki implikasi yang terkait dengan politik. Sebagai contoh ketika ada pemilihan presiden, presiden petahana akan dipilih kembali jika pengangguran turun di awal tahun pemilihan, tetapi dikalahkan jika pengangguran meningkat. Selain itu calon investor juga memantau dengan cermat informasi tentang perubahan pekerjaan dan pengangguran, sebagai bahan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara.

Tingkat pekerjaan dan pengangguran merupakan variabel makroekonomi yang utama, sehingga penting untuk mengetahui bagaimana mengukur kedua variabel tersebut. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas berisi beberapa indikator ketenagakerjaan di Indonesia yang mengacu pada *The Key Indicators of the Labour Market* (KILM) yang direkomendasikan oleh *The International Labour Organization* (ILO).

8.3.1 Mengukur Pengangguran

Sakernas 2001 konsep status pekerjaan, dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan pada Sakernas 2000 ada 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru, yaitu: pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian.. Konsep pengangguran terbuka diperluas, yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, juga mencakup kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan lagi karena sudah merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Beberapa definisi ketenagakerjaan (BPS, 2022):

1. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
2. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
3. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lama bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
4. Jumlah jam kerja adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan).
5. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit.
6. Berusaha sendiri adalah bekerja/berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk pekerjaan yang memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
7. Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Namun buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak digolongkan

sebagai buruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama sebulan terakhir. Apabila majikan instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

8. Pekerja Bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) yang mencakup pertanian maupun nonpertanian, baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Dari definisi ketenagakerjaan tersebut dapat diketahui bahwa angkatan kerja adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan dan yang menganggur dalam perekonomian.

Tenaga Kerja (TK) = Angkatan Kerja (AK) + Bukan AK

Angkatan Kerja (AK) = Bekerja + Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang tidak bekerja, padahal termasuk ke dalam angkatan kerja, dan memang sedang mencari pekerjaan. Ini berarti perubahan dalam tingkat pengangguran secara akurat mencerminkan perubahan dalam kesulitan mencari pekerjaan. Sebagian besar ekonom percaya bahwa tingkat pengangguran adalah ukuran yang menyajikan kondisi di pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang menganggur, yaitu:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \left(\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \right) \times 100\% \dots \dots \dots (8.7)$$

Pelajar dan mahasiswa yang sudah cukup umur untuk bekerja tidak dikategorikan sebagai pengangguran karena memang tidak mencari pekerjaan.

8.3.2 Kategori Pengangguran

Keseimbangan di pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa setiap pekerja yang menginginkan suatu pekerjaan sudah dapat menemukannya. Ini berarti bahwa setiap pekerja yang tidak memiliki pekerjaan harus lebih memilih waktu luang daripada bekerja dengan upah riil yang berlaku. Jika analisis ini benar, maka pengangguran yang terjadi harus bersifat sukarela. Jadi peningkatan tingkat pengangguran dikarenakan pekerja belum mendapatkan pekerjaan dengan upah saat ini yang diinginkan. Menurut para ekonom ada tiga kategori pengangguran yang berguna dalam menganalisis pasar tenaga kerja. Meskipun tingkat pengangguran selalu naik dan turun dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah turun ke nol. Untuk memahami mengapa ini benar, perlu membahas tiga kategori dari pengangguran, yaitu:

1. Pengangguran Friksional

Pekerja memiliki keterampilan, minat, dan kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki persyaratan keterampilan, kondisi kerja, dan upah yang berbeda. Akibatnya, sebagian besar pekerja menghabiskan setidaknya beberapa waktu terlibat dalam pencarian pekerjaan, sama seperti kebanyakan perusahaan juga menghabiskan waktu mencari orang baru untuk mengisi lowongan pekerjaan. Pengangguran friksional adalah pengangguran jangka pendek yang timbul dari proses penyesuaian keterampilan kerja pekerja dengan persyaratan pekerjaan. Butuh waktu bagi pekerja untuk mencari pekerjaan dan bagi perusahaan untuk mencari karyawan baru. Oleh karena itu, pengangguran friksional adalah pengangguran yang pasti ada, meskipun kondisi perekonomian berada pada output tingkat *full-employment*. Jadi menganggur karena dibutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan (ada proses melamar pekerjaan).

Beberapa pengangguran disebabkan oleh faktor musiman, seperti cuaca atau fluktuasi permintaan barang dan jasa tertentu selama waktu yang berbeda dalam setahun. Contoh, *department store* meningkatkan perekrutan karyawan pada bulan November dan Desember dan mengurangi perekrutan setelah Hari Tahun Baru. Di daerah pertanian, lapangan kerja meningkat selama musim panen dan menurun setelahnya. Pengangguran musiman mengacu pada pengangguran karena faktor-faktor seperti cuaca, musim dan acara terkait hari besar keagamaan. Oleh karena itu pengangguran musiman dapat membuat tingkat pengangguran tampak sangat tinggi selama beberapa bulan dan sangat rendah selama bulan-bulan lainnya. Kondisi ini menyebabkan ada dua data tingkat pengangguran setiap bulan, yaitu: 1) data yang disesuaikan secara musiman dan 2) data yang tidak disesuaikan secara musiman. Data pengangguran yang disesuaikan secara musiman menghilangkan efek pengangguran musiman. Para ekonom dan pembuat kebijakan mengandalkan data yang disesuaikan secara musiman sebagai ukuran yang lebih akurat dari kondisi pasar tenaga kerja saat ini.

Bagaimanapun pengangguran friksional berdampak baik untuk perekonomian, karena dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan mencurahkan waktu untuk mencari pekerjaan, pekerja berakhir dengan pekerjaan yang dianggap memuaskan dan pekerja akan bisa produktif. Tentu saja, memiliki pekerja yang lebih produktif dan lebih puas juga merupakan kepentingan terbaik perusahaan. Ketika pekerja lebih produktif akan memiliki produk marjinal tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Pergeseran ini harus mengarah pada upah riil yang lebih tinggi dan lebih banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, program “Kartu Kerja”, program pemerintah yang memungkinkan calon pekerja, dan pekerja yang telah diputus dari pekerjaan

menerima tunjangan untuk jangka waktu tertentu selama mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Dengan demikian dapat meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dan ekonomi. “Kartu Kerja”, seorang calon pekerja, dan pekerja yang menganggur akan berada di bawah tekanan keuangan yang parah untuk menerima tawaran pekerjaan pertama yang diterima, terlepas dari apakah pekerjaan itu sesuai dengan keterampilan pekerja dan dibayar paling tinggi. “Kartu Kerja” mengurangi tekanan keuangan ini dengan memberi calon pekerja, dan pekerja yang menganggur sejumlah pendapatan selama pencarian kerja. Akibatnya, calon pekerja, dan pekerja mampu mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Namun, apabila program “Kartu Kerja” untuk jangka waktu yang terlalu lama dapat menyebabkan calon pekerja, dan pekerja yang menganggur menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari pekerjaan baru, yang akan mengurangi efisiensi ekonomi. Selama masa pandemi program “Kartu Kerja” diberikan selama 6 bulan untuk menerima tunjangan. Selain efek efisiensi ekonomi, pembayaran tunjangan “Kartu Kerja” dapat meningkatkan tingkat pengeluaran konsumsi oleh calon pekerja, dan pekerja yang menganggur, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural bisa terjadi akibat ketidaksesuaian jenis pekerjaan dengan kapabilitas tenaga kerja. Jadi pengangguran struktural muncul dari ketidaksesuaian yang terus-menerus antara keterampilan pekerja dengan persyaratan pekerjaan. Meskipun pengangguran friksional adalah jangka pendek, pengangguran struktural dapat terjadi dan berlangsung lebih lama karena pekerja membutuhkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru. Mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan bagi seorang pekerja untuk mempelajari

keterampilan baru yang dibutuhkan agar mendapatkan pekerjaan baru di sektor yang berbeda dari keahlian yang dimiliki sebelumnya.

Perubahan teknologi adalah salah satu kemungkinan penyebab dari pengangguran struktural. Perubahan teknologi pada umumnya akan cenderung menghilangkan pekerjaan yang tidak terampil, sekaligus meningkatkan permintaan akan pekerjaan terampil. Sebagai contoh, komputer dan teknologi informasi telah menghilangkan banyak pekerjaan tidak terampil, seperti juru ketik, dan mengurangi permintaan staf administrasi. Pada saat yang sama, inovasi ini telah dapat meningkatkan permintaan pekerja yang memproduksi komputer, perangkat lunak komputer, dan produk lain yang terkait. Dengan kata lain, pekerja berketerampilan rendah, dan tidak memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan adalah pengangguran struktural. Bahkan bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan dasar, seperti melek huruf, atau kecanduan obat-obatan atau alkohol yang menyulitkan pekerja untuk melakukan tugas semua pekerjaan secara memadai. Para pekerja ini mungkin tetap menganggur secara struktural selama bertahun-tahun.

3. Pengangguran *Cyclical* (Siklis)

Ketika perekonomian bergerak ke arah resesi, sehingga banyak perusahaan mengalami penjualan menurun/jatuh dan mengurangi produksi. Pada saat produksi menurun, perusahaan memberhentikan pekerja. Pekerja yang kehilangan pekerjaan ini karena resesi mengalami pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat kondisi perekonomian yang mengalami resesi sehingga output berada di bawah level *full-employment*.

Pengangguran siklis diukur sebagai perbedaan antara tingkat pengangguran aktual dengan tingkat pengangguran

alami. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran normal, yang terdiri dari pengangguran friksional ditambah pengangguran struktural. Tingkat pengangguran siklis ini sebagai ekuilibrium tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Jadi, ketika besaran tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alami, pengangguran siklis adalah nol. Sebagian besar ekonom percaya bahwa tingkat pengangguran alami terukur antara 5% hingga 6%.

Disinyalir bahwa meskipun pengangguran siklis disebabkan oleh resesi, itu tidak berakhir ketika resesi berakhir. Sebagai contoh, tingkat pengangguran di Amerika Serikat terus berada jauh di atas tingkat pengangguran alami selama berbulan-bulan setelah resesi 2007-2009 yang berakhir pada Juni 2009 (Hubbard, dkk, 2012). Para ekonom ini berpendapat bahwa resesi 2007-2009 disebabkan oleh krisis yang sangat besar dengan penurunan total pengeluaran, atau penurunan permintaan agregat. Karena permintaan agregat hanya meningkat perlahan setelah resesi, PDB juga tumbuh perlahan, ini menghambat pertumbuhan lapangan kerja dan menjaga tingkat pengangguran tetap tinggi. Kondisi ini mendorong muncul pemahaman tentang "kenormalan baru" ("*new normal*"), di mana tingkat pengangguran mungkin tertahan di tingkat yang lebih tinggi selama bertahun-tahun.

Istilah pekerjaan penuh (*Full Emloyment*) yang sering digunakan tidak berarti bahwa setiap pekerja memiliki pekerjaan. Sebaliknya, perekonomian berada pada kesempatan kerja penuh ketika tingkat pengangguran siklis adalah nol, atau, dengan kata lain, ketika tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alami. Para ekonom terkadang menyebut tingkat pengangguran alami sebagai tingkat pengangguran penuh.

Selain variasi dalam rata-rata tingkat pengangguran antar negara, terdapat juga variasi dalam jumlah rata-rata waktu seorang pekerja menganggur, atau lamanya bekerja. Perbedaan rata-rata durasi pengangguran memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pekerja yang menganggur untuk jangka waktu yang lama lebih cenderung menganggur karena alasan struktural daripada alasan gesekan/siklus. Jadi, kebijakan yang dirancang untuk membantu pengangguran jangka panjang lebih efektif jika melibatkan program pelatihan atau program lain yang membantu pekerja berpindah dari sektor kerja yang menurun ke sektor kerja yang berkembang.

8.3.3 Pengangguran Alami

Telah disebutkan bahwa ada tiga kategori pengangguran: siklis, friksional, dan struktural. Para ekonom menyebut ekuilibrium tingkat pengangguran jangka panjang adalah tingkat pengangguran alami, dan yang diukur sebagai penjumlahan dari pengangguran struktural dengan friksional. Salah satu penjelasan untuk perbedaan durasi rata-rata tingkat pengangguran adalah bahwa tingkat pengangguran alami juga bervariasi antar negara.

1. Model Tingkat Pengangguran Alami

Pada masa ekonomi membaik, bahkan beberapa pekerja meninggalkan satu pekerjaan untuk pekerjaan lain atau berhenti bekerja untuk kembali ke sekolah atau melakukan kegiatan lain, sementara ada pekerja lain kehilangan pekerjaan. Akibatnya, ada arus pekerja yang konstan dari pekerjaan ke pengangguran dan dari pengangguran ke pekerjaan, bahkan ketika pengangguran siklis adalah nol.

Salah satu cara untuk memikirkan tingkat pengangguran alami sebagai tingkat pengangguran yang ada dalam jangka panjang adalah ketika ekonomi dalam keadaan mapan dan aliran pekerja ke pekerjaan sama dengan aliran pekerja ke

pengangguran. Untuk mempermudah pemahaman diasumsikan bahwa angkatan kerja konstan, sehingga tidak ada pendatang baru memasuki angkatan kerja dan tidak ada yang meninggalkan angkatan kerja. Diketahui bahwa angkatan kerja adalah jumlah pengangguran dan pekerja yang dipekerjakan.

Setiap bulan, beberapa pekerja yang menganggur mencari pekerjaan. Persentase individu yang menganggur yang menemukan pekerjaan sebagai tingkat menemukan pekerjaan, atau f . Selain itu, beberapa pekerja yang dipekerjakan meninggalkan pekerjaan baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Persentase pekerja yang dipekerjakan meninggalkan pekerjaan disebut sebagai tingkat pemisahan pekerjaan, atau s . Jumlah total pekerja yang berpindah dari status menganggur ke status bekerja adalah:

$$f \times \text{Pengangguran}$$

sedangkan jumlah pekerja yang berpindah dari status bekerja menjadi pengangguran adalah:

$$s \times \text{Bekerja}$$

Ketika pasar tenaga kerja dalam kondisi ekuilibrium dan pengangguran pada tingkat alami, jumlah pekerja yang mencari pekerjaan sama dengan jumlah pekerja yang berpisah dari pekerjaan, jadi:

$$f \times \text{Pengangguran} = s \times \text{Bekerja} \dots\dots\dots (8.8)$$

Untuk memahami apa yang menentukan jumlah pekerja yang menganggur dengan menggunakan ilustrasi sebagai berikut: Variabel stok (ketinggian air di bak mandi) adalah jumlah pekerja yang menganggur. Banyaknya pekerja yang berpisah dari pekerjaannya (air yang mengalir ke bak mandi) adalah aliran pekerja ke dalam stok pekerja yang menganggur. Banyaknya pekerja yang mencari pekerjaan (air yang mengalir dari bak mandi) adalah jumlah pekerja yang keluar dari stok pengangguran. Ketika kedua aliran ini sama, jumlah pekerja yang menganggur adalah konstan, pasar tenaga kerja berada

dalam ekuilibrium, dan pengangguran berada pada tingkat alamiah.

Dengan menggunakan definisi dan persamaan (8.7) dapat memperoleh ekspresi tingkat pengangguran alami, U , sebagai berikut:

$$U = \frac{s}{s+f} = \frac{1}{1+f/s} \dots\dots\dots (8.9)$$

Persamaan (8.9) memberitahukan bahwa Tingkat pengangguran alami tergantung pada tingkat di mana pekerja menemukan pekerjaan dan pekerja terpisah dari pekerjaan. Ketika tingkat pekerja yang mencari pekerjaan meningkat, tingkat pengangguran menurun. Ketika tingkat pekerja yang berpisah dari pekerjaan meningkat, tingkat pengangguran juga meningkat.

Tingkat pencarian pekerjaan dan pemisahan berfluktuasi sesuai kondisi ekonomi. Ketika kondisi ekonomi konstan disertai arus masuk dan keluar lapangan kerja sama, tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alami. Jadi, persamaan (8.9) merupakan model untuk tingkat pengangguran alami. Jika pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat pengangguran alami, harus menemukan cara untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) atau meningkatkan jumlah perolehan pekerjaan.

2. Penyebab Pengangguran Alami

Tingkat pengangguran struktural adalah salah satu penentu utama tingkat pengangguran alami. Faktor-faktor yang menentukan tingkat pengangguran struktural berubah lebih lambat daripada faktor-faktor yang menentukan pengangguran siklis. Oleh karena itu, meskipun tingkat pengangguran alamiah tidak konstan, namun berfluktuasi jauh lebih kecil daripada tingkat pengangguran aktual.

Tingkat pengangguran alami berubah ketika pengangguran struktural atau friksional berubah. Pengangguran struktural dan friksional bervariasi berdasarkan:

1. Demografi, termasuk perubahan usia, jenis kelamin, dan ras penduduk. Pekerja yang berusia lebih muda memiliki keterampilan yang lebih rendah dan lebih sering berganti pekerjaan daripada pekerja yang lebih tua. Selain itu, seringkali pekerja yang lebih muda membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan awal di saat memasuki angkatan kerja. Seiring bertambahnya usia angkatan kerja, rata-rata pekerja menemukan pekerjaan dengan lebih mudah, sehingga pengangguran friksional dan struktural menurun. Tingkat pengangguran bervariasi menurut jenis kelamin, dan persentase pria dan wanita dalam angkatan kerja juga akan mempengaruhi tingkat pengangguran alami. Karena perempuan telah menjadi bagian yang lebih besar dari angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran alami berkurang. Ketika jumlah pegawai negeri (PNS) yang perempuan tidak proporsional, sehingga kesenjangan antara tingkat pengangguran laki-laki dan tingkat pengangguran perempuan dapat menyempit.
2. Kebijakan publik, termasuk perubahan dalam program “Kartu Kerja” dan undang-undang yang mengatur pasar tenaga kerja. Selain itu, pembentukan agen tenaga kerja juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran alami. Baik program “Kartu Kerja”, Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Agen Tenaga Kerja, semua bertujuan untuk menekan tingkat pengangguran alami.
3. Perubahan teknologi, termasuk pengenalan produk baru yang menggantikan produk lama dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, perubahan teknologi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja menyebabkan upah

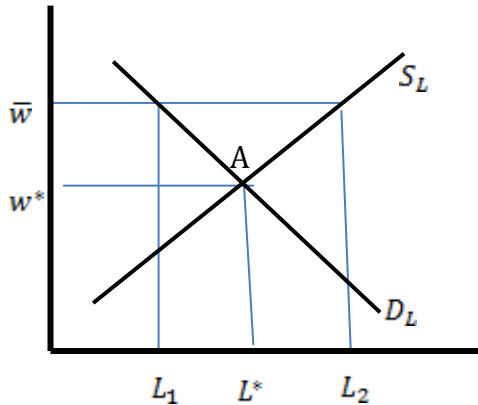
riil yang lebih tinggi. Upah riil yang tinggi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang bersedia ditawarkan oleh pekerja. Dapat disimpulkan bahwa perubahan teknologi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada akhirnya membuat pekerja menjadi lebih baik, meskipun beberapa pekerja individu mungkin dibuat lebih buruk. Teknologi baru menghancurkan pekerjaan yang ada tetapi secara bersamaan menciptakan pekerjaan yang menghasilkan produk baru dan lebih baik dalam perekonomian. Secara keseluruhan, perubahan teknologi akan memiliki efek yang besar pada pekerjaan campuran di seluruh industri, tetapi mungkin hanya memiliki efek kecil pada tingkat pengangguran alami.

4. Pergeseran sektoral, termasuk pertumbuhan dan penurunan di berbagai industri dan perubahan di tempat industri berada. Perubahan harga bahan baku utama, seperti minyak, juga dapat menyebabkan terjadi perpindahan pekerjaan lintas sektor dan meningkatkan pengangguran struktural. Pengalaman di negara-negara berpenghasilan tinggi, tenaga kerja telah mengalir dari sektor manufaktur ke sektor jasa, sementara di banyak negara berpenghasilan rendah, tenaga kerja telah mengalir dari sektor pertanian ke sektor manufaktur. Ketika realokasi ini terjadi, tingkat pengangguran alami dapat meningkat untuk sementara.

8.3.4 Kebijakan Untuk Pengaruhi Pengangguran

1. Pengangguran

Keseimbangan pasar tenaga kerja yang menyatakan bahwa semua pekerja yang menginginkan pekerjaan dapat menemukan, jika ini benar, mengapa ada pengangguran? Model adalah versi realitas yang disederhanakan. Kenyataan, ada banyak jenis gesekan yang mencegah penyesuaian upah riil untuk menjaga agar pasar tenaga kerja pada keseimbangan. Akibatnya, pengangguran bisa terjadi.



Gambar 8.4 Pasar Tenaga Kerja (Sumber: Hubbard dkk, 2012)

Gambar 8.4 menunjukkan pasar tenaga kerja dengan pengangguran. Di titik A, pasar tenaga kerja berada dalam keseimbangan karena jumlah tenaga kerja yang diminta dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama, L^* . Semua pekerja yang menginginkan pekerjaan dapat menemukannya, sehingga tidak ada pengangguran. Namun, jika upah riil, $\bar{w}$, berada di atas upah riil ekuilibrium, w^* , jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga, L_2 , lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan, L_1 . Karena jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan tidak dapat lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang diminta, L_1 , juga mewakili jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Akibatnya, beberapa pekerja akan ingin memiliki pekerjaan dengan upah yang berlaku, $\bar{w}$, tetapi tidak dapat menemukannya. Dengan kata lain, beberapa pekerja menganggur. Mengapa upah riil tidak segera turun untuk memulihkan keseimbangan di pasar tenaga kerja dan menghilangkan pengangguran?

2. Upah Efisiensi

Kebanyakan perusahaan, bagaimanapun, harus bergantung pada pekerja yang termotivasi untuk bekerja keras. Oleh karena itu, beberapa perusahaan secara sukarela membayar upah efisiensi, yaitu upah yang lebih tinggi dari upah pasar yang dibayarkan perusahaan untuk memotivasi pekerja agar lebih produktif. Upah efisiensi dapat muncul karena empat alasan, yaitu:

- a. Upah efisiensi dapat memotivasi pekerja untuk bekerja lebih keras.
- b. Upah efisiensi membuat pekerja cenderung untuk tidak berpindah pekerjaan karena sebagian besar pekerjaan alternatif hanya membayar upah pasar. Ketika seorang pekerja berhenti dari pekerjaan, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk mencari dan melatih pekerja baru. Jika biaya untuk mencari dan melatih pekerja baru cukup tinggi, upah efisiensi akan dapat meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan akan secara sukarela membayar upah riil yang lebih tinggi dari upah riil keseimbangan.
- c. Perusahaan membayar upah efisiensi untuk meningkatkan kualitas pekerja.
- d. Upah efisiensi sebagian besar diberlakukan di negara-negara berpenghasilan rendah. Dengan harapan, upah riil dibayar lebih tinggi sehingga pekerja mampu membeli lebih banyak makanan dan lebih banyak makanan bergizi sehingga pekerja akan lebih sehat dan lebih produktif. Oleh karena itu, perusahaan dapat memilih untuk membayar upah efisiensi untuk meningkatkan kesehatan pekerja.

Perusahaan berharap bahwa peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari membayar upah yang tinggi dapat lebih dari mengimbangi biaya tambahan upah, sehingga menurunkan biaya produksi perusahaan. Karena upah efisiensi berada di atas upah pasar, mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Upah efisiensi, oleh karena itu, memberikan satu penjelasan mengapa suatu perekonomian dapat mengalami pengangguran bahkan ketika pengangguran siklis adalah nol.

3. Serikat Buruh

Serikat Buruh adalah organisasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan pengusaha mengenai upah dan kondisi kerja bagi para anggota. Serikat buruh dapat menawarkan upah yang berada di atas tingkat upah pasar. Dengan upah yang lebih tinggi mengakibatkan perusahaan mempekerjakan lebih sedikit pekerja. Apakah serikat buruh meningkatkan tingkat pengangguran dalam perekonomian? Bagaimana dengan serikat buruh di Indonesia, apakah mampu menawarkan upah yang lebih tinggi dari upah pasar? Di Indonesia, serikat buruh bersama pengusaha, dan pemerintah justru berunding untuk menetapkan upah pasar yang disebut dengan upah minimum regional (UMR). Sepertinya perlu ada perubahan regulasi tentang kekuatan relatif serikat buruh terkait dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.

4. Upah Minimum

Upah minimum adalah tingkat upah minimum per jam yang harus dibayar oleh majikan kepada karyawan. Jika upah minimum ditetapkan di atas upah pasar, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Akibatnya, sebagian pekerja akan

menganggur yang seharusnya sudah bekerja jika tidak ada upah minimum.

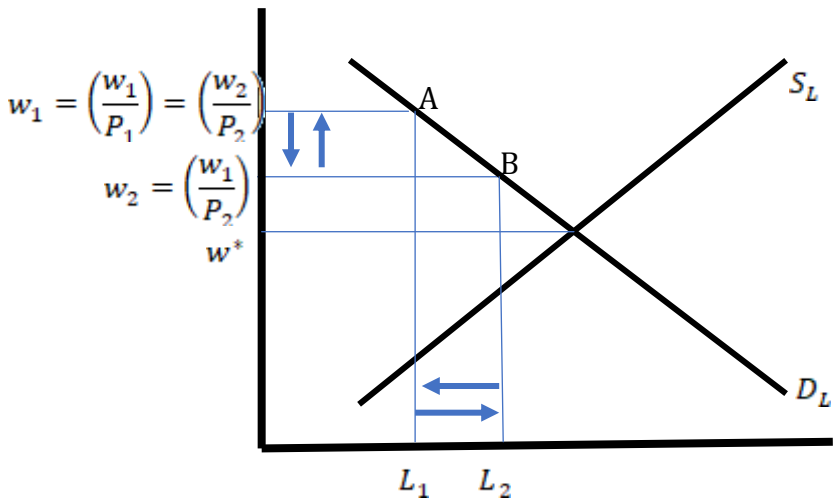
Sistem pengupahan di Indonesia ditetapkan setiap tahun sekali. Upah minimum dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja (serikat buruh) atau lebih dikenal dengan tripartit. Besaran upah minimum berbeda sangat tergantung dari masing-masing daerah yang disesuaikan pada harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lain. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, muncul istilah Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan UMP oleh gubernur. Sementara, UMK merupakan standar upah minimum yang diberlakukan di daerah tingkat kabupaten/kota, dengan pembahasan diusulkan oleh bupati atau wali kota, dan ditetapkan oleh gubernur. UMP Indonesia Tahun 2021 sebesar Rp2.687.724,00. Tahun 2022, UMP tertinggi adalah UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.416.187,00, dan yang terendah adalah UMP Sulawesi Barat sebesar Rp1.765.000,00 (BPS, 2022).

Berapa nilai UMP dan UMK yang akan meningkatkan pengangguran? Relatif sedikit pekerja yang mendapatkan UMP atau UMR. Semakin rendah pekerja yang mendapatkan UMP atau UMR ini menunjukkan bahwa UMP dan UMK mungkin tidak memiliki pengaruh penting pada tingkat pengangguran secara keseluruhan. Namun, UMP dan UMK dapat secara signifikan meningkatkan tingkat pengangguran untuk kelompok pekerja berketerampilan rendah tertentu. Misalnya, tingkat pendidikan merupakan penentu penting apakah pekerja akan mendapatkan upah minimum, sehingga pekerja yang berpendidikan tinggi dengan gelar sarjana atau lebih tinggi yang akan memperoleh upah minimum. Tetapi karena remaja dan pekerja lain yang menerima upah minimum adalah bagian yang relatif kecil dari angkatan kerja, sebagian besar ekonom percaya

bahwa, pada tingkat saat ini, pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia cukup kecil.

5. Kebijakan Moneter

Apakah kebijakan moneter mampu mempengaruhi tingkat pengangguran dalam jangka panjang? Dikotomi klasik adalah pernyataan bahwa dalam jangka panjang, variabel nominal, seperti jumlah uang beredar atau tingkat harga, tidak mempengaruhi variabel riil, seperti tingkat kesempatan kerja atau PDB riil. Jika dikotomi klasik benar, maka kebijakan moneter tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Dengan menggunakan model pasar tenaga kerja untuk memahami kapan dikotomi klasik harus diterapkan.



Gambar 8.5 Pasar Tenaga Kerja dan Kebijakan Moneter
(Sumber: Hubbard, dkk, 2012)

Gambar 8.5 menunjukkan bahwa ada pengangguran di pasar tenaga kerja dengan berbagai alasan, termasuk adanya upah efisiensi dan serikat buruh. Meskipun upah riil yang menentukan pekerjaan di pasar tenaga kerja, antara pekerja dan perusahaan akan bernegosiasi untuk menentukan besaran upah nominal. Karena kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat harga, dalam jangka pendek, sehingga kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi upah riil dan tingkat pekerjaan.

Misalkan Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar (Persamaan 8.3). Dari pembahasan tentang teori kuantitas uang diketahui bahwa tingkat harga akan naik dari P_1 ke P_2 . Jika upah nominal tetap pada tingkat awal, w_1 , sehingga upah riil akan turun menjadi w_2 . Penurunan upah riil tersebut akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, sehingga lapangan kerja meningkat. Pasar tenaga kerja berada di titik B. Poin kunci adalah jika upah nominal ditetapkan pada tingkat awal, sehingga ketika ada penambahan jumlah uang beredar dapat menurunkan upah riil dan meningkatkan lapangan kerja.

Namun, upah riil tidak bertahan pada w_2 selamanya. Misalnya, perusahaan menemukan bahwa upah riil, w_2 , tidak cukup tinggi untuk mencapai keuntungan efisiensi yang diinginkan. Perusahaan-perusahaan ini akan membayar upah efisiensi yang lebih tinggi dari upah nominal, w_2 , yang akan menyebabkan upah riil meningkat kembali ke nilai awal, w_1 . Pasar tenaga kerja kembali ke titik awal A. Oleh karena itu, setelah upah nominal menyesuaikan dengan tingkat harga yang lebih tinggi, peningkatan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi upah riil dan kesempatan kerja. Jadi peningkatan jumlah uang beredar sementara mengurangi upah riil dan meningkatkan lapangan kerja. Namun, dalam jangka panjang upah nominal meningkat sehingga upah riil dan lapangan kerja kembali ke tingkat semula.

Peningkatan jumlah uang beredar meningkatkan variabel nominal. Tetapi dalam jangka panjang, tingkat harga dan upah nominal keduanya meningkat sehingga upah riil tidak berubah. Karena upah riil tidak berubah, tingkat pekerjaan tetap tidak berubah. Dengan kesempatan kerja yang konstan, dengan faktor-faktor lain yang konstan, tingkat PDB riil tidak akan berubah. Upah riil, lapangan kerja, dan PDB riil semuanya merupakan variabel riil karena mewakili kuantitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar tidak meningkatkan variabel riil.

Model pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa dikotomi klasik berlaku dalam jangka panjang ketika harga memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan jumlah uang beredar, tetapi dikotomi tidak berlaku dalam jangka pendek ketika harga tidak memiliki cukup waktu untuk sepenuhnya menyesuaikan diri dengan peningkatan jumlah uang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

- Havrilesky, Thomas M., and Boorman, John T. 1982. Money Supply, Money Demand and Macroeconomic Models, 2nd ed, Harlan Davidson, inc Arlington Heights, Illionis 60004.
- Hubbard, Glen, Anthony P. O'Brian, and Matthew P. Rafferty. 2012. Macroeconomics, Prentice Hall,
- Mishkin, Frederic S. 2011. *The economics of money, banking and financial markets*. 4th Canadian ed. Toronto.

BAB 9

KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

Oleh Natalia Artha Malau

Universitas Negeri Manado

9.1 Pendahuluan

Dalam perekonomian, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam kelangsungan hidup masyarakat negaranya dalam mencapai kesetaraan ekonomi. Tanggung jawab itu dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonnomi. Instrument-instrument yang digunakan dalam kebijakan ekonomi makro antara lain adalah kebijakan ekonomi fiskal atau kebijakan fiskal (*fiscal policy*) dan kebijakan ekonomi moneter atau kebijakan moneter (*moneter policy*).

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam ekonomi secara makro. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam ekonomi yang memiliki tujuan dan focus pada perbaikan kondisi perekonomian, kebijakan ini dilakukan dengan menyesuaikan pengaturan dalam pendapatan pemerintah dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Sementara, kebijakan moneter adalah kebijakan yang mempengaruhi jumlah uang beredar.

9.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki peranan penting memberikan kestabilan dalam perekonomian dan menciptakan tingkat

perekonomian yang lebih tinggi. Rahardja dalam Masri (2008), mengatakan bahwa kebijakan dalam fiskal merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah dalam mencapai pendapatan dan pengeluaran terbaik dengan cara membuat perubahan-perubahan dalam pendapatan ataupun pengeluaran pemerintah tersebut. Sementara menurut Eko Suprayitno (2005), kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam membelanjakan pendapatan untuk mencapai suatu tujuan ekonomi.

Mustafa Edwin Nasution (2006), kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah aturan dalam pengeluaran pajak. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah pada anggaran belanja negara untuk mempengaruhi perekonomian (M. Rianto, 2011). Kebijakan fiskal adalah langkah yang diambil pemerintah dalam mengelola anggaran pemerintah atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan fiskal sering didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan, pembayaran transfer, pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran pada semua tingkat pemerintahan.

Kewenangan dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro dalam bidang fiskal berada di tangan pemerintah. Dalam hal ini, Undang-Undang tentang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kuasanya ada pada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal menunjukkan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau jumlah belanja dan jumlah pendapatan, yang

secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dapat dilihat melalui anggaran pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). sebagai suatu rencana keuangan pemerintah. Penerapan kebijakan ini melalui pengelolaan pajak dan APBN.

1) Peningkatan dalam penerimaan

Dimana terjadi perubahan pada tarif pajak dan akan berpengaruh pada ekonomi negara. Pendapatan pemerintah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), biasanya bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, perdagangan (seperti pajak impor dan pajak ekspor) dan pajak lainnya. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak mencakup penerimaan sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan pendapatan bukan pajak lainnya.

2) Pengeluaran pemerintah (*expenditure policy*)

Pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada perekonomian, ada dampak pada sisi pengeluaran agregat. Belanja negara meliputi anggaran belanja oleh pemerintah pusat, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana perimbangan. Pengeluaran pemerintah untuk belanja non investasi, seperti gaji pegawai, belanja modal, dan lain-lain.

3) *Government transfer*

9.2.1 Instrumen, Tujuan dan Fungsi Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah intervensi pemerintah dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mempengaruhi perekonomian serta memiliki tujuan dalam memaksimalkan kesejahteraan dan stabilitas dalam perekonomian.

Untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan fiskal maka instrument kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan fungsional (*functional finance*)
Pengaruh tidak langsung terhadap pendapatan nasional dipertimbangkan dalam kebijakan fiskal ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja.
- 2) Pengelolaan anggaran (*the managed budget approach*)
Kebijakan ini mengatur pengeluaran pemerintah, pajak dan pinjaman agar kestabilan ekonomi dapat tercapai.
- 3) Stabilisasi anggaran otomatis (*the stabilization budget*)
kebijakan ini mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat biaya dan manfaat dari berbagai program kegiatan. Tujuan untuk penghematan pengeluaran pemerintah.
- 4) Anggaran belanja yang seimbang (*balanced budget approach*)
Pendekatan ini menyamakan anggaran pengeluaran dengan pendapatan sama besar yang mengacu pada kebutuhan neraca pembayaran sehingga terjadi kestabilan ekonomi.

Tujuan dari kebijakan fiskal adalah : 1) Koreksi atas ketidakseimbangan sementara, 2) Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan 3) Redistribusi pendapatan. Dengan berbagai tujuan spesifik tersebut, maka terdapat kebijakan fiskal jangka pendek (stabilisasi), dan kebijakan fiskal jangka panjang. Akan tetapi, langkah-langkah kebijakan fiskal jangka pendek juga

memiliki konsekuensi jangka panjang, dan sebaliknya kebijakan fiskal jangka panjang juga memiliki implikasi jangka pendek.

Sementara itu, Teori dari seorang ahli John F. Due memiliki tiga tujuan kebijakan fiskal:

1. Meningkatkan produk domestik Bruto dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain kebijakan fiskal tujuannya memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan menciptakan kesempatan kerja yang tentunya akan mengurangi pengangguran,
3. Untuk menjaga tingkat kestabilan harga secara umum, dan mengatasi terjadinya inflasi.

Ada tiga aktivitas utama dari otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal itu antara lain yaitu :

1. Fungsi alokasi,
dalam fungsi Alokasi, Pemerintah melakukan fungsi intervensi ekonomi terhadap sumber daya ekonomi. Intervensi langsung ini dilakukan dengan pembelian barang seperti bahan pertahanan dan pendidikan, dan intervensi secara tidak langsung dilakukan melalui tingkat pajak dan subsidi. Intervensi ini akan mendorong aktivitas ekonomi atau bisa menghambat aktivitas lainnya.
2. Fungsi Distribusi,
Kebijakan ini ada kaitannya dengan bagaimana barang-barang yang di produksi distribusikan ke masyarakat suatu negara, berkaitan juga dengan isu-isu seperti pemerataan, dan trade-off antara pemerataan dan efisiensi.

3. Stabilisasi.

Stabilisasi menjamin ekonomi pada full employment dengan tingkat harga yang stabil. Tujuan fungsi stabilisasi adalah berusaha mendorong tingkat pendapatan nasional aktual berada di sekitar pendapatan nasional potensial. Pada saat yang sama, kebijakan stabilisasi mampu mencapai full employment dan price stability.

9.2.2 Komponen, Bentuk dan Jenis Kebijakan Fiskal

Komponen kebijakan fiskal meliputi kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan kebijakan pengelolaan utang.

Bentuk Kebijakan Fiskal, yaitu

a. Kebijakan Penstabil Otomatis

Kebijakan Penstabil otomatis adalah sistem fiskal yang secara otomatis akan cenderung efektif menciptakan stabilitas dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan ini berhubungan dengan kebijakan dalam perpajakan, asuransi, pengangguran dan kebijakan harga minimum.

b. Kebijakan Diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner merupakan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan perekonomian yang terjadi. Kebijakan fiskal ini ada di bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan, biasanya digunakan untuk memperbaharui sistem yang sudah ada untuk mengatasi situasi dan kondisi permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Jenis Kebijakan Fiskal, yaitu :

1. Kebijakan Fiskal surplus

Kebijakan fiskal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan inflasi, tujuannya untuk menciptakan surplus pada pendapatan dibandingkan pada pengeluaran. Contohnya melakukan intervensi pada kebijakan

perpajakan dan cukai. Akselarasi paada komponen pendapatan ini dilakukan untuk memperkecil anggaran belanja

2. Kebijakan Fiskal defisit

Kebijakan fiskal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai belanja daripada pendapatan, dengan tujuan agar perekonomian semakin meningkat. Dampak butuknya kalo tidak hati-hati adalah pertambahan utang.

3. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran sama besar.

4. Kebijakan Fiskal dinamis

Kebijakan fiskal ini memiliki sifat kebijakan yang longgar karena setiap negara menghadapi kondisi dan situasi yang berubah dan tidak menentu.

9.2.3 Contoh Kebijakan Fiskal

Setelah krisis 1997, kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah diarahkan pada sasaran yang mendukung konsolidasi (fiscal sustainability) dan sasaran yang menciptakan ruang gerak fiskal (fiscal space) yang mampu memperkuat stimulus fiskal sehingga berdampak pada perekonomian negara. Tahun-tahun selanjutnya, sasaran kebijakan fiskal tersebut tetap menjadi prioritas kebijakan.

Pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, pencapaian sasaran kebijakan terbagi menjadi fase konsolidasi yaitu penyehatan APBN (2000 – 2005) dan fase stimulus fiskal (tahun 2006 – 2009). Konsolidasi fiskal diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam fase konsolidasi, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan negara
titik beratnya pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dalam hal ini kebutuhan dasar tetap dijamin dan alokasi belanja ditargetkan minimum.
3. Pengelolaan utang negara yang sehat
Hal ini dilakukan agar kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah tidak terlalu tinggi.
4. Perbaikan struktur dalam penerimaan dan alokasi dalam belanja negara,
Peningkatan peranan sektor pajak nonmigas berusaha dilakukan, dan pengalihan secara bertahap dalam subsidi ke bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dilakukan agar sasaran subsidi bisa lebih tepat.
5. Pengelolaan dalam keuangan negara dilakukan lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan, contoh pengelolaan ini antara lain melalui perbaikan dalam manajemen pengeluaran pemerintah.

Pada fase stimulus fiskal dilakukan optimalisasi belanja negara untuk sarana dan prasarana pembangunan, alokasi belanja negara untuk kegiatan dan sektor yang mampu menggerakkan perekonomian, serta pemberian insentif pada perpajakan. Selama pandemic, kebijakan fiskal yang cukup mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah adalah kebijakan pajak. Pemerintah memberikan keringanan pajak berupa insentif pajak yakni adanya penghapusan pajak. Tujuannya adalah untuk menjaga perekonomian tetap stabil, walaupun di satu sisi nilai pendapatan pajak yang diterima berkurang. Stimulus pajak ini mampu mendorong ekonomi karena dampak pandemic tidak terlalu signifikan. Kebijakan fiskal lainnya pada masa pandemic adalah

peningkatan pengeluaran anggaran dalam penanganan Covid 19 melalui program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021. Anggaran yang dikucurkan adalah senilai Rp 700 triliun, setelah sebelumnya yaitu pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 690 Triliun.

9.3 Kebijakan Moneter

Selain kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi negara, kebijakan moneter juga sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan bank sentral, dengan tujuan untuk menjaga ekonomi suatu negara yang stabil melalui pengaturan jumlah uang yang beredar (JUB) dalam masyarakat. Mengapa pengaturan jumlah uang beredar yang dikendalikan?. Pengendalian ini diperlukan karena persediaan jumlah uang yang ada di masyarakat suatu negara dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Suku bunga, inflasi dan yang lain bisa memiliki pengaruh dari jumlah uang dalam masyarakat, Peranan bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengenai Kebijakan Moneter Bank Indonesia.

Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam bentuk pengendalian besaran moneter (uang beredar, uang primer dan kredit perbankan) atau suku bunga untuk mencapai kestabilan ekonomi makro (Bank Indonesia). Keputusan mengambil kebijakan moneter didasarkan atas analisa beberapa variable ekonomi seperti inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, perdagangan internasional, dan faktor lainnya. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui suku bunga bank, kebijakan diskonto dan sebagainya. Sebagai Contoh kebijakan moneter adalah pengendalian tingkat inflasi. Bank sentral menetapkan kebijakan dengan cara mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB) yang melalui kebijakan suku bunga.

9.3.1 Tujuan Kebijakan Moneter

Berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia tentang kebijakan moneter yaitu UU No. 3 Tahun 2004, tujuan utama kebijakan Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan dalam nilai rupiah. Berbagai tujuan kebijakan moneter tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Menjamin Stabilitas Ekonomi**
Salah satu tujuan kebijakan adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan peredaran jumlah uang dalam masyarakat.
2. **Pengendalian dalam Inflasi**
Dalam tujuan kebijakan moneter mengendalikan tingkat inflasi, Bank Indonesia akan focus mengurangi uang yang beredar dalam masyarakat.
3. **Memperluas Lapangan Pekerjaan**
Kebijakan peredaran uang mampu meningkatkan aktivitas produksi, yang memerlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Penyerapan tenaga kerja akan meningkat seiring dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan.
4. **Melindungi Stabilitas Harga Barang di Pasar**
Kestabilan harga dilakukan dengan menjaga keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang yang akan mampu menjaga daya beli masyarakat.
5. **Menjaga Keseimbangan dalam Neraca Pembayaran Internasional**
Kebijakan ini berkaitan dengan keseimbangan neraca pembayaran Internasional. Dilakukan dengan menjaga kestabilan barang ekspor dan impor sama jumlahnya. Kebijakan ini dilakukan melalui kebijakan devaluasi mata uang.
6. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**
Tujuan kebijakan moneter mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempengaruhi tiap komponen. Misalnya

seperti, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, mengontrol tingkat inflasi dan aktivitas produksi serta permintaan barang/jasa, dan sebagainya.

9.3.2 Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Dalam masa resesi dan masa perekonomian mengalami overheating maka diperlukan kebijakan moneter berbeda dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jenis kebijakan moneter tersebut yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

kebijakan moneter yang melakukan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi dengan tujuan meningkatkan jumlah uang beredar dalam masyarakat disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif.

Langkah yang diambil melalui kebijakan moneter ekspansif ini contohnya melakukan pembelian sekuritas pemerintah oleh bank indonesia, penurunan suku bunga, serta menurunkan jumlah minimum cadangan bank. Kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli konsumen, dan juga mengurangi tingkat pengangguran.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Biasanya kebijakan ini dilakukan saat terjadi inflasi. Langkah yang diambil melalui kebijakan moneter kontraktif adalah menaikkan tingkat suku bunga, dan meningkatkan jumlah cadangan dalam bank.

9.3.3 Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan ini akan mempengaruhi peredaran jumlah uang dan perekonomian dengan mengontrol variable-variabel makro yaitu tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dalam hal ini kedua variabel tersebut menjadi instrument penting

dalam kebijakan moneter. Ada instrumen kebijakan moneter lainnya, yang juga mempengaruhi ekonomi, yaitu .

1. **Kebijakan fasilitas Diskonto**

Kebijakan diskonto atau dikenal dengan discount rate adalah instrumen kebijakan melalui tingkat suku bunga. Kebijakan ini merupakan fasilitas berupa kredit dan simpanan yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank umum dengan penjaminan surat berharga dan discount rate yang ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan. Ketika peredaran uang perlu untuk ditingkatkan, bank Indonesia akan melakukan penurunan suku bunga pinjaman. Dan sebaliknya, suku bunga kredit akan dinaikkan ketika ingin melakukan pengurangan dalam jumlah uang yang beredar.

2. **Operasi Pasar Terbuka (OPT)**

Operasi pasar terbuka (OPT) dilakukan untuk mengontrol jumlah uang. Kebijakan ini dilakukan melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga. Operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan mekanisme lelang atau non lelang. Ketika ingin mengurangi jumlah uang yang ada di masyarakat, maka Bank Indonesia akan melakukan penjualan surat berharga. Sebaliknya, Bank Indonesia akan membeli surat berharga untuk meningkatkan jumlah peredaran uang.

3. **Kebijakan Rasio Cadangan Wajib**

Rasio cadangan wajib adalah jumlah minimum alat liquid yang wajib dipenuhi oleh bank umum. Saat cadangan kas uang dalam bank ingin dikurangi, uang beredar di masyarakat ditambahkan dengan meningkatkan jumlah pinjaman. Dan saat cadangan kas uang bank dianalisa

harus ditingkatkan, maka peredaran uang dikurangi dengan menaikkan suku bunga tabungan.

4. Penetapan Suku Bunga Bank Acuan

Pengendalian peredaran uang dapat dilakukan melalui kebijakan suku bunga acuan. Bank Indonesia menetapkan besaran suku bunga untuk menjadi acuan bank umum menetapkan suku bunga bank.

5. Imbauan Moral

Dalam kebijakan ini, bank Indonesia (BI) melakukan Imbauan kepada seluruh bank, menjalankan kebijakan untuk menurunkan atau meningkatkan suku bunga pinjaman.

9.3.4 Contoh Kebijakan Moneter

Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia melakukan kredit ke berbagai sektor secara langsung dan ke berbagai kegiatan urgent dan memerlukan pembiayaan ss. Terjadi peningkatan jumlah peredaran uang di masyarakat ketika kebijakan moneter ini dilakukan. Fasilitas overdraft juga merupakan salah satu kebijakan moneter yang mampu mendorong peredaran uang berada pada titik yang stabil. Fasilitas overdraft ini merupakan kebijakan dalam membantu bank umum yang memiliki masalah likuiditas dalam jangka pendek. Penerbitan surat utang negara dan intervensi rupiah juga merupakan kebijakan moneter yang cukup sering diambil oleh pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi.

Pada masa pandemik, ada beberapa kebijakan yang dilakukan bank Sentral. Adanya intervensi yang cukup intens di pasar keuangan pada masa pandemik, hal ini dilakukan agar rupiah bergerak tetap stabil mengikuti pasar. Intervensi yang dilakukan antara lain adalah intervensi di pasar spot dan intervensi dalam pembelian SBN di pasar sekunder.

Kebijakan berikutnya dalam masa pandemic adalah bank Indonesia melakukan kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing bank umum menjadi 4%. Tujuan kebijakan ini meningkatkan likuiditas valas di perbankan, dan akhirnya akan meningkatkan kestabilan nilai tukar rupiah. Kebijakan Bank Indonesia lainnya adalah menurunkan nilai GWM pada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pada masa pandemic, ada kesulitan eksportir dan importir dalam melakukan aktivitasnya antara lain biaya dan harga yang semakin mahal dalam pendistribusiannya. Penurunan GWM ini merupakan bentuk kompensasi biaya perdagangan yang meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayief Fathurrahman. 2012. Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi islam : Studi Kasus dalam Mengentaskan kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Eko Suprayitno. 2005. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN 2019. <https://www.kemkeu.go.id/apbn2019>.
- Marius M. 2010. Tesis: "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)Periode 2001-2008. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Nasution, M.E. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2011. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Perry W & Solikin. 2003. Seri kebanksentralan : Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta : PPSK Bank Indonesia.
- Sadono Sukirno. 2016. Makroekonomi Modern. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samuelson, Nordhaus. 2013. Ilmu Makroekonomi. PT. Media Global Edukasi.
- Telisa Aulia Falianty. 2019. Teori Ekonomi Makro dan penerapan di Indonesia. Depok : Rajawali Pers.
- Walsh, Carl E. 2010. Monetary Policy and Theory. The MIT Press, third edition.

BAB 10

PERBANDINGAN

SISTEM-SISTEM EKONOMI

Oleh Teguh Pamuji Tri Nur Hayati

Universitas Sultan Fatah Demak

10.1 Pendahuluan

Sistem ekonomi dimulai dari pemikiran Adam Smith dari Mahzab Klasik, di tahun 1776 yang memunculkan revolusi pemikiran ekonomi dengan adanya pemikiran mengenai sistem ekonomi, yang berdasarkan pada mekanisme pasar bebas. Dimana dalam sistem ini, peranan dari Pemerintah sangat minim, sehingga disebut juga sistem ekonomi kapitalis. Dengan perkembangan waktu, sistem ekonomi ada beberapa macam (mekanisme koordinasinya) yaitu : (1) Sistem ekonomi Kapitalis, (2) Sistem ekonomi Sosialis, dan Sistem ekonomi Campuran.

Peranan sistem ekonomi pada suatu perekonomian negara adalah :

1. Menjadi pendorong bagi suatu perusahaan untuk kelancaran proses produksi.
2. Menjadi koordinasi bagi semua individu pelaku perekonomian dalam suatu kegiatan ekonomi negara.
3. Mengatur pembagian hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu kegiatan perekonomian.
4. Agar proses distribusi barang dan jasa berjalan secara lancar dengan mekanisme yang tepat.

10.1.2 Pengertian Sistem Ekonomi

Adanya suatu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, dimana manusia menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun permasalahan-permasalahan ekonomi adalah :

1. What : barang apa yang akan diproduksi?
2. How : bagaimana cara memproduksi barang tersebut?
3. Who : Untuk siapa barang tersebut diproduksi?
4. Institusi/Lembaga apa yang akan digunakan?

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan suatu lembaga pengaturan ekonomi yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi, yang disebut dengan sistem ekonomi.

Assar Linbeck (1994), menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan sekumpulan mekanisme ekonomi, dan lembaga institusi yang mempunyai tugas untuk : pengambilan suatu keputusan pada suatu wilayah mengenai proses produksi, pendapatan masyarakat, dan kegiatan konsumsi masyarakat di suatu wilayah. Penertian lain dari sistem ekonomi dikemukakan Pryor dalam C. Martin Schitzer (1990) dalam sistem ekonomi ada beberapa yang menyesuaikan pada beberapa perubahan waktu, dimana di dalam nya termasuk institusi atau lembaga, peraturan, budaya tradisi, norma, sikap perilaku dalam suatu wilayah.

10.1.2 Karakteristik Sistem Ekonomi

Ada beberapa hal yang mempengaruhi sistem ekonomi, yang digunakan dalam suatu wilayah yaitu :

1. Sejarah (*history*), budaya (*culture*), cita-cita atau tujuan wilayah (*goal*) yang ingin dicapai, perilaku (*behavior*) masyarakat dimana sistem ekonomi tersebut di terapkan.
2. Sumber daya alam (*Natural Resources*) yang dimiliki (iklim, dan SDA).

3. Filsafat yang diyakini dan dipakai oleh sebagian besar masyarakat wilayah tersebut.
4. Teorisasi yang dianut masyarakat, dimana berisi mengenai upaya mencapai tujuan atau cita-cita tersebut, baik pada masa lampau, saat ini dan di masa yang akan datang.

Kekuatan utama (*main powerty*) dari sistem ekonomi pada suatu wilayah adalah :

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (*growt of Economy*).
Ini diukur dengan *gross National Product* (gNP) yang semakin meningkat, dimana gNP menggambarkan kegiatan perekonomian suatu wilayah, dimana gNP merupakan keseluruhan barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah pada periode tertentu (1 tahun).
2. Kekuatan Sosial Budaya.
Kekuatan ini meliputi : strata sosial, ideologi pandangan yan dianut suatu wilayah, agama, pekerjaan, pendapatan, tradisi masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya. Dimana kekuatan ini akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mencapai cita-cita ekonomi, mengatasi permasalahan ekonomi.
3. Lingkungan.
Yang termasuk dalam kategori ini adalah : populasi, lokasi dan sumber daya alam yang dimilikinya. Dimana hal ini akan membawa ke bentuk sistem ekonomi yang akan dipakai dalam suatu wilayah.
4. Perbedaan antara sistem ekonomi satu dengan lainnya adalah :
 - a. Kebebasan bagi konsumen untuk memilih kebutuhan barang dan jasa.
 - b. Kebebasan masyarakat untuk memilih pekerjaan yang digelutinya.
 - c. Kepemilikan atas alat-alat produksi.

- d. Pengaturan keuntungan atas usaha ekonomi yang dilakukan.
- e. Pengaturan harga untuk konsumsi dan produksi.
- f. Penentuan pertumbuhan ekonomi.
- g. Penentuan stabilitas ekonomi.
- h. Pengambilan keputusan ekonomi.
- i. Pemerataan kesejahteraan dan pendapatan.

Ada beberapa yang menjadi keberhasilan perekonomian, dilihat dari sistem ekonomi yang dipakai oleh suatu wilayah, yaitu :

- 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi.
- 2. Tingkat inflasi (kenaikan barang).
- 3. Tingkat pengangguran.
- 4. Efisiensi ekonomi.
- 5. Pemerataan distribusi pendapatan.
- 6. Stabilitas ekonomi.
- 7. Pencapaian sasaran pembangunan.

10.2 Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi Kapitalis dipelopori oleh Adam Smith, dimana kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi ideologi (pandangan) yang kepemilikan aset faktor produksi bisa dimiliki oleh individu (swasta), dimana kekayaan individu bisa terwujud, karena produksi untuk dijual. Meskipun saat ini (kenyataannya) sistem ekonomi ini sudah tidak bersifat murni lagi, karena di beberapa negara (negara maju) memiliki kepemilikan sektor usaha, dalam bentuk yang kecil (mikro) atau besar.

Beberapa ciri atau karakteristik dari sistem ekonomi kapitalis adalah :

- 1. Kepemilikan aset produksi bisa dimiliki oleh pribadi /individu (*Private Property*).

2. Motif dari keuntungan (*Profit Motive*), dimana para Kapitalis menggunakan laba (keuntungan) untuk memutuskan barang tersebut diproduksi atau tidaknya. Maksimum profit menjadi salah satu pertimbangan pandangan ini.
3. Sistem harga (*Price System*) dalam ajaran kapitalisme sistem harga ditentukan oleh pasar (permintaan dan penawaran).
4. Kebebasan berusaha (*Freedom of choice*), dalam sistem ekonomi kapitalis kebebasan berusaha bisa dilakukan oleh setiap orang. Artinya setiap individu bebas melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
5. Persaingan (*competition*), dalam sistem ekonomi kapitalis persaingan antar individu sangat ketat, artinya terjadinya persaingan dan perjuangan di dalam mendapatkan imbalan ekonomi. Sehingga dalam sistem kapitalis yang kuat akan semakin kuat, dan tidak menutup kemungkinan yang kuat akan menindas yang lemah. Sehingga orang yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin (kesenjangan pendapatan sangat lebar).
6. Individualisme, dalam sistem kapitalisme manusia bersifat individu. Artinya mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibanding kepentingan orang lain.
7. Kedaulatan konsumen, di dalam sistem kapitalis kedaulatan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Peranan kedaulatan konsumen sebagai basis utama mengingat kegiatan konsumsi merupakan aktifitas ekonomi di dalam perekonomian.
8. Pemerintahan yang terbatas (*Limited goverment*), di dalam sistem ekonomi Kapitalis peranan Pemerintah sangat minim (kecil). Peranan Pemerintah terbatas hanya untuk kepentingan kepentingan bersifat umum untuk masyarakat.

Seperti : pertahanan Nasional, pembangunan sekolah, hubungan diplomatik dan lain sebagainya.

Menurut Karl Marx, ada beberapa keburukan-keburukan dalam sistem ekonomi Kapitalis, yaitu :

1. Terjadi kesenjangan pendapatan dan kekayaan antar Individu, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. hal ini akan membawa konsekuensi terjadi jurang kemiskinan yang melebar di wilayah tersebut.
2. Terjadi kanibalisme, dimana yang kuat akan memakan yang lemah. Ini terjadi pada perusahaan yang besar akan merugikan perusahaan kecil.
3. Munculnya konsentrasi di sektor industri, dimana sektor industri menjadi padat modal dan padat teknologi. Hal ini muncul karena adanya monopoli disebabkan kekuatan modal dari pemilik perusahaan besar di sistem ekonomi Kapitalisme.
4. Posisi buruh sebagai pekerja memiliki posisi yang tidak menguntungkan atau lemah, dimana hal tersebut akan membawa konsekuensi pekerja buruh akan bekerja dengan upah rendah, jam terbang tinggi dan berimplikasi pada tingkat kesehatan pekerja yang semakin memburuk.

Berikut ini kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi Kapitalisme :

Kelebihan Sistem Kapitalisme :

1. Individu bisa memiliki faktor-faktor produksi, sehingga individu bisa mempunyai kekayaan.
2. Harga ditentukan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, sehingga masyarakat bisa memilih harga konsumsi sesuai dengan pendapatannya.
3. Peranan Pemerintah hanya sebagai Regulator dan Katalisator dalam perekonomian.

4. Sistem pasar yang terbuka, membuat peluang perusahaan baru memasuki pasar, karena terjadi persaingan pasar yang kompetitif.
5. Kinerja ekonomi yang lebih baik bisa terwujud.

Kelemahan Sistem Kapitalisme :

1. Kepentingan pribadi atau individu lebih diutamakan, sehingga mengabaikan kepentingan orang lain atau bersama. Sehingga bisa memicu pelanggaran hak-hak manusia.
2. Pemerintah terlihat cuci tangan tidak fokus dalam proses perekonomian, dan terlihat lebih memihak pemilik modal.
3. Munculnya masalah kesenjangan pendapatan dan kekayaan di dalam lingkungan masyarakat.
4. Sistem pasar bebas memunculkan manusia sebagai *homoeconomicus*, dimana manusia yang berorientasi pada ekonomi dalam kehidupannya.

10.3 Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi ini muncul sebagai bentuk koreksi dari sistem ekonomi sebelumnya yaitu kapitalisme. Dimana pelopor sistem ekonomi sosialis ini adalah Karl Marx. Sistem ekonomi sosialis komunis (Marxis), sering dikenal dengan sistem ekonomi komando. Sistem ini memiliki aturan bawa setiap pelaku ekonomi (unit ekonomi), tidak boleh mengambil keputusan sendiri, yang menyimpang dari aturan komando tertinggi namun berdasarkan perintah dari komando (partai berkuasa). Jadi sistem ekonomi sosialis kekuasaan tertinggi yang menentukan arah, kebijakan, sasaran ekonomi. Penguasaan barang sosial atau individu diatur oleh pimpinan tertinggi. Sehingga apa yang dilakukan oleh unit ekonomi sangat terbatas. Kekayaan atau kepemilikan faktor produksi oleh unit ekonomi sangat kecil atau bisa saja tidak ada.

Pada sistem ekonomi sosialis, mekanisme arah dan pasar tidak berfungsi sama sekali. Begitu pula dengan peranan media masa, keberadaannya tidak menjadi wadah yang sempurna, berita yang dikeluarkan diatur oleh penguasa. Sistem ini memiliki birokrasi yang rumit, termasuk dalam tugas dan wewenangnya. Sehingga arus informasi dalam kegiatan ekonomi mengalami keterlambatan dan distorsi. hal ini sudah tentu menyulitkan bagi pelaku unit ekonomi untuk memperluas usahanya.

Adanya distorsi dan kebijakan yang terpusat dari pemimpin tertinggi, maka menyebabkan perekonomian di wilayah tersebut tidak efektif dan efisien, sehingga hal ini terkadang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat, karena pembatasan preferensi dari individu. Sistem ekonomi Sosialis-Komunis ini muncul karena reaksi atas sistem ekonomi Kapitalis, yang dianggap merugikan kaum buruh yaitu kaum yang tidak memiliki modal (kapital). Dimana penguasa dianggap melakukan ketidakadilan terhadap kaum buruh. Kaum buruh beranggapan perlunya peranan terpusat dari pemerintah dalam pengendali perekonomian, agar buruh dianggap sebagai salah satu faktor produksi, dan keberadaannya dianggap penting.

Pada kenyataannya negara yang menganut sistem ekonomi Sosialis kondisinya tidak sebaik dengan negara penganut Kapitalis, kecuali dibidang pendidikan. Mengingat sistem ekonomi sosialis, menganggap bahwa pendidikan merupakan kebutuhan universal bagi suatu masyarakat, dan dengan pendidikan akan menjadi kekuatan bagi negara.

Berikut ini kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi Sosialis.

Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis :

1. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan relatif kecil di masyarakat.
2. Ketergantungan dengan pihak luar negeri atau negara lain sangat kecil, mengingat keinginan dari masyarakat

untuk swasembada ekonomi dengan potensi yang dimiliki.

3. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah memiliki peranan besar dalam menggerakkan perekonomian wilayahnya.

Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis :

1. Kebebasan individu dalam memupuk kekayaan dan faktor produksi sangat terbatas atau bahkan tidak bisa.
2. Kebijakan dan kegiatan perekonomian ditentukan oleh pusat atau pemimpin, sehingga pelaku ekonomi harus tunduk dan mengikuti kebijakan tersebut. Hal ini membuat kreatifitas pelaku ekonomi lemah, dan daya kreatifitas kecil karena semangat untuk kesejahteraan (mengumpulkan kekayaan) tidak bisa dilakukan.
3. Pasar tidak berfungsi secara optimal, mengingat harga dalam sistem ini ditetapkan bukan dari sistem pasar, namun dari Pemerintah. Sehingga daya saing terhadap suatu barang atau produk sangat rendah, atau tidak dapat bersaing dengan produk dari negara lain.
4. Dalam sistem ini pada umumnya Pemerintah gagal untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik dan lebih stabil.
5. Sistem ekonomi yang tertutup, membuat penganut sistem ini tertinggal dan terisolir dari pengaruh luar. Padahal dalam perekonomian sangat diperlukan hubungan dengan negara asing, agar negara tersebut tidak tertinggal.

10.4 Sistem Ekonomi Campuran

Dalam perkembangan saat ini sangat sulit menemukan suatu negara yang menganut sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi sosialis murni. Misalnya Cina sudah berubah paradigma menjadi negara yang menganut kapitalis, namun dilain sisi negara tersebut juga memproklamirkan menganut sistem ekonomi sosialis komunis. Sistem ekonomi campuran pada dasarnya, mengkombinasikan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Dari sisi sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi campuran melihat sisi pengusaha swasta, laba, dan harga. Sistem ini menggunakan intervensi Pemerintah dalam perekonomian pada sistem ekonomi Sosialis. Dimana peranan Pemerintah dalam perekonomian berperan dalam perumusan kebijakan ekonomi dan ada beberapa hal mengenai kepemilikan aset yang perlu dikuasai oleh Pemerintah. Penganut sistem ekonomi campuran adalah : Negara Jepang, Jerman. Perancis, Inggris dan lain sebagainya.

Ciri negara dengan sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah merata pada semua aspek, hal ini bertujuan untuk pemerataan pendapatan, kesejahteraan ekonomi masyarakat. Misalnya kebijakan untuk mengatasi pengangguran, menstabilkan harga (inflasi).
2. Kegiatan produksi dan distribusi tetap di tangan pengusaha swasta, namun Pemerintah tetap mengendalikan hal tersebut melalui sistem penganggaran dan pengkreditan, sehingga Pemerintah memiliki peranan yang cukup besar.
3. Adanya perusahaan milik Negara. Negara memiliki perusahaan, dimana perusahaan ini dikelola untuk kesejahteraan bersama masyarakat.

4. Perencanaan perekonomian dilakukan secara terpusat, namun swasta bisa melakukan tindakan ekonomi berdasarkan pemikirannya, walaupun tidak melenceng dari kebijakan Pusat atau Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, Nomor 1. BPFE : Yogyakarta.
- Media, Kompas Cyber. "*Sistem Ekonomi: Pengertian, Tujuan, Ciri-ciri*". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2022-06-27.
- Mubyarto, dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan (PDF)*. Jakarta Selatan: Lembaga Suluh Nusantara. hlm. 70. ISBN 978-602-71633-0-0.
- Ulum, Fahrur. 2015. *Sistem Ekonomi Islam: Menumbuhkan dan Stabil dalam Pertumbuhan, Mensejahterakan dan Merata dalam Kesejahteraan*. Yogyakarta: Gerbang Media. hlm. vi. ISBN 978-602-1435-14-4.

BIODATA PENULIS



Puji Muniarty

Dosen Program Studi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima

Penulis lahir di Nunggi pada tanggal 26 Nopember 1985. Menyelesaikan pendidikan S-1 dan S-2 Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan Bisnis di Universitas Mataram. Penulis mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima. Penulis pernah menjadi dosen tamu di PICOMS Internasional University College Kuala Lumpur Malaysia. Sebagai akademisi penulis juga terlibat dalam Tim Penyusunan Studi Awal Masterplan Pengembangan Ekonomi Kegiatan Koordinasi Pencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bima, Tim Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia, Tim Penyusunan Naskah Akademik Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Bima, Tim Hygiene Factor PT. PLN ULP3 Bima, Tim Konsultasi Public PT. PLN ULP3 Bima, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bima dan Tim Juri Kompetisi Wirausaha Muda Tingkat Kota Bima.

BIODATA PENULIS



Yuyun Anggraini

Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Kendari pada tanggal 16 Juli 1992. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Ekonomi Pembangunan Universitas Halu Oleo kemudian melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada.

BIODATA PENULIS



Luluk Fadlianti

**Dosen Tetap Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram**

Penulis lahir di Mataram, 8 Oktober 1974. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2021 dan pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur

BIODATA PENULIS



Fisy Amalia

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta

Penulis lahir di Bandung pada tanggal 7 Agustus 1967. Penulis merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Indonesia.

BIODATA PENULIS



Tri Widayati

Staf Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang, tanggal 28 April 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang, dan melanjutkan jenjang S2 pada Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis melanjutkan program Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2017. Penulis mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Mikro, Matematika Ekonomi, Ekonomi Makro dan Ekonomi Manajerial.

BIODATA PENULIS

Hesty Aisyah, S.E, M.Si

Dosen Tetap STMIK Indonesia Padang

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 06 November 1989. Sempat mengenyam pendidikan di Jakarta sampai kelas 4 SD di SD Muhammadiyah 24 Rawamangun, kemudian pindah ke daerah asal yaitu Kota Padang karena mengikuti orang tua. Dan sampai saat ini tetap setia berdomisili di Kota Padang. Di Kota ini, penulis melanjutkan sekolahnya di SD Pertiwi 2, kemudian SMPN 1 Padang, dan dilanjutkan ke SMAN 10 Padang. Pendidikan tinggi ditempuh dengan mengambil jurusan studi Ekonomi Pembangunan di fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dan setahun setelah itu penulis melanjutkan studi pendidikan magister di universitas yang sama dengan mengambil jurusan Perencanaan Pembangunan di Fakultas Ekonomi.

Saat ini penulis mengabdikan sebagai seorang dosen tetap di STMIK Indonesia Padang dan disamping itu juga aktif menjalankan fungsi sebagai Kepala LPPM di kampus. Jika ingin berdiskusi dengan penulis, silahkan kontak di hestyaisyah.023@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Ida Ayu Nyoman Yulastuti
Dosen Program Studi Akuntansi
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Penulis lahir di Denpasar pada tanggal 19 Juli 1988. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Mahasaraswati Denpasar pada Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana. Penulis berkontribusi aktif sebagai pengelola jurnal penelitian dan pengabdian. Penulis juga telah beberapa kali lolos dalam hibah pendanaan Kemenristekdikti/Brin dan Kemendikbud. Penulis berharap buku ini dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi para civitas akademika dan juga masyarakat umum.

BIODATA PENULIS



Tri Wahyu Rejekiningsih

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Pati tanggal 10 Februari 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Gajah Mada dan melanjutkan S3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro. Penulis menekuni bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

BIODATA PENULIS



Natalia Artha Malau, SE,M.Si.

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas ekonomi dan bisnis (FEB)
Universitas Negeri Manado

Penulis lahir di Pematangsiantar, 26 Desember 1981. Menyelesaikan kuliah dari Program Studi Ekonomi studi pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (2004), dan Magister Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan (MIESP) dari Universitas Diponegoro (2011). Menjadi dosen Kopertis Wilayah 1 Provinsi Aceh-Sumut, mengajar di STIE Nusa Bangsa Medan dan beberapa kampus di Sumatra Utara. Tahun 2015, aktif bekerja di Universitas Negeri Manado di Fakultas ekonomi dan bisnis (FEB) Jurusan Ilmu Ekonomi dalam konsentrasi perencanaan pembangunan dan ekonomi moneter.

BIODATA PENULIS



Teguh Pamuji Tri Nur Hayati, SE, M.Si.

Staf Pengajar Universitas Sultan Fatah, Demak

Penulis lahir di Semarang 18 Oktober 1982. Lulus S1 dari Fakultas Ekonomi pada tahun 2006, dan S2 pada tahun 2008 di Universitas Diponegoro, Semarang. Sejak tahun 2006, menjadi staf pengajar di Universitas Sultan Fatah, Demak. Selain sebagai staf pengajar, juga menjadi Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi di Unisfat Demak. Selain itu juga bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Konsultan Perencanaan Ekonomi di Kota Semarang.